RENCANA STRATEGIS REVIEW

Tahun 2016 - 2021

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sidoarjo
Jl. Sultan Agung No. 19 Telp. (031) 8953200
Sidoarjo - 61211

KATA PENGANTAR

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

Penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif", sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".Berkenaan dengan hal-hal di atas, sebagai bentuk perbaikan dan revisi terhadap ketentuan menyangkut Renana Strategis, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyangkut Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan dasar dan landasan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih update, terintegrasi, sistematis dan sinergis

BPBD Kabupaten Sidoarjo yang memiliki Tugas pokok dan fungsi relatif kompleks merupaksn konsekwensi perlunya penyusunan kebutuhan yang mampu memprediksi semua kemungkinan yang akan terjadi, baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana. Terlebih lagi karena penanggulangan bencana daan manajemen kebencanaan yang semakin kompleks dan variasi serta frekuensi jenis bencana yang terjadi akibat dari perubahan iklim (*Global Warming*) yang terus berlangsung. Sehingga implementasiSistem Perencanaan Penanggulangan dan manajemen Bencana merupakan kebutuhan, yang mau tidak mau harus dipenuhi, bukan hanya sekedar kewajiban.

Sarana dan prasarana manajemen paling tepat untuk itu adalahpenyusunan dan pembuatan dokumen Rencana Strategis,baik dalam jangka panjang (*Long Term*), jangka menengah (*Mid-Term*) dan ataupun jangka pendek (*short term*) sesuai kondisi dan

kebutuhannya, yang mampu menjelaskan secara rinci hubungan dan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program.

Atas dasar uraian di atas diharapkan, dokumen perencanaan strategis BPBD Kabupaten Sidoarjo ini dapat mencakup dan mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2021.

Demikian, agar yang berkepentingan maklum.

Sidoarjo, Juli 2018

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ir. DWIDJO PRAWITO, M.MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651012 199202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI III

DAFTAR TABEL V

DAFTAR GAMBAR / GRAFIK VI

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 TAHAPAN PENANGGULANGAN BENCANA 4

1.3 LANDASAN HUKUM 4

1.4 KEBIJAKAN STRATEGI DAN RENCANA STRATEGIS 7

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN 10

1.5.1. Maksud 10

1.5.2. Tujuan 11

1.6 TINJAUAN FILOSOFIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 11

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN DAN PENYUSUNAN 14

BAB II 16

GAMBARAN PELAYANAN DAN PROFIL ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) 16

2.1. GAMBARAN PELAYANAN 16

2.2. TUGAS DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN SIDOARJO 22

BAB III 68

ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR TUGAS DAN FUNGSI 68

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPBD 68

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 69

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 73

3.4. PROGRAM ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN KETANGGUHAN (APIK) 75

BAB IV 77

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 77

4.1. TUJUAN DAN SASARAN BPBD KABUPATEN SIDOARJO 77

4.2. Daerah / Kecamatan Rawan Bencana di Kabupaten Sidoarjo 84

BAB V 96

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 96

5.1. DESKRIPSI KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN 96
5.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 97
5.3. INDIKATOR KINERJA 110
5.4. PENDANAAN INDIKATIF 110
BAB VI 112
INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULNGAN BENCANA DAERAH (BPBD) YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 112
6.1. KAIDAH INDIKATOR KINERJA 112
6.2. INDIKATOR SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA 114
6.3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN BPBD KAB. SIDOARJO115
BAB VII 119
PENUTUP 119

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo kurun waktu tahun 2012 – 2015 27
Tabel 2. Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Sidoarjo 29
Tabel 3. Jumlah Peralatan Operasional Kebencanaan BPBD Kab. Sidoarjo 30
Tabel 4. Data Pos PMK sampai dengan tahun 2017 30
Tabel 5. Data Inventaris Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran 31
Tabel 6. Skor Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2015 34
Tabel 7. Kondisi Geografi, Demografi dan Jumlah Penduduk 37
Tabel 8. Kondisi Resiko Bencana Kabupaten Sidoarjo 42
Tabel 9. Wilayah kejadian Kebakaran di Kabupaten Sidoarjo 45
Tabel 10. Jumlah penduduk dan luasan per Kecamatan 46
Tabel 11. Waktu Tempuh Berdasarkan Jarak Jangkauan 51
Tabel 12. Luas Wilayah Berdasarkan Kondisi Air (Ha) 52
Tabel 13. Jumlah Kalurahan per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo 56
Tabel 14. Sektor di Kabupaten Sidoarjo 56
Tabel 15. Hasil Perhitungan dan Pengukuran Analisis TOWS 64
Tabel 16. Simulasi Rencana Aksi ; Kebijakan, Strategi dan Program/Kegiatan 67
Tabel 17. Keterkaitan Visi dengan Misi RPJMD 70
Tabel 18. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 1 RPJMD 71
Tabel 19. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 2 RPJMD 72
Tabel 20. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 3 RPJMD 72
Tabel 21. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 4 RPJMD 72
Tabel 22. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 5 RPJMD 73
Tabel 23. Skor Kriteria Penentuan isu-isu Strategis 73
Tabel 24. Nilai Skala Kriteria Atas Isu-isu Strategis 74
Tabel 25. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD 77
Tabel 26. Target Penurunan Indeks Resiko Bencana Nasional 80
Tabel 27. Matriks Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 84
Tabel 28. Resiko Bencana Jawa Timur 85
Tabel 29. Penentuan Bobot Bahaya, Kerentanan dan Kapasitas per Jenis Bahaya 86
Tabel 30. Program Utama (Teknis) dan Program Pendukung beserta Pendanaan 104
Tabel 31. Target Capaian Renstra 116

DAFTAR GAMBAR / GRAFIK

Gambar 1. Tahapan Penanggulangan Bencana 4
Gambar 2. Alur Penyusunan Renstra 10
Gambar 3. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sidoarjo..... 25
Gambar 4. Peta Rawan Bencana Provinsi Jawa Timur 37
Gambar 5. Siklus Kegiatan Penanggulangan Bencana..... 39
Gambar 6. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 40
Gambar 7. Peta Risiko Kebakaran Kabupaten Sidoarjo (Kajian Tahun 2015) 44
Gambar 8. Peta Tingkat Kepadatan Penduduk..... 47
Gambar 9. Peta jangkauan Layanan Pos Pemadam Kebakaran 49
Gambar 10. Peta Ruas jalan..... 51
Gambar 11. Peta Sungai Kabupaten Sidoarjo 53
Gambar 12. Peta Jaringan Pipa PDAM Kabupaten Sidoarjo 53
Gambar 13. Peta Rencana Usulan WMK, Sektor dan Pos 54
Gambar 14. Peta Rencana Jangkauan Usulan WMK, Sektor dan Pos 55
Gambar 15. Diagram Hasil Analisis TOWS (SWOT) 65
Gambar 16. Skema Pilihan Strategi dan Arah Kebijakan 66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Renstra ini dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD sebagai salah satu OPD serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Berkenaan hal di atas, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan tugas pokok dan fungsi sesuai perturan dan ketentuan yang antara lainbahwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo berkewajiban untuk membantu Bupati di dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana sebagai bentukdukunganOPD di dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Rencana strategis OPD secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni; (1) kemana pelayanan OPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang; (2) bagaimana cara mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Dalam konteks ini, sangat penting apabila Renstra OPD sekaligus mengklarifikasi secara eksplisit visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan RPJMD yang ditetapkannya, dan menterjemahkan

secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas OPD serta tolok ukur pencapaiannya. Guna mendapatkan dukungan optimal dalam implementasi, maka di dalam proses penyusunan Renstra perlu dibangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* dan *Forum Multistakeholder*OPD, untuk melaksanakan dan mencapai tujuan Renstra melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

Sebagai sebuah dokumen, bagaimanapun Renstra bukan sebuah dokumen statis, Renstra adalah dokumen dinamis, yang pada suatu saat sangat mungkin direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi di dalam implementasi kegiatan dan organisasi.Dokumen Rencana Strategis (Renstra) memuat perencanaan jangka menengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dimana perencanaan ini untuk mendukung perencanaan daerah dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan optimal. Sebagai dokumen resmi untuk periode tertentu, Rencana Strategi BPBD juga memuat klarifikasi eksplisit atas visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yang kemudian diterjemahkan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas BPBD beserta tolok ukur pencapaiannya.

Berkenaan dengan itu, di dalam Peraturan Pemerintah dan Permendagri juga dinyatakan bahwa, salah satu fungsi penting dari dokumen Rencana Strategi adalah sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja), di sisi lain, dalam penyusunan Rencana Strategi, bagaimanapun tetap harus mempertimbangkan kondisiriil dan kondisi obyektif dari lingkungan strategis dan lingkungan organisasi pelaksana implementasi Renstra.Kondisi obyektif Kabupaten Sidoarjo saat ini, terutama dari aspek geografis dan geologi, menunjukan realitas bahwa, di samping menyimpan kekayaan sumberdaya alam yang melimpah, wilayah Sidoarjo juga menyimpan potensi bencana yang patut untuk diwaspadai setiap saat.

Dalam kaitan ini, sesuai tugas utama BPBD, yakni melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, maka BPBD harus mempunyai pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap kondisi riil

kebencanaan maupun potensi bencana yang menjadi bagian obyektif dari Kabupaten Sidoarjo. Dengan pemahaman yang utuh dan benar terhadap potensi bencana, pengelolaan resiko bencana dapat diantisipasi, dicegah dan atau dikurangi tingkat resikonya. Besar kecilnya resiko suatu bencana sangat tergantung pada tingkat ancaman (*hazard*) kerentanan (f*ulnerability*) dan kemampuan (*Capacity*).

Kerentanan biasanya terlihat pada sejumlah bentuk, misal kerentanan sosial, kerentanan kelembagaan, kerentanan sistem, kerentanan ekonomi, kerentanan lingkungan, dan kerentanan akibat praktik yang tidak berprinsip pada konsepsi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Ketersediaan informasi atas kerentanan pada satu sisi dan ketahanan pada sisi yang lain, menjadi bagian cukup esensial dalam upaya antisipasi dan penanganan bencana yang pada tahun-tahun terakhir frekwensi dan intensitasnya cenderung meningkat, bahkan telah menjelma menjadi sebuah siklus yang frekuensi sering terjadi. Antisipasi terhadap kemungkinan peningkatan resiko bencana, dalam manajemen bencana dilakukan dengan mejalankan siklus manajeman bencana melalui : Tindakan/Langkahpencegahan (prevention); Tindakan mengurangi resiko bencana atau mitigasi (mitigation); Tindakan Kesiapsiagaan (preparedness); Reaksi cepat (response); Pemulihan dan Perbaikan (recovery and reconstruction); dan Pengembangan atau pembangunan kembali (development). Di mana keseluruhan siklus manajemen bencana merupakan kegiatan utama dari tugas pokok dan fungsi BPBD.Di pihak lain, dalam kaitan dengan perilaku dan lingkungan organisasi, maka sebagai sebuah organisasi yang relatif baru, BPBD Kabupaten Sidoarjo juga dihadapkan kepada kondisi lingkungan organisasi itu sendiri. Sehingga, disamping analisis resiko bencana, maka analisis terhadap lingkungan organisasi juga menjadi perhatian di dalam penyusunan Rencana Strateginya dalam upaya untuk melihat di mana keberadaan dan posisi BPBD Kabupaten Sidoarjo dilihat dari lingkungan organisasi.

1.2 TAHAPAN PENANGGULANGAN BENCANA

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa dalam kegiatan penanggulangan bencana terbagi ke dalam tahapan-tahapan kegiatan yang antara tahap satu dengan tahapan yang lain merupakan satu kesatuan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan secara sendiri-sendiri, karena di dalan setiap tahapan akan mengandung tahapan lainnya yang akan saling berpengaruh terhadap kegiatan penanggulangan bencana secara menyeluruh dari tahap awal sampai tahapan di mana penanggulangan bencana dinyatakan selesai. Dalam model skematis, tahapan penanggulangan bencana dan bentuk kegiatan dalam setiap tahapan digamrkan sebagai berikut.

Gambar 1. Tahapan Penanggulangan Bencana

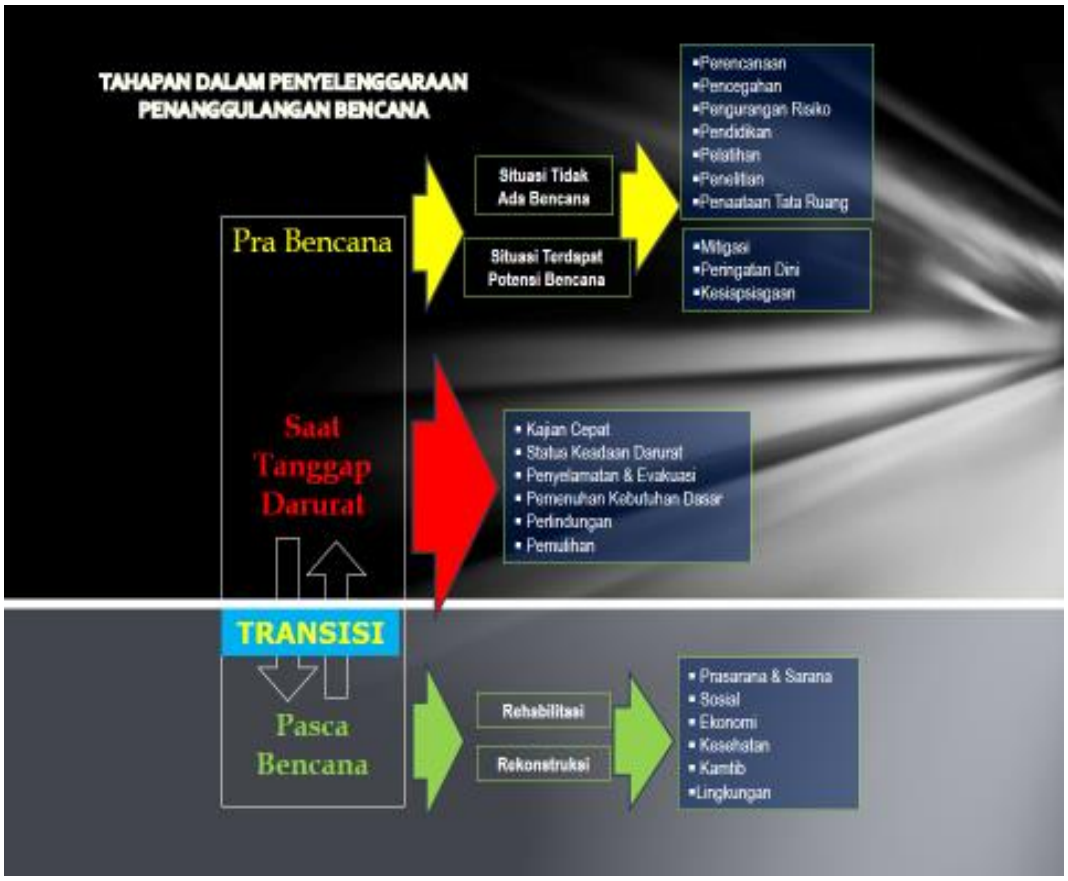

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum utama yang mengatur sistem,mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis (Renstra) OPD dan atau BPBD, khususnya di dalam perencanaan dan penganggaran daerah antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala OPD untuk menyiapkan Renstra OPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra OPD, status hukum Renstra OPD, sebagai pedoman bagi penyusunan Renja OPD. Undang-Undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan RENSTRA OPD.
2. Undang- Undang Nomor17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, walaupun tidak mengatur secara eksplisit tentang Renstra OPD, namun undang-undang ini mengatur peranan dan kedudukan RKPD (yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra OPD) dalam kaitan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja OPD, RKA OPD, dan RAPBD. Di mana di dalam undang-undang iniditekankan kepada penganggaran berbasis prestasi *(performance budgeting*) dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang; akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur peranan dan kedudukan RKPD, Renja OPD, RKA OPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra OPD. Undang-Undang ini menekankan perlunya penyusunan Renja OPD dan RKA OPD berbasis penganggaran kinerja dan Renstra OPDyang dapat menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah ditransformasikan ke dalam rencana tahunan (RKPD).
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pokok-pokokRenstra OPD meliputi tujuan, sasaran, program,dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau UrusanPemerintahanPilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur penyusunan Renstra OPD berpedoman pada RPJMD dan menekankan RPJMD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan

APBD; RKPD, Renja OPD, dan RKA OPD sebagai bentuk penerjemahan RPJMD.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan danPenerapan Standar Pelayanan Minimal, yang menekankan tentang perlunyaRPJMD dan Renstra OPD mencakup target pencapaian StandarPelayanan Minimal (SPM) dalam jangka menengah yang dituangkanke dalam RKPD, RENJA OPD, KUA APBD, visi dan misi Kepala DaerahTerpilih dengan RPJMD dan RKA OPD untuk target pencapaian SPMTahunan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk TeknisPenyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, Sebagai Penjabarandari Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Mekanisme, Proses, dan Prosedur Penyusunan Penganggaran Tahunan Daerah, termasuk di dalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA-OPD,RAPBD, dan APBD.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif
14. Permendagri Nomor 69 tahun 2012 tentang perubahan Permendagri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
15. Peraturan Kepala BNBP Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

16. Peraturan Kepala BNBP Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
17. Peraturan Kepala Nadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2012 Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
18. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang/ Tata Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009 – 2021
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor .. Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2016 – 2021;
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017

1.4 KEBIJAKAN STRATEGI DAN RENCANA STRATEGIS

1) Kebijakan Strategis Penanggulangan Bencana (JakStra PB) 2015 – 2019

Di dalam dokumen Kebijakan Strategis Penanggulangan Bencana (JakStra) Tahun 2015 – 2019 menetapkan bahwa ; **Sasaran Strategis Pembangunan Nasional** adalah menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi. Sedang **Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2015-2019 Bidang Kebencanaan**adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Di mana

Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan Daerah, dilaksanakan melalui:

a) Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
b) Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana;
c) Pemanfaatan kajian dan peta risiko bencana bagi penyusunan RPB dan RAD PRB, yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD;
d) Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRWP/K/K;
e) Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
f) Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.
g) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui: 1) Mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan; 2)Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio, dan televisi; 3) Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat; 4) Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 5) Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana alam; 6) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam; 7) Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.
h) Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui: 1) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan

bencana di Pusat dan daerah; 2) Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana; 3) Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; 4) Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; 5) Pendataan Pengungsi Berbasis tehnologi Android, 6) Melaksanakan simulasi/gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana; 7) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan ada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana; 8) Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada saat situasi darurat dan pascabencana; 9) Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana untuk mendukung gerakan desa hebat; 10) Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pascabencana yang terpencil.

2) Tahap Penyusunan Rencana Strategis OPD

Tahapan penyusunan rancangan rencana strategis (Renstra) sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 digambarkan dalam skema alur penyusunan rancangan Renstra sebagai berikut.

Gambar 2. Alur Penyusunan Renstra

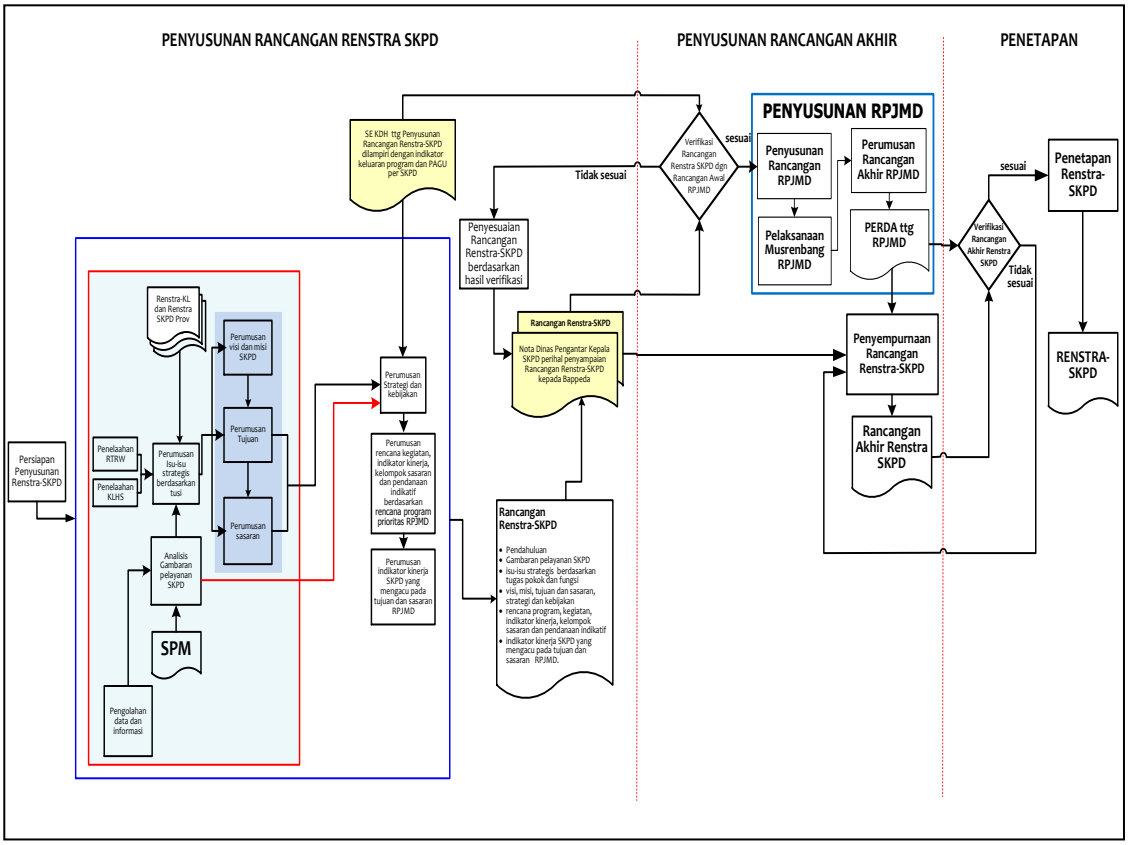

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1. Maksud

Penyusunan dan pembuatan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk digunakan sebagai :

1. Pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan program, kegiatan dan penggunaan anggaran kegiatan sesuai dengan amanah visi dan misi di dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo;
2. Dasar Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- OPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dalam upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

3. Sarana memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pelayanan publik bidang penanggulangan bencana.

1.5.2. Tujuan

Penyusunan dan pembuatan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo, ditujukan untuk dan kepada :

1. Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik bidang penanggulangan bencana berbasis informasi teknologi yang sinergis sehingga menghasilkan penanggulangan bencana yang berkualitas dan berkelanjutan; serta
2. Tercapai dan terciptanya hasil akhir dari programpenanggulangan bencana yang terkoordinasi secara sinergis, cepat dan tepat,dalam upaya untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo.

1.6 TINJAUAN FILOSOFIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Operasionalisasi peraturan dan atau ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya untuk kegiatan Penanggulangan Bencana sebagai bentuk dari pelayanan publikdan implementasi dari tugas pokok dan fungsi OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), disadari atau tidak akan selalu dan terus dituntut untuk berubah ke arah peningkatanstandar pelayanan minimal yang lebih baik dibanding periode sebelumnya. Karena suatu peraturan dan atau ketentuan dikatakan mempunyai landasan filosofis jika rumusan atau norma-normanya mendapat pembenaran filosofis secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa dan atau masyarakat yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa atau masyarakat yang cenderung menuntut peningkatan pelayanan ke arah yang lebih baik. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah

pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Di mana di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lain yang dianggap lebih baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila menurut takaran yang dimiliki bangsa dan atau masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti bahwa setiap perubahan rancangan dan atau ketentuan yang menyangkut Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus dilandasi dengan dasar filosofis yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perubahan keadaan lingkungan kegiatan. Berbicara tentang filsafat dalam mengkaji suatu rancangan peraturan juga harus dipahami melalui aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologi Ketiga aspek tersebut akan mendudukan peraturan tentang SPM berupa keseimbangan yang dimaknai sebagai tujuan hukum secara klasikal sampai postmodernisme yang menempatkan posisi keadilan sebagai mahkotanya. Hal ini sejalan dengan teori etis, bahwa tujuan ketentuan secara yuridis semata-mata untuk merealisikan atau mewujudkan keadilan yang lebih baik. Jadi baik buruknya suatu peraturan diukur dari apakah peraturan itu mendatangkan keadilan atau tidak. Demikian pula dengan peraturan dan atau ketentuan tentang SPM, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut di atas. Jadi, peraturan yang banyak memberikan keadilan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai perundang-undangan yang baik.

Hal ini mengingat, bahwa dalam tataran empiris justru masih terjadi praktik ketimpangan antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan kenyataannya (*das sein*) yang berujung pada ketidakadilan, sebagaimana di-adagium-kan sebagai *summum ius suma iniuria* (keadilan tertinggi justru ketidakadilan yang tertinggi), sehingga tidak cukup hanya keadilan saja yang menjadi tujuan hukum dan atau ketentuan. Dengan demikian, fungsi hukum sangat erat kaitannya dengan fungsi kekuasaan atau wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat, yaitu bahwa hubungan hukum dengan kekuasaan atau wewenang adalah hubungan fungsional. Begitu pula dengan adanya kemungkinan perubahan ketentuan dan atau peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka secara hukum juga harus dapat dimaknai untuk perbaikan pelayanan publik dan pemenuhan tuntutan keadilan pelayanan bagi masyarakat. Atas dasar hal di atas, baik buruknya suatu peraturan akan diukur dari apakah peraturan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak.

Perubahan Standar Pelayanan Minimal (SPM), baik buruknya akan ditentukan oleh ukuran tersebut di atas, karena peraturan dan atau ketentuan yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai ketentuan dan atau peraturan yang baik.Sehingga kemungkinan adanya perubahan dan atau revisi menyangkut pedoman operasional dari setiap jenis pelayanan dasar penanggulangan bencana di daerah,akan disesuaikan dan disusun berdasarkan kepentingan pelayanan publik harus mampu melayani hal-hal sebagai berikut:

1. **Cakupan layanan informasi rawan bencana**, yakni informasi tentang daerah rawan bencana adalah informasi tentang desa yang rawan bencana yang difokuskan kepada masyarakat yang memiliki potensi terpapar bencana (dalam satu jenis bencana). Cakupan yang termasuk titik rawan bencana adalah dalam level desa/kelurahan.Pelayanan informasi tentang daerah rawan bencana dibagi per jenis bencana (alam, non alam dan sosial) yang dirinci: Gempa Bumi, Tsunami, Gerakan Tanah, Gunung Api, Banjir dan Banjir Bandang, Kekeringan, Cuaca Ekstrim Abrasi dan Gelombang Ekstrim, Kebakaran Lahan Hutan (Karlahut), Epidemi dan Wabah, Gagal Teknologi (Galtek), Sosio Kultural/Demografi.

2. **Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan,** yakni cakupan layanan untuk pencegahan bencana dan peningkatan kesiapsiagaan penduduk menghadapi bencana melalui penyediaan Sarpras pengurangan resiko Bencana. Layanan ini lebih memfokuskan ke ancaman dan keterpaparan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 dan pengertian kesiapsiagaan sesuai Pasal 45 UU 24/2007. Pelayanan sarana prasarana pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis bencana (alam, non alam dan sosial) yang dirinci sesuai: Gempa Bumi, Tsunami, Gerakan Tanah, Gunung Api, Banjir dan Banjir Bandang, Kekeringan, Cuaca Ekstrim Abrasi dan Gelombang Ekstrim, Kebakaran Lahan Hutan (Karlahut), Epidemi dan Wabah, Gagal Teknologi (Galtek), Sosio Kultural/Demografi.

3. **Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana,** yakni layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana

untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana, seperti pencarian dan pertolongan pada korban bencana dan pemindahan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat aman dan atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN DAN PENYUSUNAN

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Sidoarjo periode Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Tahapan Penanggulangan Bencana
1.3 Landasan Hukum
1.4 Kebijakan Strategis dan Rencana Strategis
1.5 Maksud dan Tujuan
1.6 Tinjauan Filosofis Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.7 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DAN PROFIL ORGANISASI BPBD

2.1. Gambaran Pelayanan
2.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2.3. Struktur Organisasi
2.4. Potensi Sumber Daya BPBD
2.5. Kinerja Pelayanan BPBD
2.6. Analisis Lingkungan Organisasi dan Pelayanan Publik
2.7. Rencana Aksi ; Kebijakan, Strategi dan Program / Kegiatan

BAB III : ISU STRATEGIS, TUGAS DAN FUNGSIBPBD

3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD
3.2.Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
3.3. Isu Strategis, Analisis Lingkungan dan Resiko Bencana
3.4. Daerah / Kecamatan Rawan Bencana di Kabupaten Sidoarjo

BAB IV : TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD
4.2. Strategi dan Arah Kebijakan BPBD

BAB V : RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan
5.2. Indikator Kinerja
5.3. Pendanaan Indikatif
5.4. Proyeksi Antisipatif

BAB VI : INDIKATOR KINERJA BPBD SESUAI RPJMD
6.1. Kaidah Indikator Kinerja
6.2. Indikator Visi BPBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016–2021
6.3. Indikator Misi

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANANDAN PROFILORGANISASIBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

2.1. GAMBARAN PELAYANAN

Sesuai tugas pokok dan fungsi organsasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah serta peraturan bupati, gambaran umum pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BPBD adalah pelayanan di bidang Penanggulangan Bencana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam implementasi dan pelaksanaan kewenangan otonomi, di mana Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) sebagai pemegang amanah Otonomi, menjadi penanggung jawab utama, dan sesuai undang-undang mempunyai kewajiban antara lain ;(a) *Melindungi masyarakat*...” dan (b) *Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat*....“ Di sisi lain undang-undang-undang juga menyatakan bahwa ; (1) *Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah* (Pasal 22 dan 156; UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah), yang dalam praktek dan implementasinya pelayanan kepada masyarakat/pelayanan publik yang dalam praktek dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi penting bagi lembaga pemerintah disamping masalah distribusi, regulasi, dan proteksi. Fungsi tersebut merupakan aktualisasi nyata dari kontrak sosial yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dalam konteks hubungan *Principal-Agent* pada saat Pemilukada dilaksanakan. Berdasarkan kerangka kerja tersebut, lembaga pemerintah selanjutnya melakukan proses pengaturan alokasi sumberdaya publik dengan cara menyeimbangkan aspek pelaksanaan program dan kegiatan, aspek penerimaan dan pengeluaran untuk memaksimalisasi penyediaan kebutuhan pelayanan kolektif bagi masyarakat sebagaimana amanat undang-undang.

Diskripsi tersebut hampir bertolak belakang dengan praksis pelayanan publik yang dimotori pemerintah, termasuk untuk konteks Kabupaten Sidoarjo saat ini.Sebagai pelaksana kontrak sosial yang digariskan sebelumnya, pemerintah justru menimbulkan banyak masalah bagi publik yang menjadi kliennya.Sangat masuk akal jika pemerintah kemudian mendapat berbagai stigma negatif, jauh dari menjadi bagian dari solusi (*a part of solution*), pemerintah justru menjadi bagian dari masalah (*a part of problem*), bahkan masalah utama, dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik (Weiss, 1995). Isu-isu tentang perlunya mengembangkan kinerja organisasi pemerintah yang kompetitif seiring dengan perubahan trend global telah menjadi agenda penting bagi pemerintahan di banyak negara akhir-akhir ini (Cullen & Cushman, 2000). Akan tetapi, upaya ke arah itu tampaknya masih banyak masalah, terutama menyangkut keberadaan sistem dan lembaga organisasi pemerintah yang belum sepenuhnya mampu mengembangkan sistem yang adaptif terhadap dinamika masyarakat. Dengan kata lain, birokrasi belum mampu mengadopsi nilai-nilai baru yang relevan dari dunia bisnis untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik sesuai kompetensinya.

Layanan publik dengan kualitas prima telah menjadi tuntutan masyarakat dan menjadi kewajiban bagi setiap instansi (OPD) yang memberikan layanan publik untuk meresponnya. Mengingat tingkat kepuasan bersifat individual dan dinamis yang dapat berubah setiap waktu, diperlukan alat ukur untuk mengetahuinya. Tuntutan kepuasan yang dinamis memerlukan antisipasi setiap OPD sehingga mutu layanan yang disediakan selalu disesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah satu isu sangat krusial dalam implementasi dan praktik manajemen, baik dalam manajemen sektor publik maupun sektor privat (Ratminto & Winarsih, 2005). Hal ini terjadi karena di satu sisi tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan dari waktu ke waktu terus meningkat, sementara praktik penyelenggaraan pelayanan belum dapat mengimbangi pesatnya perubahan tuntutan. Implikasinya, kesenjangan antara tuntutan akan kualitas pelayanan yang dikehendaki dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh manajemen acapkali merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari (Haryati, Kompas, 14/9/2005).

Masalah perlunya mengembangkan kinerja organisasi pemerintah yang kompetitif seiring dengan trend global, menjadi agenda penting bagi setiap pemerintahan di banyak negara akhir-akhir ini (Cullen & Cushman, 2000). Akan tetapi, upaya ke arah itu tampaknya masih mengalami banyak masalah serius, terutama menyangkut keberadaan sistem dan lembaga organisasi pemerintah yang belum sepenuhnya mampu mengembangkan sistem adaptif terhadap dinamika masyarakat. Birokrasi belum mampu mengadopsi nilai-nilai baru yang relevan dari dunia bisnis untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo, sebagai OPD pendukung pemerintahan kabupaten sesuai tugas pokok dan fungsi serta undang-undang, memiliki berbagai kegiatan pelayanan publik yang secara terus-menerus dipandang penting oleh masyarakat. Bentuk dari pelayanan publik itu adalah penyelenggaraan sebagian urusan di bidang pelayanan penanggulangan bencana bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Seperti diketahui bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan daerahyang dalam banyak hal, sangat pesat laju transformasinya. Kondisi ini jelas berdampak kepada masyarakatnya, yang secara tidak langsung juga mengalami transformasi kearah masyarakat modern yang kritis terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan layanan publik yang diterimanya.Jenis masyarakat demikian berpeluang besar mengalami perubahan cepat dalam hal kualitas dan kuantitas kebutuhannya, termasuk didalamnya kebutuhan akan pelayanan publik yang diantaranya menyangkut pelayanan penanggulangan bencana. Oleh karena itu tingginya responsibilitas BPBD Kabupaten Sidoarjo terhadap dinamika kebutuhan dan perlindungan bagi masyarakat menjadi sesuatu yang prinsip dan sangat penting dalam upaya menciptakan pelayanan publik berkualitas dan menciptakan kepuasan masyarakat saat ini dan di masa datang. Pada sejumlah diskusi dan seminar yang digelar akademisi dan praktisi di tingkat regional dan nasional, isu pelayanan prima instansi pemeritah sering menjadi tema sentral menarik yang menguatkan gagasan perlunya perubahan paradigma pelayanan publik dan perlunyatransformasi pelayanan publik oleh institusi pemerintah termasuk dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Fenomena tuntutan publik terhadap pelayanan berkualitas, tampaknya telah menjadi arus tidak terbendung. Sehingga dalam kaitan dengan penanggulangan bencana, selain dari Rencana Penanggulangan Bencana, tantangan untuk pelayanan publik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD adalah perlu penyusunan serangkaian rencana terkait lainnya untuk tahap pra-bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana, menjadi rencana pelayananyang lebih komprehensif dalam penanggulangan bencana, yang meliputi pelayanan tentang :

1) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) yang merupakan tindak lanjut dari RPB Kabupaten Sidoarjo
2) Rencana Kedaruratan Penanggulangan Bencana (RKPB)
3) Rencana Kontijensi
4) Rencana Operasional
5) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pemulihan)

Agar tersusun suatu mekanisme pelayanan dalam Penanggulangan Bencana terpadu, maka seluruh rencana tersebut perlu disusun dan dilaksanakan secara holistik dan sinergis, dengan prioritas penanganan kepada masalah lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, yang diarahkan dalam hal sebagai berikut :

- Pengurangan risiko Bencana (Nasional / Daerah)
- Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana (PB)
- Optimalisasi Instrument pengendalian, pemanfaatan ruang dalam Pengurangan Risiko Bencana.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam PB
- Peningkatan Sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusian
- Pemulihan wilayah terdampak.

Yang pada akhirnya dapat dihasilkan rekomendasi dan dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana yang komprehensif dan dapat dijadikan acuan sebelum, saat dan pasca terjadinya bencana di Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan dasar pelayanan dan data yang telah terdokumentasikan di dalam :

a. RTRW (Rencana Tata Ruang/ Wilayah)
b. RDTR (Rencana Daerah Tata Ruang) dan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan)

c. Data Kejadian Bencana
d. Data Area Terdampak/ Korban Bencana
e. Data dan Peta Kemiringan, Jenis Tanah dan Geologi Regional
f. Data dan Peta Rawan Banjir, Sistem Drainase dan Sungai
g. Data dan Peta Demografi
h. Peraturan perundang-undangan tentang penanganan bencana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
i. Standar Teknis dan Administratif yang dapat dimanfaatkan dari peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah.

Berkenaan dengan uraian di atas, dalam pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo mendasarkan kepada ketentuan dan peraturan menyangkut Standar Pelayanan Minimal (SPM), baik yang telah ada dan berlaku dan atau kemungkinan adanya perubahan SPM menyangkut Pedoman operasional SPM penanggulangan bencana, yang bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis bagaimana cara mengoperasionalkan dan mengukur capaian pelayanan dasar penanggulangan bencana yang dilakukan oleh daerah, yang antara lain diklasifikasikan ke dalam pelayanan-pelayanan sebagai berikut.

1. **Cakupan layanan informasi rawan bencana**, yakni informasi tentang daerah rawan bencana, yang merupakan informasi tentang desa rawan bencana yang difokuskan kepada masyarakat yang memiliki potensi terpapar bencana (dalam satu jenis bencana). Cakupan yang termasuk titik rawan bencana adalah dalam level desa/kelurahan. Pelayanan informasi tentang daerah rawan bencana dibagi per jenis bencana (alam, non alam dan sosial), yang secara indikator perhitungan dirumuskan sebagai berikut.
   a. Rumus : *Jumlah Penduduk di Desa/Kelurahan Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai jenis bencana* dibagi dengan *Jumlah Penduduk di Desa/Kelurahan Rawan Bencana sesuai jenis bencana* dikalikan 100 %
   b. Pembilang: Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai jenis bencana,
   c. Penyebut : Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana sesuai jenis bencana
   d. Satuan Indikator Persentase (%)

e. Target : 100 % untuk setiap kejadian dari masing-masing jenis bencana

2. **Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan**, yakni cakupan layanan untuk pencegahan bencana dan peningkatan kesiapsiagaan penduduk menghadapi bencana melalui penyediaan Sarpras pengurangan resiko Bencana. Layanan ini lebih memfokuskan ke ancaman dan keterpaparan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 dan pengertian kesiapsiagaan sesuai Pasal 45 UU 24/2007. Pelayanan sarana prasarana pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis bencana (alam, non alam dan sosial).

   Dengan perhitungan indikator yang dirumuskan sebagai berikut ;

   a. Rumus ; *Jumlah penduduk terpapar di Desa/Kelurahan yang mendapatkan akses sarpras pencegahan dan kesiapsiagaan* dibagi *Jumlah penduduk terpapar di Desa yang rawan bencana tertentu*) x 100%
   b. Pembilang : Jumlah Penduduk terpapar di Desa/Kelurahan yang mendapatkan akses sarpras pra-bencana pencegahan dan kesiapsiagaan.
   c. Penyebut : Jumlah Penduduk terpapar di Desa/Kelurahan yang rawan bencana tertentu.
   d. Satuan Indikator Persentase (%)
   e. Target : 100 % untuk setiap kejadian dari masing-masing jenis bencana

3. **Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**, yakni layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana, seperti pencarian dan pertolongan pada korban bencana dan pemindahan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat aman dan atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut. Dengan perhitungan indikator adalah ;

   a. Rumus : *Jumlah korban yang selamat dan dievakuasi*dibagi *Jumlah korban terdampak bencan*a x 100%, di mana
   b. Pembilang: Jumlah korban yang selamat dan dievakuasi
   c. Penyebut : Jumlah korban terdampak bencana (orang luka2, orang mengungsi, orang menderita)

d. Satuan Indikator:Persentase (%)
e. Target : 100 %

Secara umum, bentuk pelayanan publik yang dimiliki, diberikan dan dikelola BPBD Kabupaten Sidoarjo secara garis besar diuraikan dalam Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut.

2.2. TUGAS DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN SIDOARJO

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 telah diatur dan ditetakpan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo antara lain membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana serta merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana dengan memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berkenaan dengan itu maka, sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2011 Bab II Pasal 2, dinyakan bahwa BPBDmempunyai tugas-tugas antara lain :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Di dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut BPBD juga mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut.

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
   (a) Kepala BPBD Bertugas Memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi penyelenggaraan Kegiatan Penanggulangan Bencana.
   (b) Unsur Pengarah Bertugas Memberikan masukan kebijakan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan Bencana.
   (c) Kepala Pelaksana Bertugas Membantu kepala BPBD dalam menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana
   (d) Sekretaris Bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
   (e) Bidang Pemadam Kebakaran, Bertugas mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan kebakaran, penanganan kebakaran, dan dukungan pencegahan Kebakaran. Bidang Pemadam Kebakaran:
   (f) Bidang Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik bertugas mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra-bencana, serta pengurangan resiko bencana.Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik.
   (g) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana, pengendalian dan pengawasan rehabilitasi, rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik.

Uraian tentang tugas dan fungsi seperti dijelaskan di atas memberikan gambaran bahwa ada lebih dari sekitar 10 (sepuluh) jenis pelayanan publik yang harus dilaksanakan BPBD Kabupaten Sidoarjo sesuai kompetensinya.

2.3. STRUKTUR ORGANISASI BPBD KABUPATEN SIDOARJO

Berdasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan sesuai dengan Bab III Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo, maka organisasinya terdiri dari :

a. Kepala
b. Unsur Pengarah, dan
c. Unsur Pelaksana

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dijabat oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Unsur Pengarah terdiri dari unsur-unsur yang berasal dan mewakili OPD terkait di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dan sebagian lagi berasal dan mewakili masyarakat profesional yang memiliki kompetensi dan ahli di bidang kebencanaan. Sedang Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD, dengan susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

1) Kepala Pelaksana
2) Sekretaris, yang membawahi :
   - Sub Bagian Umum.
   - Sub Bagian Kepegawaian.
- Sub Bagian Keuangan.

3) Bidang Pemadam Kebakaran, yang membawahi :
   - Seksi Sarana Prasarana.
   - Seksi Operasional.
4) Bidang Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik yang membawahi :
   - Seksi Pencegahan.

- Seksi Kedaruratan dan Logistik.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi yang membawahi :

- Seksi Rehabilitasi.
- Seksi Rekonstruksi.

Gambar 3. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sidoarjo

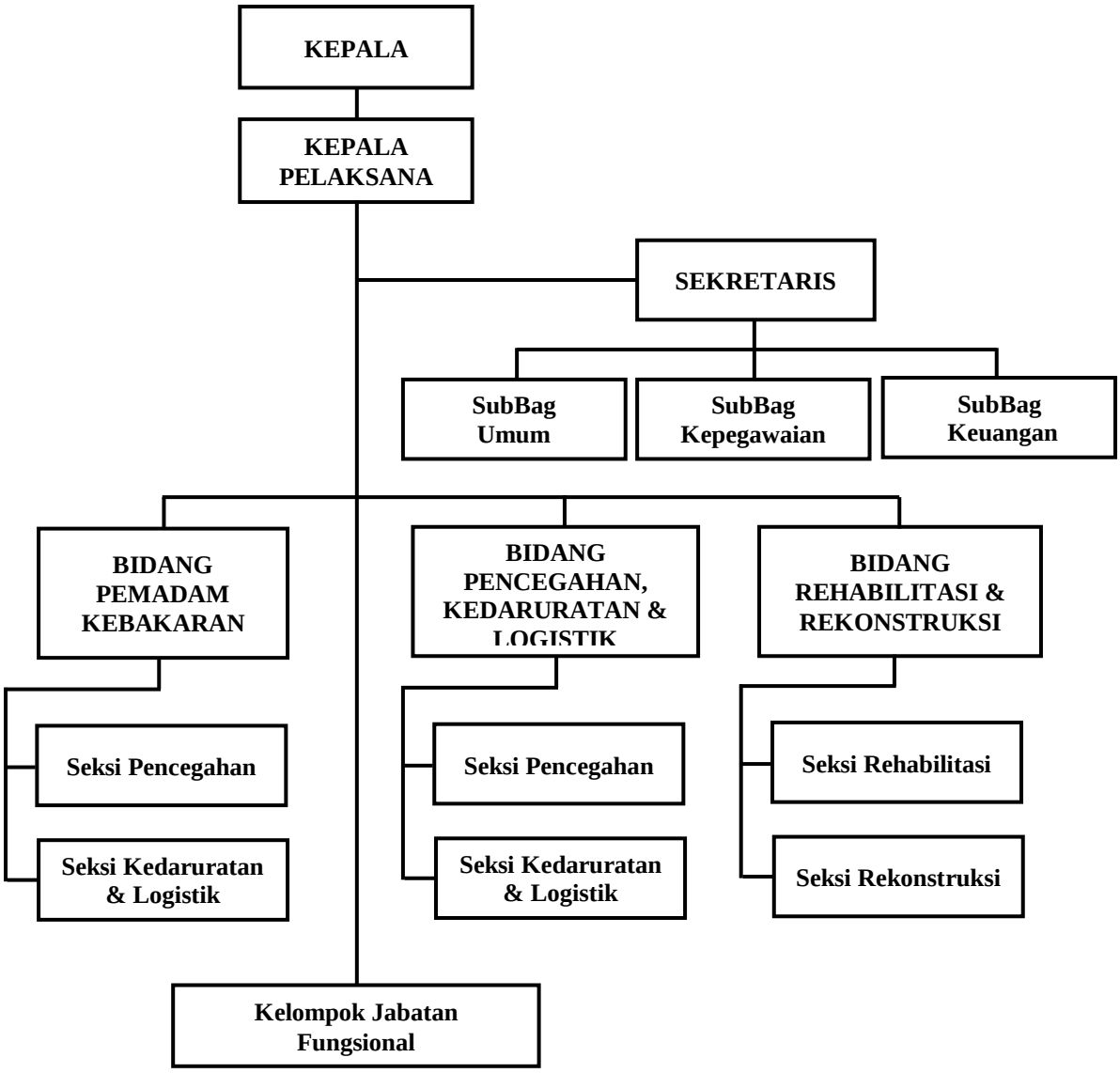

2.4. POTENSI SUMBER DAYA BPBD KABUPATEN SIDOARJO

2.4.1. Anggaran / Pendanaan

Anggaran dan atau pendanaan merupakan hal pokok dan penting bagi sebuah organisasi di dalam upaya melaksanakan dan mengimplementasikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai kompetensinya. Berkenaan dengan hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu 4 (empat) tahun, yakni periode tahun 2012–2015 telah mendapatkan alokasi anggaran/ pendanaan sebesar Rp. 38.038.453.872,00 yang diperuntukan belanja program, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo kurun waktu tahun 2012 – 2015

Uraian Program	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan (dalam ribuan rupiah)	
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	598,544,000	819,934,800	918,851,000	1,095,629,800	491,800,204	791,914,346	860,968,723	986,802,940	82.17%	96.58%	93.70 %	90.07 %	858,239	782,871
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,163,351,000	839,297,200	978,135,000	2,006,700,000	2,048,349,335	780,198,250	831,068,790	1,671,124,241	94.68%	92.96%	84.96 %	83.28 %	1,496,870	1,332,685
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	6,600,000	25,000,000	31,250,000	8,000,000	6,500,000	23,643,750	29,390,000	7,000,000	98.48%	94.58%	94.05 %	87.50 %	17,712	16,633
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	146,125,000	116,855,250	188,076,000	129,100,000	104,285,000	103,825,000	168,431,357	85,685,600	71.37%	88.85%	89.55 %	66.37 %	145,039	115,556
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	62,800,000	5,500,000	4,000,000	90,000,000	54,469,000	2,592,500	3,190,000	51,095,400	86.73%	47.14%	79.75 %	56.77 %	40,575	27,836
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	7,930,715,000	909,244,000	5,737,958,122	9,369,356,000	7,604,574,928	644,336,328	5,260,098,677	8,074,972,296	95.89%	70.87%	91.67 %	86.18 %	5,986,818	5,395,995
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	120,000,000	195,111,375	763,150,000	-	113,026,000	188,769,550	700,489,200		94.19%	96.75%	91.79 %		359,420,458	250,571,188

Program Pencegahan Dini &Penanggulangan Korban Bencana Alam	589,050,000	449,813,625	514,570,000	824,190,700	492,867,300	417,415,900	471,390,450	441,278,180	83.67%	92.80%	91.61 %	53.54 %	594,406,081	455,737,958
Program Pengembangan Data dan Informasi	-	-	-	401,546,000		0		256,953,400				63.99 %		64,238,350
Total	**11,617,185,000**	**3,360,756,250**	**9,135,990,122**	**13,924,522,500**	**10,915,871,767**	**2,952,695,624**	**8,325,027,197**	**11,574,912,057**						

2.4.2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan asset penting yang harus selalu ditingkatkan kualitasnya. Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia merupakan modal yang menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo yang sebagian besar pegawainya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo mencapai 230 orang, yang terdiri dari 82 orang Pegawai Negeri Sipil dan 148 orang Tenaga Harian Lepas (THL), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Sidoarjo

No	STATUS / POSISI	JUMLAH	%
1	**Pegawai negeri sipil (PNS)**	**82 Orang**	**35.65**
1.1	Pejabat Eselon II	1 orang	
1.2	Pejabat Eselon III	4 orang	
1.3	Pejabat Eselon IV	9 orang	
1.4	Staf Fungsional	1 orang	
1.5	Staf Pengadminstrasi/Pengolah Data	67 orang	
2	**Tenaga harian lepas (THL)**	**148 orang**	**64.35**
2.1	▪ Pasukan pemadam kebakaran	111 Orang	
2.2	▪ Cleaning service	6 Orang	
2.3	▪ Penjaga Keamanan Kantor	15 orang	
2.3	▪ Administrasi	11 Orang	
2.4	▪ Pusdalops (Pusat Pengendalian dan Operasional)	5 Orang	
Total Pegawai BPBD		**230 Orang**	**100,00**

Data di atas menunjukkan bahwa sekitar 35,65 % SDM BPBD Kabupaten Sidoarjo berstatus PNS dan sisanya sekitar 64,35 % merupakan Tenaga Harian Lepas (THL). Di mana dari jumlah THL sebesar 148 orang, 75 % adalah tenaga yang menjadi Pasukan Pemadam Kebakaran.

Jumlah SDM BPBD Kabupaten Sidoarjo (PNS dan THL) yang mencapai sekitar 230 orang merupakan jumlah yang relatif besar dan merupakan kekuatan bagi organisasi BPBD yang relatif baru berdiri. Namun dengan melihat status SDM yang melebihi 50 % adalah THL juga memberikan sinyal kerawanan dalam operasionalisasi tugas pokok dan fungsi, karena status THL dimungkinkan setiap saat akan berhenti jika mereka mendapatkan tempat kerja yang menurut mereka lebih menjanjikan.

2.4.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo relatif cukup lengkap dan besar sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah Peralatan Operasional Kebencanaan BPBD Kab. Sidoarjo

NO	NAMA	MODEL	JUMLAH
1	Perahu karet	Dengan mesin	1 unit
2	Perahu karet	Tanpa mesin	2 unit
3	Gergaji mesin	Besar/ kecil	4 unit
4	Pompa air	Besar/ kecil	4 unit
5	Genset	Besar	3 unit
6	Tenda	Peleton	6 unit
7	Tenda	Regu	2 unit
8	Tenda	Pengungsi	3 unit
9	Tenda	Family	12 unit
10	Penjernih air	Portable	1 unit
11	Pelampung	Personal	50 unit
12	Radio komunikasi	HT/ RIG	16 unit
13	Sepatu karet	Water proof	20 unit

Tabel 4. Data Pos PMK sampai dengan tahun 2017

No.	Pos PMK	Keterangan
1.	Unit Buduran	Milik Pemkab Sidoarjo / BPBD
2.	Unit Krian	Milik Pemkab Sidoarjo

3.	Unit Waru	Lahan dan Bangunan milik Pabrik Cat PT. Tunggal Djaja Indah
4.	Unit Porong	Milik Pemkab Sidoarjo
5.	Unit Candi	Lahan dan bangunan milik Pabrik Sepatu PT. Ecco Indonesia

Tabel 5. Data Inventaris Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo

No.	Jenis Kendaraan	Model	Merk	Tahun	Kondisi Barang
1.	Mobil Angkut Peralatan dan Pasukan	Pick Up	Toyota Kijang KF 50	1995	60%
2.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Twin Agent	HINO Super Ranger	1995	40%
3.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Twin Agent	HINO Super Ranger	1995	40%
4.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Twin Agent	IZUSU Elf NKR 66	2003	40%
5.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Supply	HINO Dutro	2006	75%
6.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 210 JL	2006	85%
7.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 235 JL	2007	85%
8.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Supply	HINO FG 235 JJ	2010	90%
9.	Mobil Dinas (Station Wagon)	MPV	Daihatsu Terios	2010	100%
10.	Mobil Dinas (Station Wagon)	MPV	Toyota Rush	2012	100%
11.	Mobil Dinas (Station Wagon)	MPV	Toyota Rush	2012	100%
12.	Mobil Dinas (Station Wagon)	MPV	Toyota Rush	2012	100%
13.	Mobil Pemadam Kebakaran (Drop In Unit)	Twin Agent	IZUSU Panther	2012	100%

No.	Jenis Kendaraan	Model	Merk	Tahun	Kondisi Barang
14.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 235 JJ	2014	100%
15.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 235 JJ	2014	100%
16.	Mobil Angkut Peralatan dan Pasukan	Pick Up	IZUSU TBR 54	2015	30%
17.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	FUSO FM 517 HS	2015	100%
18	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	FUSO FM 517 HS	2015	100%
19.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 8JJ10	2015	100%
20.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 8JJ1D BGJ	2016	100%
21.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 8JJ1D BGJ	2016	100%
22.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 8JJ1D BGJ	2016	100%
23.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO Ramgers 235 PS	2017	100%
24.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender		2018	100%
25.	Mobil Angkutan Pasukan / Peralatan Pemadam Kebakaran	Pick up		2018	100%
26.	Mobil Angkutan Pasukan / Peralatan Kebencanaan	Pick up		2018	100%
27.	Mobil Dinas (Hibah dari BNPB)	MPV	Ford Ranger	2012	100%

2.5. KINERJA PELAYANAN BPBD KABUPATEN SIDOARJO

Sebagai satuan kerja relatif baru di Kabupaten Sidoarjo, BPBD dituntut terus mensosialisasikan keberadaannya, perananan dan fungsi yang diamanatkan, dalam rangka untuk menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran

satuan kerja lain yang terlebih dahulu ada. Kedepan BPBD akan terus berbenah serta memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. BPBD dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk ***tanggap darurat*** bencana, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana (tanggap darurat) dan setelah terjadinya bencana (pascabencana). Apabila diterapkan ke dalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus sistemik kegiatan kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) terkait,sesuai ketentuan tentang tahapan penanggulangan bencana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selanjutnya terkait dengan kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Sidoarjo, pada dasarnya memiliki ragam pelayanan sebagai berikut :

TAHAPAN	KEGIATAN
PRA BENCANA	1. Sosialisasi Penanggulangan Bencana
	2. Sosialisasi Sekolah Aman Bencana
	3. Inisiasi, Koordinasi dan Pelatihan Kelompok Relawan
	3. Koordinasi Penanggulangan Bencana dengan OPD terkait
	4. Pemasangan / Pemantauan Alat Peringantan Dini
	5. Inisiasi Kerjasama dengan Forum CSR Perusahaan di Sidoarjo
TANGGAP DARURAT	1. Pelaksanaan Bantuan Darurat (Non Kebakaran)
	2. Layanan Pemadaman Kebakaran
PASCA BENCANA	1. Pelaksanaan Bantuan Rehab / Rekon Non Kebakaran
	2. Pelaksanaan Bantuan Rehab / Rekon Kebakaran

Berdasarkan serangkaian tahapan survei yang telah dilakukan berdasarkan rekapitulasi data serta analisis Permenpan 16/2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap pelayanan yang dilakukan di 3 tahapan dan 10 kegiatan pelayanan yang ada di

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tersebut diatas, maka untuk 3 tahapan dan 10 kegiatan pelayanan tersebut memperoleh nilai SKM dengan kategori baik. Hal ini dapat dinterpretasikan **bahwa sebagian besar (3,15) pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo sudah baik**, sebagaimana dapat dilihat rincian perolehan skornya pada tabel di halaman berikut :

Tabel 6. Skor Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2015

SKM,MutuPelayanan,danKinerjaPelayananTiapUnitPelayanan

NO	INDIKATOR	MEAN SCORE
1	Persyaratan	3.09
2	Prosedur Pelayanan	3.08
3	Waktu Pelayanan	3.19
4	Biaya/Tarif Pelayanan	-
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.17
6	Kompetensi Petugas	3.23
7	Perilaku Petugas	3.28
8	Maklumat Pelayanan	3.18
9	Layanan Pengaduan	3.00
	AVERAGE MEAN SCORE	**3.15**

Sumber : SKM BPBD Kab. Sidoarjo, 2015

Dari tabel diats bisa dihelaskan bahwa Rata-rata SKM dari Semua Indikator Pelayanan adalah 3,15, sedangkan perhitungan Nilai Interval SKM sesuai dengan Permenpan 16/2014 adalah sebesar (3,15 x 25)yaitu 78,75 yang termasuk dalam kategori / nilai B dalam Mutu Pelayanan dengan Kinerja Pelayanan yang Baik

2.5.1. Kondisi Geografi dan Demograsi

Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5’ dan 112 9’ Bujur Timur dan antara 7 3’ dan 7 5’ Lintang Selatan. Batas sebelah utara adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan, sebelah timur adalah Selat Madura dan sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto.

Kondisi Topografi Kabupaten Sidoarjo adalah dataran Delta dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 25 meter.Untuk yang memiliki ketinggian 0–3meter luasnya sekitar 19.006 Hektar meliputi 29,99% daerah Pertambakan yang berada

di wilayah bagian timur. Wilayah Bagian Tengah yang berair tawar memiliki ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan, meliputi 40,81 %. Sedang wilayah Bagian Barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah pertanian, dengan luas mencapai 29,20% dari luas wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dari sisi Hidrogeologi Kabupaten Sidoarjo merupakan daerahdengan air tanah, payau, dan air asin yang mencapai luas 16.312.69 Hektar dengan kedalaman air tanah rata-rata antara 0-5 meter dari permukaan tanah. Sedang kondisi HidrologiKabupaten Sidoarjo terletak diantara dua aliran sungai Kali Surabaya dan Kali Porong yang merupakan cabang Kali Brantas dengan hulu sungai berada di kabupaten Malang.

Untuk masalah Klimatologi Kabupaten Sidoarjo beriklim Tropis dengan dua musim, yakni musim kemarau pada bulan Juni sampai bulan Oktober dan musim hujan pada bulan Nopember sampai bulan Mei. Sedang struktur tanahnya adalah ; Alluvial kelabu seluas 6.236,37 Hektar, Assosiasi Alluvial kelabu dan Alluvial Coklat seluas 4.970,23 Hektar, Alluvial Hidromart seluas 29.346,95 Hektar dan Gromosal kelabu Tua Seluas 870,70 Hektar. Sedang jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo untuk data sampai dengan 31 Agustus 2015 adalah sebesar2.146.313 jiwa, terdiri dari Laki - laki : 1.082.557 jiwa atau sekitar 50,44 % dan Perempuan : 1.063.756 jiwa, atau sekitar 49,56 %. Dari segi pembagian wilayah, Kabupaten Sidoarjo terdiri 18 kecamatan yakni ; Kecamatan Sidoarjo, Balongbendo. Buduran, Candi, Gedangan, Jabon, Krembung, Krian, Prambon, Porong, Sedati, Sukodono, Taman, Tanggulangin, Tarik, Tulangan, Waru, dan Kecamatan Wonoayu

2.5.2. Potensi Kebencanaan

Dengan melihat kondisi geografi dan demografi serta luas wilayah dan karakter kependudukan serta lingkungan memberi indikasi bahwa kondisi lingkungan dan masalah kebencanaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo perlu mendapatkan perhatian terutama setelah munculnya semburan lumpur beberapa tahun lalu.

Dengan gambaran kondisi Kabupaten Sidoarjo saat ini maka antisipasi dan upaya untuk memahami dan mengurangi resiko perlu terus diupayakan agar tidak muncul bencana yang tidak diharapkan. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian

peristiwa yangmengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakatyang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupunfaktor manusia, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.Secara umum karakter kebencanaan di Provinsi Jawa Timur, di mana Kabupaten Sidoarjo berada di tengah-tengah provinsi, didominasi oleh kejadian yang berasal dari fenomena klimatologis yaitu banjir, kekeringan dan angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan. Kemudian disusul oleh karakter geologis yaitu gerakan tanah atau longsor, letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Selanjutnya konflik sosial, teror dan kecelakaan industri . Sedangkan dari dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, kawasan rawan bencana di wilayah Provinsi Jawa Timur dikelompokkan ke dalam kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang, kawasan rawan bencana angin kencang, kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan kawasan rawan bencana geologi. Sehingga dengan memahami pengertian bencana dan karakteristik kebencanaan tersebut di atas.

Sehingga dengan melihat hasil identifikasi kebencanaan di ProvinsiJawa Timur pada umumnya dan di Kabupaten Sidoarjo khususnya, diketahui beberapa data kerawanan bencana sebagai berikut.

Gambar 4. Peta Rawan Bencana Provinsi Jawa Timur

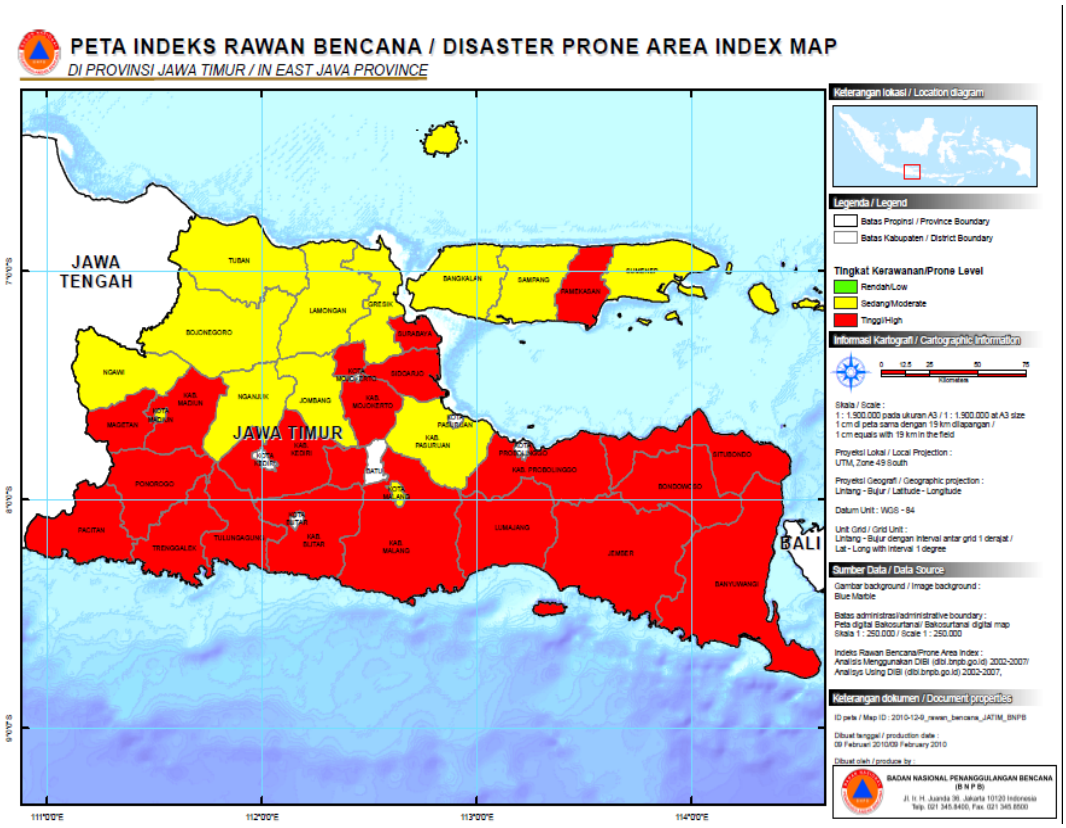

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peta di atas menunjukkan gambaran sebaran kondisi kerentanan terhadapresiko bencana, di mana hampir sebagian besar wilayah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Timur, tidak bebas dari kerawanan dan ada dalam kondisi menghadapi resiko.

Mengingat keadaan dan potensi geografi yang ada Kabupaten Sidoarjo, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, kondisi Geografi, Demografi dan Sumber Dana, terlihat seperti data pada tabel berikut.

Tabel 7. Kondisi Geografi, Demografi dan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo**

No.	Kecamatan	Geografi		Jumlah Desa	Jumlah Penduduk***
		Tinggi*	Luas		
1.	Sidoarjo	4	62.56	24	194.051
2.	Buduran	4	41.03	15	92.334

3.	Candi	4	40.67	24	145.146
4.	Porong	4	29.82	20	65.909
5.	Krembung	5	29.55	19	58.358
6.	Tulangan	7	31.21	22	87.422
7.	Tanggulangin	4	32.29	19	84.580
8.	Jabon	2	81.00	15	49.989
9.	Krian	12	32.50	22	118.685
10.	Balongbendo	20	31.40	20	66.865
11.	Wonoayu	4	33.92	23	72.009
12.	Tarik	16	36.06	20	60.977
13.	Prambon	10	34.23	20	68.336
14.	Taman	9	31.54	24	212.857
15.	Waru	5	30.32	17	231.298
16.	Gedangan	4	24.06	15	132.847
17.	Sedati	4	79.43	15	92.468
18.	Sukodono	7	32.68	19	111.121
	Jumlah		602.14	353	1.945.252

Keterangan :
* Tinggi rata dari permukaan laut
** Sumber : BPS Sidoarjo , 2014
*** Berdasarkan data sensus penduduk BPS tahun 2010

2.6. PELUANG DAN MASALAH PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.6.1. Prioritas Pelayanan dan Analisis Risiko Bencana

1) Prioritas Pelayanan

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo memiliki prioritas pelayanan kepada masyarakat sejalan dan searah dengan Visi Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta pelayanan di bidang penanggulangan bencana seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Seperti diketahui bahwa pelayanan dalam hal penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan siklus manajemen bencana yang terdiri dari pelayanan pada tahapan Pra Bencana, Saat Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana, seperti digambarkan dalam siklus penanggulangan bencana sebagai berikut.

Gambar 5. Siklus Kegiatan Penanggulangan Bencana

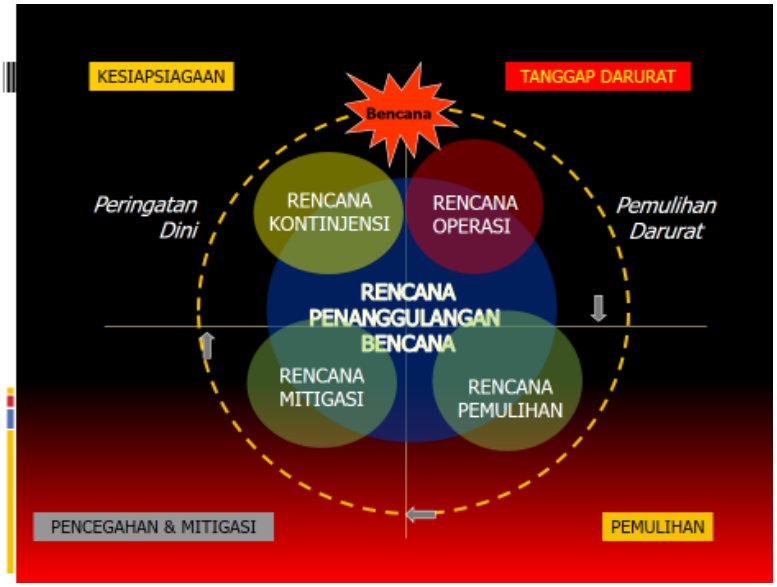

Dari gambar siklus kegiatan penanggulangan bencana di atas terlihat bahwa Peluang dan Masalah dalam pelayanan akan sangat bervariasi dalam setiap tahap kegiatan pelayanan yang diberikan BPBD Kabupaten Sidoarjo.

Gambaran tersebut juga mensiratkan bahwa pelayanan BPBD di masa depan cenderung akan semakin komplek tantangannya. Oleh karena itu, sesuai dengan kompetensi pelayanan yang diberikan, BPBD dituntut dapat melakukan analisis terhadap kemungkinan resiko bencana yang akan terjadi serta memiliki peta prioritas pelayanan sesuai hasil analisis resiko bencana.

2) Prioritas Penanggulangan Bencana Kerangka Sendai, 2015 - 2030

Setiap kegiatan penanggulangan bencana sampai akhir tahun 2014didasarkan pada *Hyogo Framework for Action* (HFA) 2005-2015, yakni *Building the resilience of nations and communities to disasters,* dengan 5 (lima) prioritas ; 1) *Governance: ensure that disaster risk reduction is a national and local priority with strong institutional basis for implementation*, 2) *Risk identification: identify, assess and monitor disaster risks and enhance early warning,* 3) *Knowledge: use knowledge, innovation and education to build a culture of safety and resilience at all levels,* 4) *Reducing the underlying risk factors in various sectors (environment, health, construction, etc.),* 5)

Strengthen disaster preparedness for effective response- key role of Civil Protection and Disaster Management Organizations. Namun sejak awal tahun 2015, dasar dari setiap kegiatan penanggulangan bencana di manapun di dunia, khususnya bagi negara yang meratifikasi Kerangka Hyogo, haruslah memdasarkan kepada kerangka Sendai, hasil dari konferensi dunia menyangkut *Disaster Risk Reductions* (The 3rd WCDRR) yang diselenggarakan padatanggal 14 - 15 mar 2015 di Sendai, Jepang, dengan menetapakan 4 (empat) prioritas kegiatan sebagai berikut.

Gambar 6. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030

Ke empat pioritas tersebut dapat dijelaskan sebagai ; 1) Memahami risiko bencana; 2) Penguatan tata kelola pemerintahan untuk mengelola risiko bencana; 3) Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan komunitas; dan 5) Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif, dan untuk "membangun dengan lebih baik" (build back better) dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

3) Analisis Resiko Bencana dan Kebakaran

Secara umum hasil identifikasi data di atas, memberipetunjuk bagaimana tingkat kerentanan suatu wilayah di Kabupaten Sidoarjo terhadap resikobencana, baik karena faktor alam, non-alam, ekonomi, sosial

maupunperilaku manusianya. Hal ini dapat dilihat dari analisis perbandinganantara; Luas Geografi, Jumlah Wilayah, Jumlah Penduduk dan potensiSumber Dana (PAD) yang dihasilkan. Dimana semakin luas dan banyakjumlah wilayah, akan memerlukan sarana prasarana banyak, dan besarnyajumlah penduduk memerlukan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan.Kondisi ini secara tidaklangsung merupakan potensi resiko bencana, baik alam, non-alam,ekonomi dan sosial, akibat ketidakmampuan daerah membiayai kebutuhandasar daerahnya.

Gambaran potensi ekonomi, sosial dan kebencanaan di atas,merupakan kondisi yang akan dihadapi dan menjadi tantangan di dalampelayanan publik BPBD Kabupaten Sidoarjo, yang secara psikologis akanmemunculkan masalah tersendiri bagi BPBD Kabupaten Sidoarjo, jika didalam setiap program dan kegiatan tidak diantisipasi dengan baik.Di sisi lain, penanganan bencana yang bersifat masiv dan tidak dapat di prediksi membutuhkan sumber daya yang besar, baik teknologi, sarana prasarana, Sumberdaya manusia maupun pendanaan, yang merupakan tingkat kemampuan dan atau kapasitas yang dimiliki oleh suatu daerah.

Dalam hal ini, analisis resiko bencana dapat dilakukan dengan melihat faktor-faktor berpengaruh dari setiap potensi bencana yang ada di suatu wilayah, yang di dalam upaya untuk mengetahui peta resiko bencana analisisnya diformulasikan dalam model sebagaiberikut.

Hubungan antara ancaman, kerentanan dan kemampuan dapat digambarkan sebagai berikut

$$\frac{\text{Ancaman X Kerentanan}}{\text{Kemampuan}} = \text{RISIKO BENCANA}$$

Dengan formulasi model di atas dapat diketahui seberapa besar resiko bencana yang dihadapi oleh suatu wilayah dan atau daerah.

Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi rawan bencana dan resiko bencana dari setiap jenis bencana yang ada, diketahui tingkat kerawanan bencananya sebagai berikut.

Tabel 8. Kondisi Resiko Bencana Kabupaten Sidoarjo

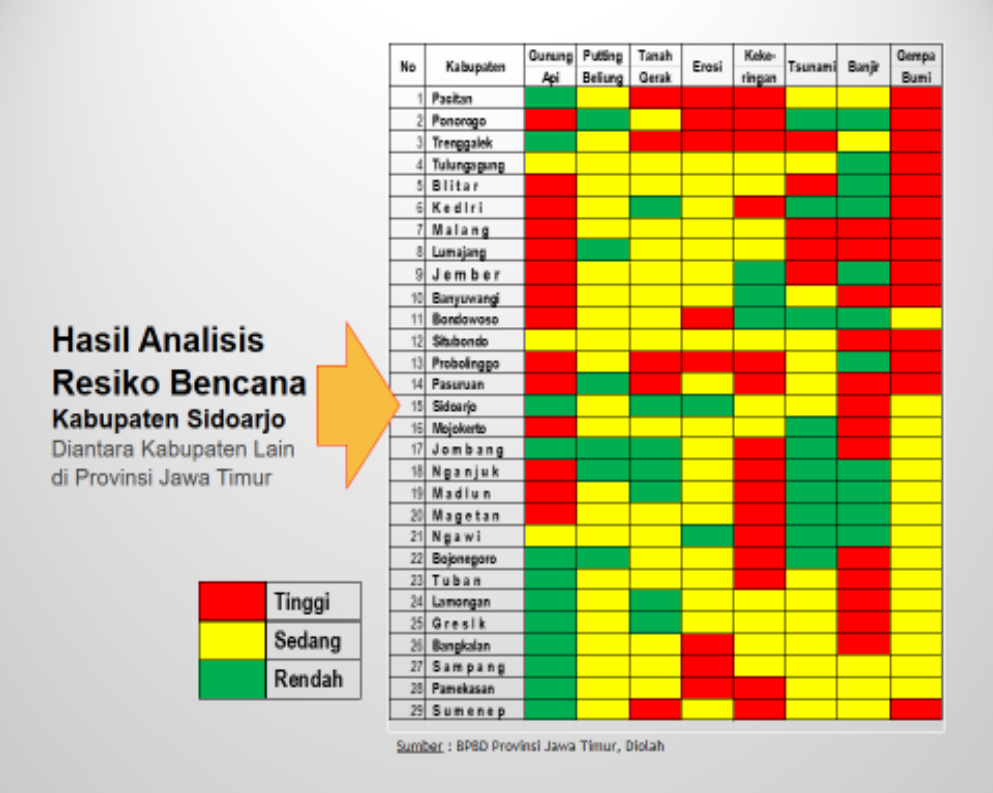

No	Kabupaten	Gunung Api	Putting Beliung	Tanah Gerak	Erosi	Keke-ringan	Tsunami	Banjir	Gempa Bumi
1	Pacitan	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
2	Ponorogo	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi
3	Trenggalek	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
4	Tulungagung	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi
5	Blitar	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
6	Kediri	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi
7	Malang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
8	Lumajang	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
9	Jember	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
10	Banyuwangi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi
11	Bondowoso	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang
12	Situbondo	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
13	Probolinggo	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi
14	Pasuruan	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi
15	Sidoarjo	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
16	Mojokerto	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang
17	Jombang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang
18	Nganjuk	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang
19	Madiun	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang
20	Magetan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang
21	Ngawi	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang
22	Bojonegoro	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang
23	Tuban	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang
24	Lamongan	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
25	Gresik	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
26	Bangkalan	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
27	Sampang	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
28	Pamekasan	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
29	Sumenep	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi

Data di atas menunjukkan bahwa resiko bencana, khususnya untuk 8 (delapan) jenis bencana alam,tingkat Resiko Tinggi (Merah) di Kabupaten Sidoarjo adapada ancaman bencana Banjir, sedang untuk ancaman bencana lainnya yang berada pada tingkat Sedang (Kuning) adalah ; Puting beliung, Kekeringan, Tsunami dan Gempa Bumi, dan untuk ancaman bencana pada tingkat resiko Rendah (Hijau) ada di bencana ; Gunung Api, Tanah gerak dan Erosi.

Di pihak lain, dengan kepadatan penduduk dan banyaknya kawasan industri di Kabupaten Sidoarjo, diduga masalah kebakaran dan kegagalan tehnologi juga berpotensi menimbulkan resiko.

Berkenaan dengan hal di atas maka, metode optimasi lokasi pemadam kebakaran dilakukan untuk mendapatkan lokasi lokasi pos pemadam kebakaran yang tepat sehingga menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalammelakukan penanganan kejadian kebakaran. Diharapkan metode ini dapat meminimalkan dampak atau kerugian yang ditimbulkan baik korban jiwa, harta benda, kerusakan infrastruktur publik, dan bangunan fisik lainnya. Untuk mengkaji model tersebut, Kabupaten Soidoarjo, sebagai kabupaten yang sedang berkembang dalam bidang pembangunan namun memiliki berbagai masalah terkait dengan bencana seperti kebakaran. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi jangkauan pelayanan pos pemadam kebakaran dan memberikan arahan rekomendasi lokasi pos pemadam kebakaran yang baru bagi wilayah yang belum terjangkau oleh pos pemadam kebakaran yang sudah ada. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi risiko kebakaran
2. Mengidentifikasi jangkauan pelayanan pos pemadam kebakaran eksisting
3. Mengidentifikasi tingkat aksesibilitas jaringan jalan.
4. Mengidentifikasi sumber air.
5. Memberikan arahan rekomendasi lokasi pos pemadam kebakaran yang baru

1) Identifikasi Resiko Bencana Kebakaran

Berdasarkan analisis risiko kebakaran yang dilakukan sebelumnya diketahui bahwa risiko kebakaran di kabupaten sidoarjo adalah sebagai berikut:

Gambar 7. Peta Risiko Kebakaran Kabupaten Sidoarjo (Kajian Tahun 2015)

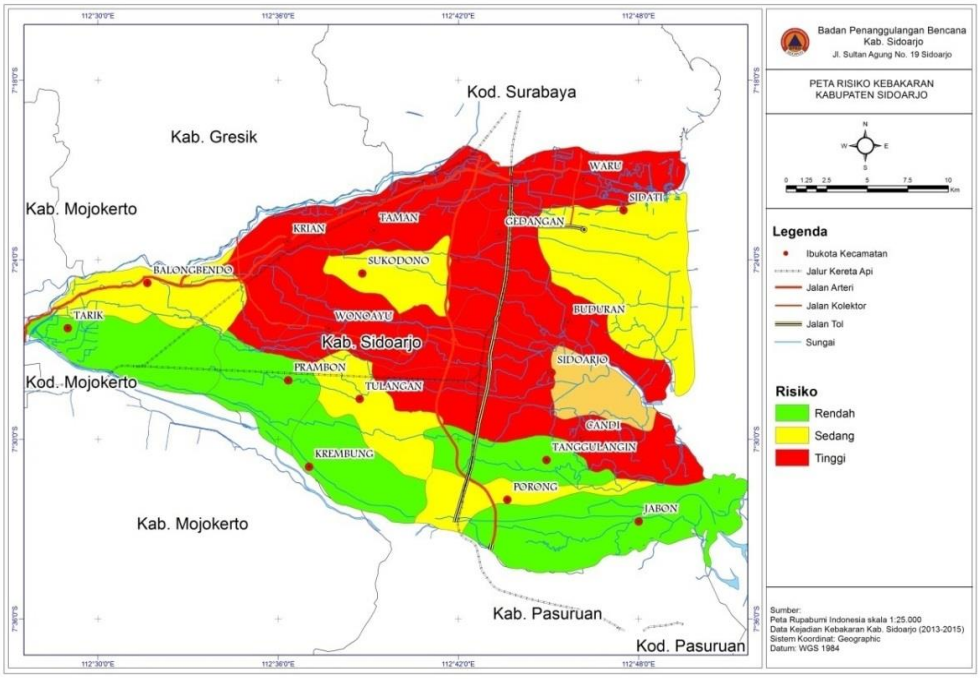

Dari peta risiko kebakaran dapat di jelaskan bahwa kawasan/ wilayah yang berisiko tinggi terhadap bahaya kebakaran adalah di kawasan yang padat pemukiman, kawasan industri dan pertokoan. Wilayah wilayah yang mempunyai catatan pernah mengalami kebakaran adalah pada tabel sebagai berikut.

Tabel 9. Wilayah kejadian Kebakaran di Kabupaten Sidoarjo

DAFTAR : DATA LAPORAN PENANGANAN KEBAKARAN
SELAMA BULAN Pebruari 2015

Hal : 1

NO	HARI /TGL / JAM KEJADIAN	NAMA DAN ALAMAT KEBAKARAN JL. KEL./DS. RT/RW. KEC. KAB./KOTA	JUMLAH KEBAKARAN PER WILAYAH	BENDA POKOK YANG TERBAKAR						KORBAN		LUAS AREAL KEBAKARAN / M2				PENYEBAB KEBAKARAN					PENGERAHAN MOBIL PMK / UNIT	TAFSIRAN KERUGIAN (Rp)	KETERANGAN YANG TERBAKAR
				IDST	PRKTR	UDJ	KB	RMH	LS	LK	MT	Luas Areal	Luas Bang.	Luas Terbakar	Tersela-matkan	BBM	KPR/LPG	LST	RK	L.L			
1	2	3	4	5								6				7					8	9	10
1	Senin/02-02-15 Pukul. 12.30 WIB	PG. Watoe Toelis Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo	1	1	-	-	-	-	-	-	-	100,000	60,000	500	99,500	-	-	-	-	1	4	350,000,000.00	Ampas Tebu
2	Kamis/12-02-15 Pukul. 07.50	Gudang Kosong Jl. Imam Bonjol, No. 38, RT 07 RW 02 Kec. Taman, Kab. Sidoarjo	1	-	-	1	-	-	-	-	-	250	250	100	150	-	-	-	-	1	4	500,000,000.00	Gudang Kosong
3	Jumat/13-02-15 Pukul. 15.00 WIB	Rumah Warga Ds. Damarsih, RT 11 RW 02 Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo	1	-	-	-	-	1	-	-	-	115	115	20	95	-	-	1	-	-	2	75,000,000.00	Dapur Beserta Isinya
4	Sabtu/14-02-15 Pukul. 08.30 WIB	PT. Aneka Kabel Ds. Banjar Kemantren Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3,600	3,600	1,800	1,800	-	-	-	-	1	4	Belum Diketahui	Sterofoam
5	Senin/16-02-15 Pukul. 05.00 WIB	Truk Tangki Air (L 2254 WJ) Ds. Bligo, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo	1	-	-	-	1	-	-	-	-	16	-	4	12	-	-	1	-	-	1	Belum Bisa ditafsir	Kepala Truk
6	Kamis/19-06-15 Pukul. 12.30 WIB	Rumah Warga Ds. Siwalan Panji, RT 25 RW 01 Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo	1	-	-	-	-	1	-	-	-	160	160	80	80	-	-	1	-	-	1	70,000,000.00	Kamar Tidur, Dapur, Dan Peralatan Rumah Tangga
7	Minggu/22-02-15 Pukul. 20.40 WIB	Rumah Warga Ds. Karang Tanjung, RT 10 RW 03 Kec. Candi, Kab. Sidoarjo	1	-	-	-	-	1	-	-	-	140	140	35	105	-	-	-	-	1	1	Belum bisa Ditafsir	Mesin Oven Pengering Daun Herbal
8	Senin/23-02-15 Pukul. 12.10 WIB	Panel Listrik Ds. Ngingas Timur, No. 127 Kec. Krian, Kab. Sidoarjo	1	-	1	-	-	-	-	-	-	9	-	1	8	-	-	1	-	-	2	Belum Bisa ditafsir	Panel Listrik
9	Rabu/25-02-15 Pukul. 12.30 WIB.	PT. ROMI VIOLETA Jl. Kesatrian, No 06 Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	25	99,975	-	-	-	-	1	3	15,000,000.00	Serbuk Kayu
		Jumlah	9	3	1	1	1	3	0	0	0	104,290	164,265	2,565	201,725	0	0	4	0	5	22	1,010,000,000.00	

Sidoarjo, Maret 2015

KEPALA BIDANG
PEMADAM KEBAKARAN

ANWAR, SE. MM
Pembina
NIP.19621006 199203 1 005

Keterangan :

IDST	: INDUSTRI	BBM	: MINYAK TANAH, LILIN dst
PRKTR	: PERKANTORAN	KPR/LPG	: KOMPOR
UDJ	: USAHA DAGANG DAN JASA	LST	: LISTRIK
LK/MT	: LUKA / MATI	RK	: ROKOK
KB	: KENDARAAN BERMOTOR	LL	: LAIN-LAIN
RMH	: RUMAH		
LS	: LAHAN, SAWAH		

Dari table di atas dapat di simpulkan bahwa kejadian kebakaran yang paling sering terjadi adalah tempat tempat yang mempunyai nilai koefisien tinggi terhadap potensi risiko kebakaran. Selain dari table kejadian kebakaran, factor lain yang mempengaruhi tingkat risiko kebakaran juga dari tingkat kepadatan penduduknya.

Berdasar hasil survey data baik data primer maupun sekunder, menyatakan bahwa luas Kabupaten Sidoarjo adalah 71.427,00 Ha hektar, dengan karakteristik topografinya terbagi atas tiga kelas, yaitu :

1. 0-3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin/payau berada di belahan timur seluas 27.011,25 Ha atau 37,82%
2. 3-10 meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan protokol yang berair tawar seluas 25,889 Ha atau 36,24%

3. 10-25 meter terletak di daerah bagian barat seluas 18.524 Ha atau 25,95%

Jumlah penduduk berdasarkan laporan perkembangan penduduk bulan Desember tahun 2013 sebesar 2.090.619 jiwamengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2.053.467 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Waru yaitu 227.177 jiwa, sekaligus mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yaitu 7,963 jiwa/Km2. Sedangkan Kecamatan Jabon memiliki penduduk paling sedikit yaitu 58.818 jiwa dan sekaligus menjadi kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu 941 jiwa/Km2.

Tabel 10. Jumlah penduduk dan luasan per Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Kepadatan Penduduk			Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga
		Km²	Desa/ Kelurahan	Rumah Tangga/ Orang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Sidoarjo	62.56	3.364,88	8.771,13	3.41	210.507	61.804
02. Buduran	41.03	2.392,86	6.545,27	3.43	96.179	28.644
03. Candi	40.67	3.638,92	6.166,46	3.42	147.995	43.265
04. Porong	29.82	2.997,82	4.705,00	3.26	89.395	27.416
05. Krembung	29.55	2.386,06	3.710,95	3.06	70.508	23.077
06. Tulangan	31.21	3.018,78	4.282,55	3.18	94.216	29.597
07. Tanggulangin	32.29	3.303,84	5.614,79	3.30	106.681	32.292
08. Jabon	81.06	725,61	3.921,20	3.14	58.818	18.735
09. Krian	32.51	3.852,08	5.692,32	3.34	125.231	37.476
10. Balongbendo	31.41	2.374,59	3.729,30	3.14	74.586	23.740
11. Wonoayu	33.92	2.418,57	3.566,87	3.19	82.038	25.741
12. Tarik	36.06	1.878,20	3.386,40	3.11	67.728	21.812
13. Prambon	34.23	2.318,84	3.968,70	3.09	79.374	25.657
14. Taman	31.54	6.923,56	9.098,71	3.35	218.369	65.106
15. Waru	30.32	7.492,65	13.363,35	3.46	227.177	65.602
16. Gedangan	24.06	5.217,79	8.369,33	3.36	125.540	37.311
17. Sedati	79.43	1.243,91	6.175,25	3.47	98.804	28.505
18. Sukodono	32.68	3.594,65	6.182,79	3.35	117.473	35.042

Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Kepadatan Penduduk			Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga
		Km²	Desa/ Kelurahan	Rumah Tangga/ Orang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah / Total	714.37	3.364,88	5.928,10	3.32	2.090.619	630.822

Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2013 (BPS Kabupaten Sidoarjo)

Gambar 8. Peta Tingkat Kepadatan Penduduk

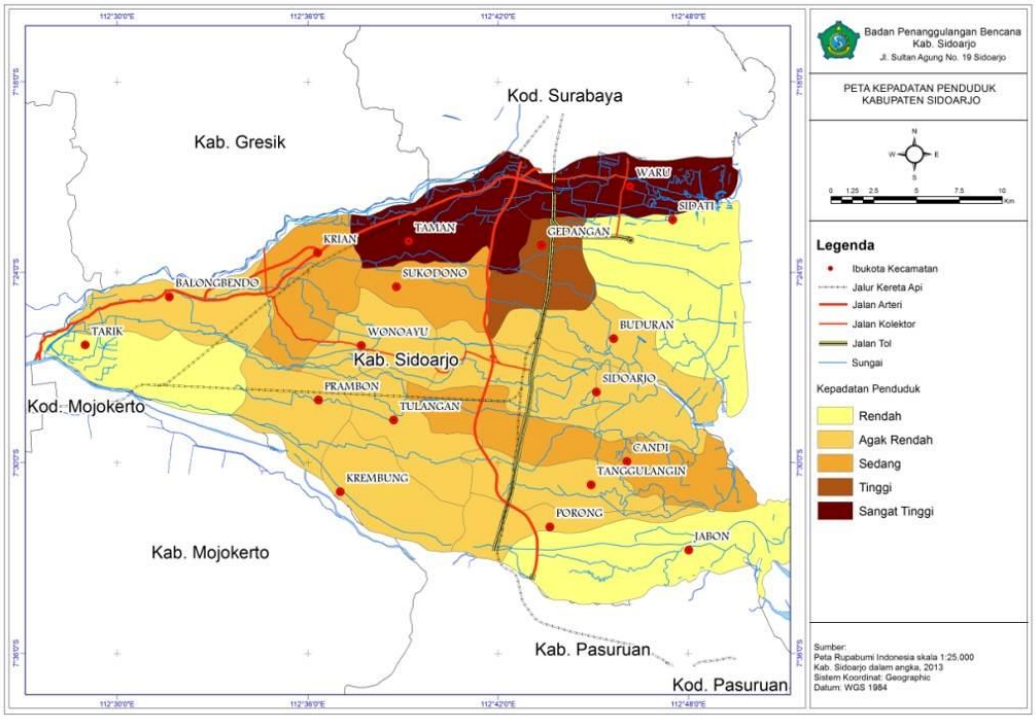

2) Identifikasi Jangkauan Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran Eksisting

Dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran perkotaan setiap kota wajib memiliki pos pemadam kebakaran agar terlindungi dari resiko bencana kebakaran perkotaan. Lokasi Pos pemadam kebakaran dapat mempengaruhi skala pelayanan terhadap cepat tanggap petugas pemadam kebakaran untuk menuju lokasi terjadinya bencana kebakaran. semakin jauh lokasi pos pemadam kebakaran maka semakin besar pula jarak yang harus ditempuh petugas pemadam kebakaran. Wilayah manajemen kebakaran ditentukan pula oleh waktu tanggap dari pos pemadam kebakaran yang terdekat. Apabila

pemberitahuan kebakaran mengalami perubahan dan pos-pos pemadam kebakaran harus memberikan respon terhadap pemberitahuan tersebut dikaitkan dengan jarak atau aksesibilitas, maka perencanaan wilayah manajemen kebakaranpun harus disesuaikan dengan perubahan tersebut (KEPMEN PU no.11/kpts/2000).

Jangkauan pelayanan pos pemadam kebakaran merupakan faktor penting karena terkait oleh waktu tempuh dalam penanganan bencana kebakaran. Berdasarkan KEPMEN PU no.11/kpts/2000: Perencanaan lokasi Pos Pemadam Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ditentukan berdasarkan standar waktu tanggap (Response time) terhadap pemberitahuan kebakaran di wilayah tersebut. Pos pemadam kebakaran sesuai wilayah layanan penanggulangan bencana kebakaran harus memenuhi waktu tempuh pelayanan cepat tanggap penanggulangan bencana kebakaran maksimal sebesar 15 menit. Cepat tanggap 15 menit yang dimaksud merupakan waktu maksimal petugas pemadam kebakaran dari tahap awal sampai dengan gelar peralatan di lokasi kejadian kebakaran. Cepat tanggap 15 menit petugas peamadam kebakaran terbagi atas 3 tahap, 5 menit pertama merupakan tahap persiapan, 5 menit kedua merupakan tahap perjalanan(dari pos menuju lokasi kejadian kebakaran), tahap ketiga merupakan tahap gelar peralatan di lokasi kejadian kebakaran.

Standar perletakan pos pemadam kebakaran dalam skala kota:

1. Berdasarkan Kepmen PU No.11/KPTS/2000 Ketentuan teknis manajemen penanggulaan kebakaran di perkotaan, yaitu:
   a. Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 7,5 km dari sektor.
   b. 1 (satu) pos pemadam melayani maksimum 3 kelurahan.
2. Berdasarkan standar ISO (Insurance Service Office) Ketentuan aman untuk perlindungan kebakaran yaitu:
   a. Mobil Pemadam berjarak 2,4 Km dari bangunan
   b. Mobil Tangga berjarak 4 Km dari bangunan
   c. Untuk setiap bangunan terjauh berjarak 8 km dari Pos Kebakaran

Untuk Kabupaten Sidoarjo saat ini jangkauan pelayanan pemadam kebakaran dalam gambar berikut :

Gambar 9. Peta jangkauan Layanan Pos Pemadam Kebakaran

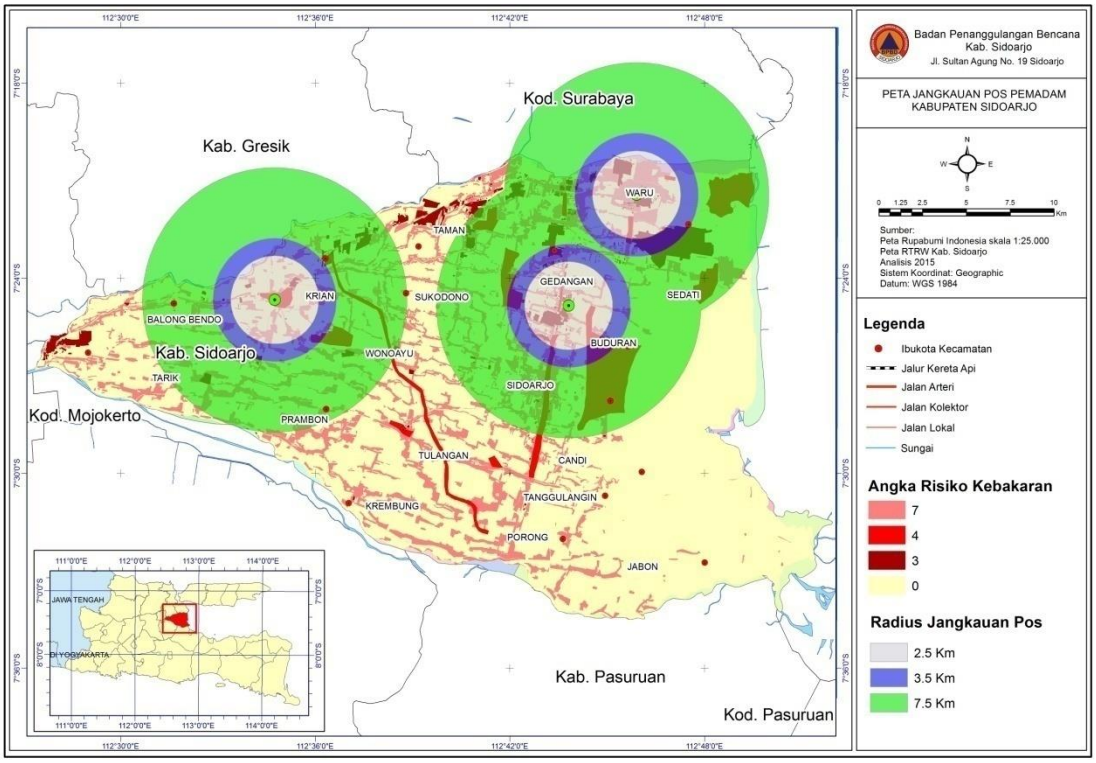

3) Identifikasi Tingkat Aksesbilitas Jaringan Jalan

Skala pelayanan pos pemadam kebakaran merupakan faktor penting karena terkait oleh waktu tempuh dalam penanganan bencana kebakaran. Berdasarkan KEPMEN PU no.11/kpts/2000: Perencanaan lokasi Pos Pemadam Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ditentukan berdasarkan standar waktu tanggap (Responsetime) terhadap pemberitahuan kebakaran di wilayah tersebut. Pos pemadam kebakaran sesuai dengan wilayah layanan penanggulangan bencana kebakaran harus memenuhi waktu tempuh pelayanan cepat tanggap penanggulangan bencana kebakaran maksimal sebesar 15 menit. Cepat tanggap 15 menit yang dimaksud merupakan waktu maksimal petugas pemadam kebakaran dari tahap awal sampai dengan gelar peralatan di lokasi kejadian kebakaran.

Cepat tanggap 15 menit petugas pemadam kebakaran terbagi atas 3 tahap, 5 menit pertama merupakan tahap persiapan, 5 menit kedua merupakan tahap perjalanan(dari pos menuju lokasi kejadian kebakaran), tahap ketiga merupakan tahap gelar peralatan di lokasi kejadian kebakaran. Untuk itu di perlukan analisis aksesbilitas jaringan jalan agar dapat ditentukan jalan yang akan di lalui ketika terjadi kebakaran di suatu tempat. Aspek aksesibilitasnya terdiri dari jarak tempuh, kecepatan tempuh dan waktu tempuh.Berdasarkan rumus matematika berikut dapat di tentukan nilai kecepatan, waktu tempuh dan jaraknya.

Rumus :

$$v = \frac{s}{t}$$

Dengan ketentuan:

- s= Jarak yang ditempuh (m, km)
- v= Kecepatan (km/jam, m/s)
- t= Waktu tempuh (jam, sekon)

Catatan:

1. Untuk mencari jarak yang ditempuh, rumusnya adalah $s = v \times t$.
2. Untuk mencari waktu tempuh, rumusnya adalah

$$t = \frac{s}{v}.$$

3. Untuk mencari kecepatan, rumusnya adalah

$$v = \frac{s}{t}.$$

Kecepatan tempuh pada ruas jalan yang memiliki hirarki lingkungan diasumsikan 10km/jam dimana asumsi ini dikutip dari peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006. Peraturan tersebut berbunyi “jalan lingkungan adalah jalan yang dibangun dengan kecepatan rencana 10 km/jam”.Kecepatan tempuh pada hirarki lokal sekunder yang tidak terdapat pada data dinas perhubungan diasumsikan dengan kecepatan rata rata pada hirarki lokal sekunder yaitu sebesar 31,9 km/jam.

Tabel 11. Waktu Tempuh Berdasarkan Jarak Jangkauan

No	Jarak Jangkauan (km)	Kecepatan (km/jm)	Waktu tempuh (menit)
1	2.5	30	5
2	5	30	10
3	7.5	30	15

Gambar 10. Peta Ruas jalan

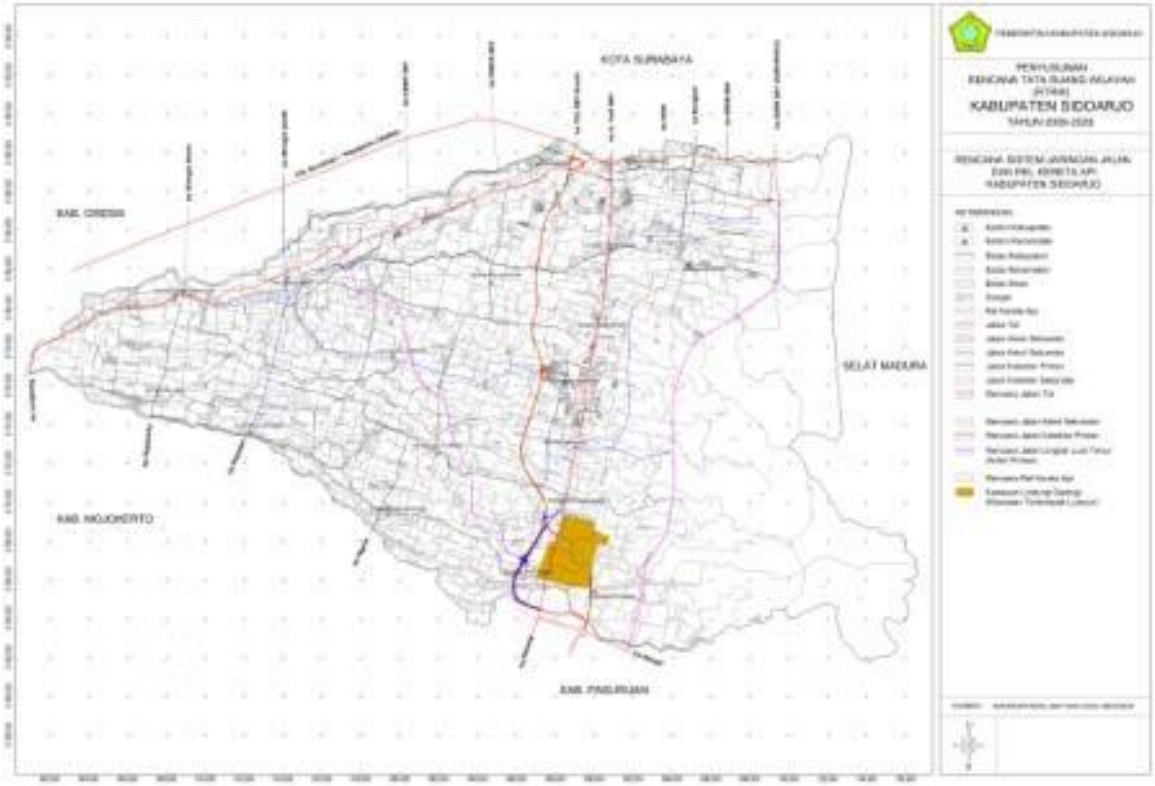

4) Identifikasi Sumber Air

Berdasarkan kondisi air, di Kabupaten Sidoarjo ada dua jenis rasa air yaitu air asin dan tawar. Total ada 8 kecamatan yang sebagian wilayahnya merupakan air asin yaitu seluas 163,13 Km² dan 10 Kecamatan lainnya murni air tawar.Air dan pemadaman kebakaran akan selalu bersama-sama. Secara global, air merupakan sumber daya kita yang berlimpah. Harganya murah. Ketika sistem air publik diadakan, pasokan airnya tersedia hampir tak pernah kehabisan. Ketika

dipergunakan dengan cermat, air sangat efektif menyerap panas dan memadamkan berbagai kebakaran.

Untuk alasan ini, organisasi pemadam kebakaran di seluruh dunia mendasarkan operasi utamanya dengan penggunaan air sebagai bahan pemadaman api kebakaran.Sistem pasokan air publik dan hidran kebakaran melibatkan belanja modal yang tidak sedikit, namun masa pakainya secara tipikal berakhir antara 70 s/d 100 tahun.Sebuah sistem pasokan air publik dan hidran kebakaran yang dirancang dan dipasang secara cermat adalah sebuah investasi jangka panjang dalam rangka keselamatan komunitas dan sudah seharusnya menerapkan perencanaan jangka panjang dan standar keteknikan yang tepat. Pasokan air yang cukup untuk mengatasi bahaya kebakaran serta transportasi yang menunjang merupakan komponen-komponen yang sangat vital dalam perencanaan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

Tabel 12. Luas Wilayah Berdasarkan Kondisi Air (Ha)

No	Kecamatan	Daerah Asin	Daerah Banjir			Kedalaman Air Tanah 0 - 5 M
			Sesudah Hujan	Periodik	Air Pasang	
1	Sidoarjo	4063,62	308,14	-	-	6.256
2	Buduran	1.822,50	17,50	-	701,75	4.102,50
3	Candi	667,25	491,30	-	-	4.066,75
4	Porong	-	14,26	75,50	-	2.982,25
5	Krembung	-	17,00	12,00	-	2.955,00
6	Tulangan	-	48,00	-	-	3.120,50
7	Tanggulangin	640,75	21,25	-	-	3.229,00
8	Jabon	4.080,75	216,05	27,00	456,00	8.099,75
9	Krian	-	265,75	-	-	3.250,00
10	Balongbendo	-	30,00	-	-	3.140,00
11	Wonoayu	-	71,50	-	-	3.392,00
12	Tarik	-	8,75	-	-	3.606,00
13	Prambon	-	64,25	-	-	3.422,50
14	Taman	-	-	108,00	-	3.153,50
15	Waru	740,50	-	-	740,50	3.032,00
16	Gedangan	195,75	-	-	-	2.405,75
17	Sedati	4.101,57	-	387,90	120,30	7.943,00
18	Sukodono	-	-	-	-	3.267,75

No	Kecamatan	Daerah Asin	Daerah Banjir			Kedalaman Air Tanah 0 - 5 M
			Sesudah Hujan	Periodik	Air Pasang	
Jumlah/Total		**16.312,69**	**1.573,75**	**610,40**	**2.018,55**	**71.424,25**

Sumber : Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2013

Gambar 11. Peta Sungai Kabupaten Sidoarjo

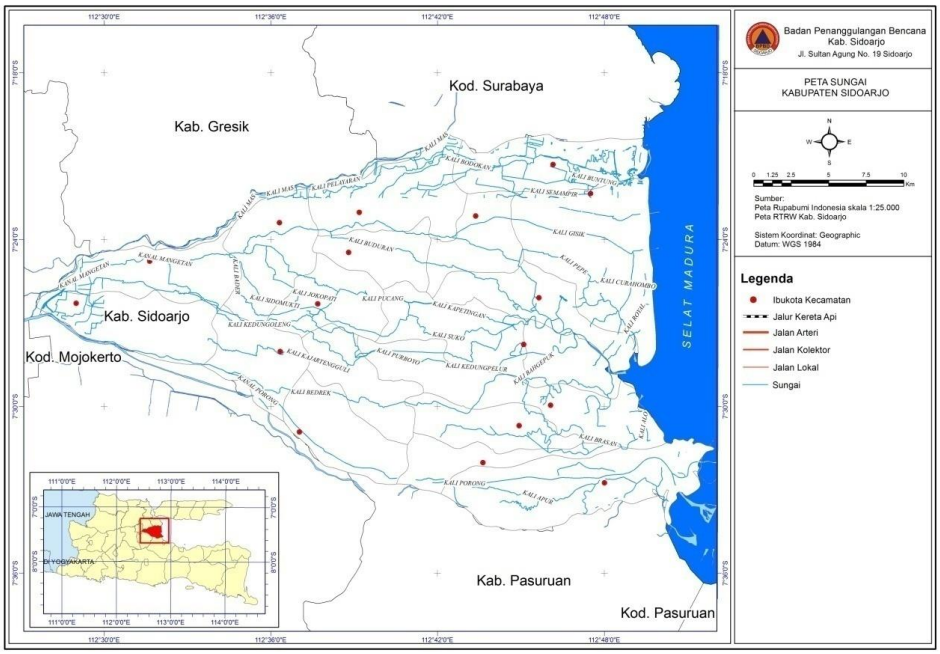

Gambar 12. Peta Jaringan Pipa PDAM Kabupaten Sidoarjo

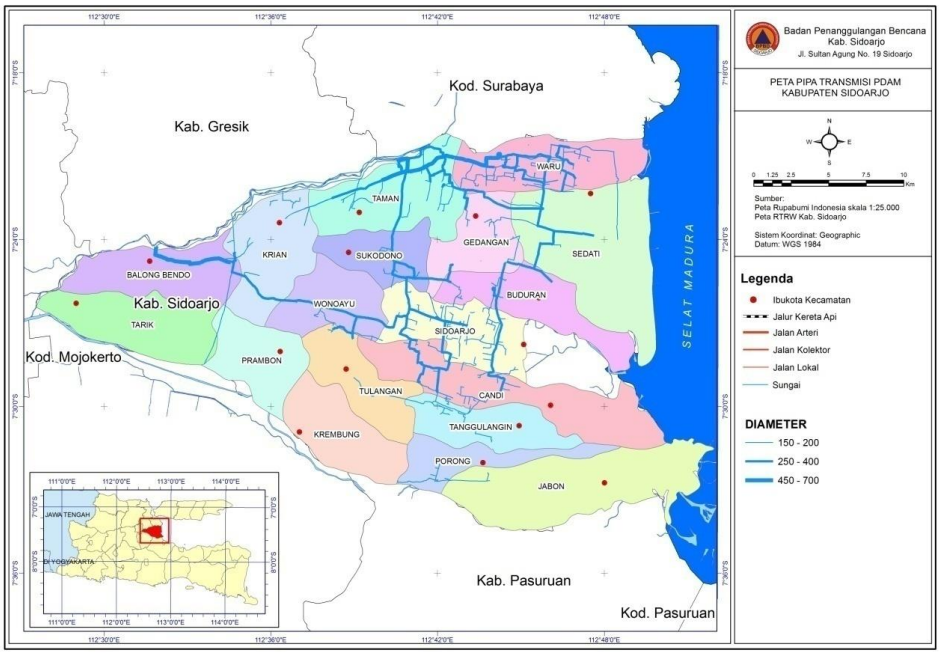

5) Arahan Rekomendasi Lokasi Pos Pemadam Kebakaran Yang Baru

Jumlah pos pemadam Kebakaran yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan akan pelayanannya akibat pesatnya pembangunan kota dan daerah pinggirannya. Banyak kasus kebakaran yang terjadi mengakibatkan api lebih dahulu membakar isi bangunan dan menjalar ke bangunan-bangunan sekitar sebelum pasukan pemadam tiba di lokasi, jika dilihat dari waktu kedatangan sejak diterima informasi bisa mencapai lebih dari 15 menit sehingga banyak korban serta kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, kebutuhan akan pelayanan publik/emergency membutuhkan jumlah yang proporsional dengan kebutuhannya dan merata bagi setiap orang, baik kaya/miskin, tinggal di pusat kota/pinggiran. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui survei berbagai variabel diatas , maka diperlukan penambahan pos pemadam kebakaran di beberapa tempat. Rencana letak pos pemadam kebakaran yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah di wilayah Sektor Pemadam Kebakaran yang padat pemukiman dan pabrik. Dan dari sektor - sektor tersebut membawahi beberapa Pos Pemadam Kebakaran.

Gambar 13. Peta Rencana Usulan WMK, Sektor dan Pos

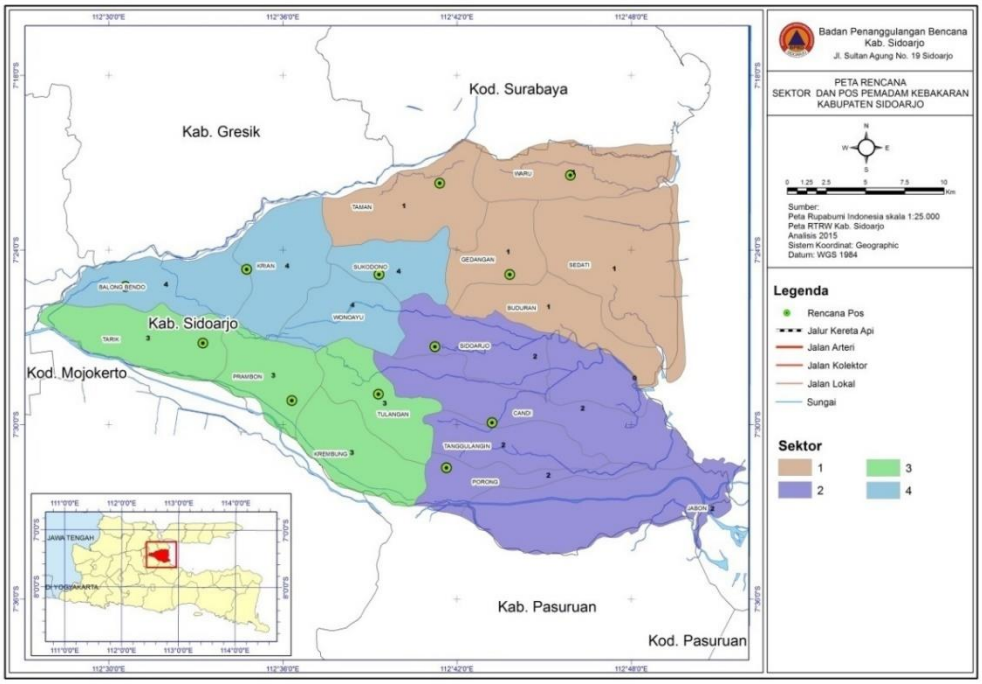

Gambar 14. Peta Rencana Jangkauan Usulan WMK, Sektor dan Pos

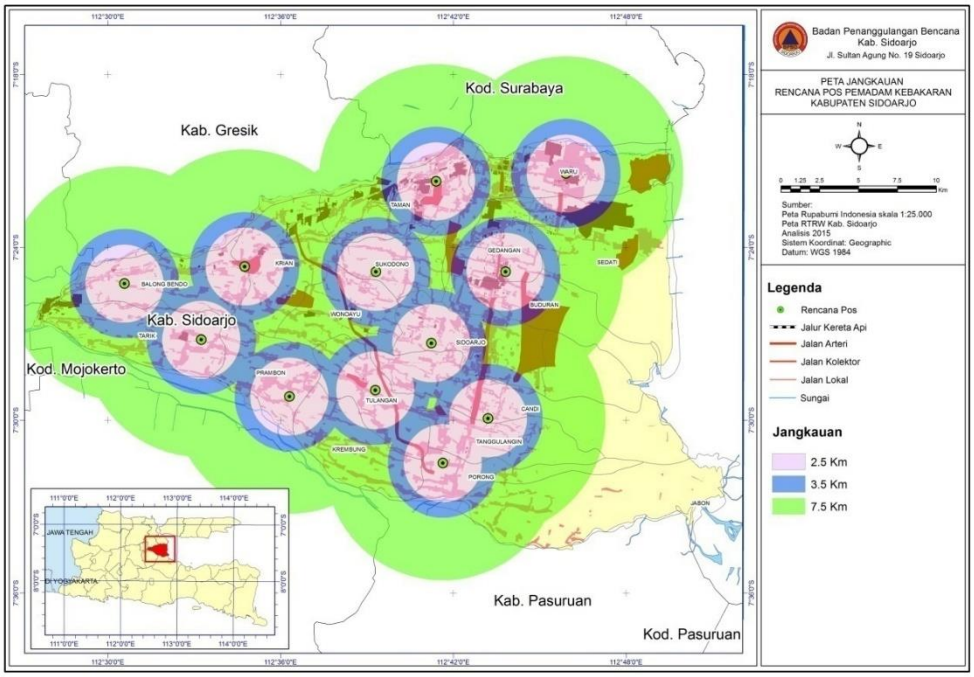

Sesuai dengan Standar perletakan pos pemadam kebakaran :

1. Berdasarkan Kepmen PU No.11/KPTS/2000 Ketentuan teknis manajemen penanggulaan kebakaran di perkotaan, yaitu:
   a. Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 7,5 km dari sektor.
   b. 1 (satu) pos pemadam melayani maksimum 3 kelurahan.
   c. Berdasarkan standar ISO (Insurance Service Office) Ketentuan aman untuk perlindungan kebakaran yaitu:
      a. Mobil Pemadam berjarak 2,4 Km dari bangunan
      b. Mobil Tangga berjarak 4 Km dari bangunan
      c. Untuk setiap bangunan terjauh berjarak 8 km dari Pos Kebakaran

Dari table di bawah ini dapat diketahui bahwa di Kabupaten Sidoarjo terdapat 18 Kecamatan dengan 322 Desa dan 31 Kalurahan.

Tabel 13. Jumlah Kalurahan per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Sidoarjo	10	14	10	Balongbendo	20	0
2	Buduran	15	0	11	Wonoayu	23	0
3	Candi	24	0	12	Tarik	20	0
4	Porong	13	6	13	Prambon	20	0
5	Krembung	19	0	14	Taman	16	8
6	Tulangan	22	0	15	Waru	17	0
7	Tanggulangin	19	0	16	Gedangan	15	0
8	Jabon	15	0	17	Sedati	16	0
9	Krian	19	3	18	Sukodono	19	0
JumlahTot						**322**	**31**

Sumber: BadanPusat Statistik KabupatenSidoarjo, 2013

Berdasarkan Kepmen PU No.11/KPTS/2000 Ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan, yaitu:

a. Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 7,5 km dari sektor.

b. 1 (satu) pos pemadam melayani maksimum 3 kelurahan.

Dari Kepmen di atas agar jangkauan layanan pos pemadam kebakaran dapat terpenuhi , maka wilayah Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai 322 desa dan kelurahan akan di bagi 4 sektor pemadam kebakaran dengan masing-masing sektor terdiri atas 4 pos pemadam kebakaran sehingga dapat memenuhi jangkauan layanannya untuk setiap wilayahnya masing masing. Berdasarkan analisis tersebut Kabupaten Sidoarjo akan dibagi menjadi:

Tabel 14. Sektor di Kabupaten Sidoarjo

No. Sektor	Wilayah	Pos
I	Kec. Waru, Taman, Gedangan, Sedati Buduran	3 pos (Taman, Waru, Buduran)
II	Kec. Sidoarjo, Candi, Tanggulangin, Porong	3 Pos (Sidoarjo, Candi, Porong)
III	Kec. Tulangan, Krembung, Prambon, Tarik	3 (Tulangan, Prambon, Tarik)
IV	Kec. Balongbendo, Krian, Sukodono, Wonoayu	3 (Balongbendo, Krian, Sukodono)

2.6.2. Analisis Lingkungan Organisasi Dan Pelayanan Publik

Agar tujuan dan sasaran yang direncanakan di dalam Renstra sesuai Visi dan Misi di dalam RPJMD dapat berjalan baik, diperlukan langkah strategis, kebijakan dan program yang jelas dan realistis. Langkah-langkah ini dilakukan dengan terlebih dahulu melihat kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Ini berarti dalam hubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Sidoarjo, perlu dilihat dan diketahui kondisi internal dan eksternal BPBD Kabupaten Sidoarjo.Alat dan metodologi untuk melihat lingkungan organisasi yang dikenal luas dan umum, diantaranya adalah ; SWOT *Analysis*. Namun melihat kondisi organisasi dikaitkan dengan resiko bencana yang dihadapi, maka dipakai pendekatan TOWS.TOWS Analysis merupakan pengembangan dari SWOT *Analysis*, karena menurut Hermawan Kartajaya (Jawa Pos, 26 Maret 2010), SWOT lebih berorientasi masa lalu sedang pendekatan TOWS berorientasi ke masa depan dengan melihat terlibih dahulu Ancaman (*Threat*) sebagai faktor berpengaruh. Dengan demikian, potensi organisasi yang dilihat dan dianalisis digeser dari melihat Kekuatan (*Strenght*) ke potensi Ancaman (*Threats*), diikuti melihat : Peluang (*Opportunities*), Kelemahan (*Weaknesses*), dan Kekuatan (*Strengths*), yang dimiliki dan dihadapi organisasi.Analisis dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap butir TOWS yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo diasumsikan sebagai berikut.

Ancaman (*Threat*) adalah Situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan organisasi. Sedang Peluang (*Opportunities*) adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan organisasi. Di pihak lain Kelemahan (*Weaks*) adalah sebagai keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, ketrampilan dan kapabilitas yang secara serius akan menghambat kinerja efektif organisasi, sedang Kekuatan (*Strong*) adalah sumber daya, ketrampilan atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan yang dilayani atau ingin dilayani oleh organisasi. Dalam hal ini langkah awal yang dilakukan adalah identifikasi terhadap butir-butir TOWS yang dimiliki BPBD

Kabupaten Sidoarjo, dan dari uraian di atas, maka butir-butir TOWS yang dapat diidentifikadalah sebagai berikut.

A. Faktor Eksternal Organisasi

1) Ancaman / *Threat*

a. Bencana Lumpur sidoarjo yang berkepanjangan berdampak pada aspek fisik dan sosial ekonomi masyarakat di Sidoarjo;
b. Bencana lumpur sidoarjo berdampak pada keterbatasan kewenangan BPBD Sidoarjo dalam menanggulangi lumpur sidoarjo;
c. Cakupan wilayah yang berpotensi kebakaran cukup luas dan tidak sebanding dengan sarana prasarana yang dimiliki;
d. Kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh BPBD Sidoarjo dalam menangani bencana lumpur sidoarjo membuat BPBD tidak bisa melaksanakan fungsinya secara maksimal;
e. Banyaknya industri di Kabupaten Sidoarjo memberikan ancaman terhadap potensi bencana pecemaran lingkungan dan kegagalan teknologi;
f. Kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam hal penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo;
g. Potensi ancaman bencana tahunan dalam bentuk puting beliung, rob (air pasang), banjir dan kekeringan khususnya penyediaan air bersih.

2) Peluang / *Opportunity*

a. Banyaknya industri/dunia usaha di Kabupaten Sidoarjo sehingga terdapat peluang untukCSR (*Coorporate Social Responsibilities*);
b. Adanya dukungan dana APBN dalam Penanggulangan Bencana;
c. Adanya dukungan dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
d. Adanya dukungan sarana prasarana PMK di dunia usaha / industri di Kabupaten Sidoarjo;
e. Pesatnya dan dukungan kemajuan Teknologi Informasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
f. Potensi dan permasalahan bencana lumpur memberikan peluang bagi pengembangan BPBD yang lebih baik ke depan

B. Faktor Internal Organisasi

1) Kelemahan / Weaks

a. Alokasi anggaran Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo saat ini masih banyak terserap untuk PMK, sedangkan untuk Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan masih belum mencukupi;
b. Belum terjalinya koordinasi dan sinkronisasi secara optimal dengan lembaga / OPD terkait, termasuk pada aspek penyediaan data-data teknis kebencanaan;
c. Proporsi pegawai /SDM masih perlu peningkatan baik secara kualitas dan kuantitas;
d. Belum tersedianya gedung kantor BPBD yang memadai;
e. Masih terbatasnya jumlah posko Pemadam Kebakaran;
f. Masih terbatasnya sarana prasarana/peralatan penunjang kebencanaan termasuk kebakaran;
g. Belum terbentuknya unsur pengarah BPBD Kabupaten Sidoarjo;
h. Belum tersusunnya Perda RISPK (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran);
i. Pusat informasi bencana bagi masyarakat (termasuk layanan informasi) belum berfungsi secara optimal;
j. Belum tersedianya SOP Penanggulangan Bencana di semua bidang;
k. Sosialisasi keberadaan BPBD masih perlu ditingkatkan, terkait dengan tupoksi;
l. Pelatihan-Pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan masih lemah;
m. Kotak fungsi perencanaan dan pelaporan BPBD tidak termasuk struktur tersendiri dalam BPBD

2) Kekuatan

a. BPBD Kabupaten Sidoarjo secara legalitas sudah terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Tersedianya alokasi anggaran Penanggulangan Bencana dari APBD;

c. Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai dasar Kelembagaan dan kegiatan operasional BPBD;
d. Dimasukkanya pemadam kebakaran menjadi salah satu organisasi dan bidang dibawah koordinasi BPBD, sehingga mempercepat koordinasi apabila terjadi bencana kebakaran;
e. Dukungan anggaranAPBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Progam Rehabilitasi dan Rekonstruksi (bantuan sosial berpola hibah);
f. Adanya kerjasama dengan kelompok relawan lokal
g. Adanya kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha
h. Pengembangan aplikasi Sidoarjo Tanggap (SIGAP), yaitu Sistem Informasi Kebencanaan berbasis Android, dimana masyarakat, baik umum maupun relawan dapat melaporkan kejadian bencana dan kebakaran melalui aplikasi SIGAP

Hasil dari identifikasi terhadap butir-butir TOWS di atas, menunjukkan bahwa Ancaman dan Peluang yang dihadapi serta Kelemahan dan Kekuatan yang dimiliki BPBD Kabupaten Sidoarjoi, dapat dirangkum kedalam 3 (tiga) bidang kegiatan sesuai kompetensi sebagai berikut.

1. **Bidang Tugas dan Fungsi;** yang dilaksanan sesuai undang-undang dan peraturan / ketentuan tentang BPBD
2. **Bidang Sarana Prasarana :**yangtermasuk di dalam kelompok ini antara lain ; Sumberdaya Manusia sebagai asset, Infrastruktur yang dimiliki (*Hardware dan Software*), Peralatan pendukung tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya lain yang diperlukan.
3. **Bidang Administrasi dan Pengawasan :**adalah seluruh aktivitas penunjang organisasi BPBD di bidang administrasi, keuangan, pelaporan dan pengukuran kinerja serta pengawasan.

Dari pengelompokan kompetensi kegiatan tersebut secara menyeluruh dilakukan identifikasi ulang butir TOWS sebagai berikut.

1) Ancaman (*Threat*)

a. Bidang Tugas dan Fungsi BPBD

1. Topografi dan geografi Kabupaten Sidoarjo sebagian besar luasnya adalah wilayah daratan dengan potensi resiko bencana banjir dan kekeringan.
2. Jumlah penduduk, tingkat kepadatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Sidoarjo relatif padat dan heterogen
3. Tingkat pendidikan dan ketergantungan mata pencaharian masyarakat di bidang industri, pertanian dan birokrat
4. Kesenjangan tingkat kesejahteraan perlu perhatian dan peningkatan
5. Perubahan pola pikir dan trauma masyarakat terhadap bencana meningkat akibat peristiwa lumpur Lapindo.

b. Bidang Sarana Prasarana

1. Kebijakan untuk penambahan pos-pos PMK dan kelengkapan peralatannya belum optimal
2. Pedoman operasional penanggulangan bencana / kebakaran masih belum sepenuhnya ada
3. Sumber danauntuk membiayai program, kegiatan dan sarana pendukung operasional penanggulangan bencana terbatas
4. Hardware dan software tehnologi informasi kebencanaan belum terpenuhi sesuai kebutuhan dan belum dimiliki secara lengkap.

c. Bidang Administrasi dan Pengawasan

1. Sistem administrasi keuangan, pelaporan, dan penilaian kinerja organisasibelum baku
2. Fungsi pengawasan dan pemeriksa belum terakomodasi baik

2) Peluang (Opportunities)

a. Bidang Tugas dan Fungsi

1. Makro & mikro ekonomi regional dan nasional mendukung
2. Berpengalaman dalam pengelolaan dan layanan bencana bidang pemadam kebakaran
3. Stabilitas keamanan, sosial dan politik regional baik/stabil

b. Bidang Sarana Prasarana

1. Pengembangan Layanan PMK ke kawasan industri
2. Dukungan pemerintah kabupaten cukup baik

3. Dikenal luas masyarakat dan dunia usaha dan mampu bekerjasama
4. Besarnya jumlah penduduk merupakan potensi pendukung tugas
5. Infrastruktur cukup lengkap di wilayah Kabupaten Sidoarjo

c. Bidang Administrasi dan Pengawasan

1. Adanya dukungan dari OPD lain untuk bekerja sama
2. Badan Pemeriksa dan Pengawas OPD berfungsi di Kabupaten
3. SDM berpengalaman di bidang administrasi dan layanan publik

3) Kelemahan (Weakness)

a. Bidang Tugas dan Fungsi

1. Kinerja kegiatan belum optimal dan teruji di budang kebencanaan
2. Kompetensi SDM kurang jelas dan perlu peningkatan kualitas
3. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan kegiatan masih perlu peningkatan
4. Sumber Pendanaan terbatas dan Koordinasi antar OPDbelum padu

b. Bidang Sarana Prasarana

1. Inventarisasi dan Pengelolaan aset perlu dibenahi
2. Gedung kantor dan gudang kurang mendukung kegiatan organisasi
3. Pemeliharaan dan cek kesiapsiagaan peralatan perlu ditingkatkan
4. Belum sempurnanya apliaksi Sidoarjo Tanggap (SIGAP)

c. Bidang Administrasi dan Pengawasan

1. Chek dan rechek pengelolaan keuangan dan logistik perlu ditingkatkan
2. Pola penyampaian informasi kepada masyarakat belum baik

4) Kekuatan (Strenght)

a. Bidang Tugas dan Fungsi

1. Merupakan organisasi yang harus ada sesuai undang-undang
2. Struktur, unsur organisasi dan program kegiatan mampu berkembang
3. Merupakan OPD Pendukung/Penunjang Pemerintahan Daerah

b. Bidang Sarana Prasarana

1. Kantor dan kelengkapan sarana prasarana mendukung
2. Yuridis formal organisasi kuat dan lengkap

3. Dikenal di seluruh pelosok Desa/Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
4. Infrastruktur memadai dan mudah dijangkau di setiap wilayah kabupaten

c. Bidang Administrasi dan Pengawasan

1. Adanya Badan Pemeriksa dan Inspektorat Kabupaten
2. Adanya pembinaan dari kementerian dan Badan terkait

Berdasar uraian di atas diasumsikan hasil identifikasi butir TOWS sesuai dengan kondisi yang dihadapi BPBD Kabupaten Sidoarjo, untuk itu dilakukan pemberian Nilai (***Scoring***) dan Bobot (W***eighting***) terhadap butir TOWS dengan pendekatan menggunakan model *Analytical Hierrarchy Process* (AHP), di mana di setiap butir TOWS diberi N**ilai 1 (Satu),**dan di **Bobot** (dalam %)yang penetetapannya didasarkan kepada seberapa besar/kuat peranan dan atau pengaruh dari masing-masing bidang terhadap lingkungan organisasi, sebagai berikut.

1. Bidang Tugas dan Fungsi diberi bobot 35 %
2. Bidang Sarana Prasarana diberi bobot 40 %
3. Bidang Administrasi dan Pengawasan diberi bobot 25 %

Kemudian dilakukan perhitungan per bidang dengan cara sebagai berikut :

Nilai X Bobotdari masing-masing butir TOWS, sedang untuk melihat posisi dan keberadaan organisasi merupakan hasil dari :***(Peluang - Ancaman)*** dan ***(Kekuatan - Kelemahan)***, dengan rangkuman hasil sebagai berikut.

Tabel 15. Hasil Perhitungan dan Pengukuran Analisis TOWS

Butir-Butir	Nilai	Bobot	Hasil
Ancaman (T)			
a. Bidang Tugas dan Fungsi	5,00	0,35	1,75
b. Bidang Sarana Prasarana	4,00	0,40	1,60
c. Bidang Adm. & Pengawasan	2,00	0,25	0,50
Nilai Kelompok Ancaman			3,85
Peluang (O)			
a. Bidang Tugas dan Fungsi	3,00	0,35	1,05
b. Bidang Sarana Prasarana	5,00	0,40	2,00
c. Bidang Adm. & Pengawasan	3,00	0,25	0,75
Nilai Kelompok Peluang			3,80
Nilai Eksternal			**(0,05)**
Kelemahan (W)			
a. Bidang Tugas dan Fungsi	4,00	0,35	1,40
b. Bidang Sarana Prasarana	3,00	0,40	1,20
c. Bidang Adm. & Pengawasan	2,00	0,25	0,50
Nilai Kelompok Kelemahan			3,10
Kekuatan (S)			
a. Bidang Tugas dan Fungsi	3,00	0,35	1,05
b. Bidang Sarana Prasarana	4,00	0,40	1,60
c. Bidang Adm. & Pengawasan	2,00	0,25	0,50
Nilai Kelompok Kekuatan			3,15
Nilai Internal			**0,05**

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa keberadaan dan posisi BPBD Kabupaten Sidoarjo, dihadapkan pada lingkungan Eksternal dan Internal organisasi berada di Kuuadran (-0,05 ; +0,05) yang dapat digambarkan ke dalam diagram TOWS *Analysis*. Di mana dari gambar diagram diketahui keberadaan dan posisi BPBD Kabupaten Sidoarjo,merupakan kuadran **Negatif** dan **Positif**, yakni **kuadran Stabilitas (*Stability*).** Artinya untuk saat iniBPBD Kabupaten Sidoarjo, sebagai organisasi yang relatif baru,posisinya berada dalam kondisi S**tabil** karena **Kekuatannya** masih relatif lebih besar dari **Kelemahan** yang dmiliki, sedang **Ancaman** yang dihadapi tampaknya juga lebih besar dibanding **Peluang**-nya**.**

Kondisi dan posisi organisasi BPBD Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan ke dalam diagram TOWS sebagai berikut

Gambar 15. Diagram Hasil Analisis TOWS (SWOT)

Gambar diagram TOWS tersebut di atas juga menunjukkan bahwa ;Kebijakan, Strategi serta Program dan Kegiatan yang ditetapkan dan dipilih adalah yang sesuai dengan **kuadran *Stability***.Kebijakan, Strategi serta Program dan Kegiatan yang searah dengan kondisi dan posisi organisasi saat ini yakni : Kebijakan yang bersifat penataan, perbaikan, rekonstruksi, dan koordinasi secara selektif (*Selective Maintenance)* dan perbaikan, rekonstruksi, dan koordinasi secara cepat (*Agresive Maintenance*)kearah **Sinergitas** dalam pelaksanaan kegiatan dan implementasi program-program yang direncanakan. Baik dalam upaya untuk pengembangan organisasi maupun diversifikasi ke arah pelayanan publik yang semakin baik/prima, agar di masa mendatang dapat dicapai posisi organisasi BPBD Kabupaten Sidoarjo pada Kuadrani Bertumbuh (*Growth*).

2.6.3. Rencana Aksi : Kebijakan, Strategi dan Program/Kegiatan

Kebijakan, Strategi dan Program/Kegiatan adalah bentuk dari implementasi Visi Misi dan Posisi organisasi hasil análisis TOWS.Sehingga strategi dan kebijakan yang harus dipilih adalah strategi dan kebijakan yang sesuai posisi kuadran ***Stability*.** Di mana di dalam Kuadran *Stability*tersebut terbagi ke

dalam 2(Dua) Sub Kuadran, yakni Kuadran :**1)Kebijakan dan Strategi Dasar,** dan**2) Kebijakan dan Strategi Fungsional.**

Sedang program/kegiatan disusun berdasar kebijakan dan strategi yang ditetapkan sesuai posisi organisasi, sebagaimana digambarkan sebagai berikut.

Gambar 16. Skema Pilihan Strategi dan Arah Kebijakan

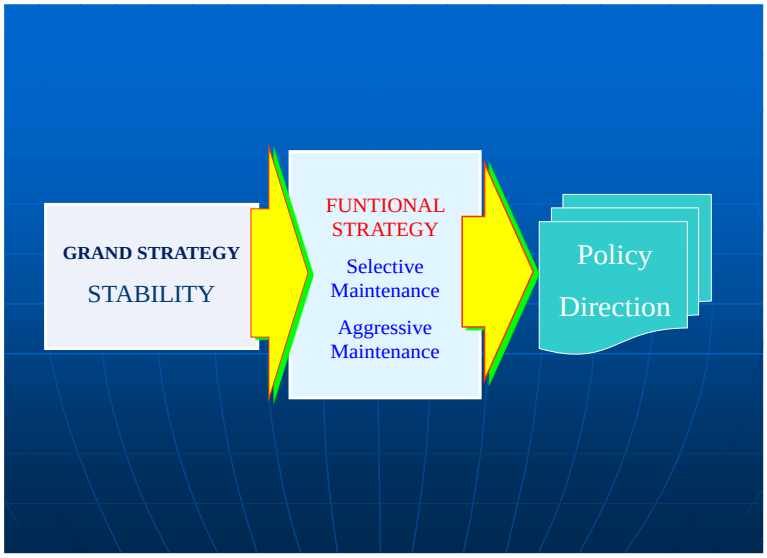

Dengan demikian Kebijakan, Strategi serta program/kegiatan yang harus dipilih/ditetapkan untuk pengembangan organisasi BPBD Kabupaten Sidoarjo, disimulasikan sebagai berikut.

1) Kebijakan dan Strategi Dasar

Sesuai kuadran, Kebijakan dan Strategi Dasar di posisi Stabilitas (*Stability*) adalah Optimalisasi Kinerja dan Penguatan Kelembagaandengan **Strategi memperkuat Koordinasi dan Sinergitas**.

2) Kebijakan dan Strategi Fungsional

Sesuai posisi kuadran terbagi ke dalam 2 (dua) sub kuadran, sehingga Kebijakan dan Strategi Fungsional, yang sesuai sub kuadran adalah ; (1)*Selective Maintenance*, dan (2) *Aggresive Maintenance.*

Kebijakan dan strategi dasar dan atau kebijakan dan strategi fungsional pada dasarnya digunakan sebagai pedoman dalam rangka BPBD menjalankan dan

mengimplementasikan pelayanan publik. Yang di dalam rangkuman simulasinya Kebijkan dan Strategi tersebut dapat disusun dalam matriks Rencana Aksi (*Action Plan*) selama periode Rencana Strategis, sebagai berikut.

Tabel 16. Simulasi Rencana Aksi ; Kebijakan, Strategi dan Program/Kegiatan

No. Urt	Uraian		Tahun Kegiatan				
	Kebijakan dan Strategi	Program	1	2	3	4	5
A	**Dasar**	Prioritas :					
	Optimalisasi Kinerja dan	1. Pembinaan dan Inventarisasi					
	Penguatan Kelembagaan	SOP Pelayanan Publik					
	BPBD Kabupaten Sidoarjo	2. Pemberdayaan manajemen					
	ke arah peningkatan	dan peningkatan kualitas					
	Koordinasi & Sinergitas	SDM & tehnologi informasi					
B	**Fungsional :**						
	1) Selective Maintenance	Prioritas :					
	a. Penataan & Imple-	1. Pelatihan Kompetensi SDM					
	mentasi SOP	2. Sosialisasi dan Pengenalan					
	b. Penataan SDM dan	kelembagaan & SOP					
	evaluasi kebijakan	3. Peningkatan koordinasi antar					
	pelayanan publik	SKPD dan Penguatan Sinergi					
	c. Pemetaan potensi	untuk optimalisasi layanan					
	resiko di wilayah2	4. Implementasi tehnologi infor					
	terdampak bencana	masi administrasi & resiko					
	2) Aggressive Maintenance	Prioritas :					
	a. Penyusunan dan	1. Melakukan analisis resiko					
	Penetapan Standar	sesuai prioritas kebencanaan					
	Pelayanan Minimal	2. Identifikasi potensi wilayah					
	(SPM) Pelayanan	dan diversifikasi pelayanan					
	di setiap Bidang	3. Identifikasi sumber pendana					
	b. Penyusunan dan	an berbasis masyarakat, desa					
	Penetapan wilayah	dan dunia usaha (CSR)					
	prioritas pelayanan	4. Identifikasi kebutuhan sarana					
	sesuai tingkat resiko	penunjang tugas dan fungsi					
	untuk bencana banjir	organisasi					
	kekeringan, puting	5. Peningkatan Kerjasama untuk					
	beliung & kebakaran	pengurangan resiko bencana					
	c. Peningkatan pelayanan	dalam upaya penurunan IRBI					
	publik sesuai SPM	6. Pemeriksaan rutin sarana					
		dan peningkatan maintenance					

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPBD

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diuraikan pada Bab II adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. Namun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Sidoarjo masih terdapat dan dimukan beberapa tantangan dan permasalahan-permasalahan, diantaranya adalah:

1. Alokasi anggaran Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo saat ini banyak terserap untuk PMK, sedangkan untuk Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan bencana secara umum masih belum mencukupi;
2. Belum terjalinya koordinasi dan sinkronisasi secara optimal dengan OPD terkait, termasuk pada aspek penyediaan data teknis penanganan kebencanaan;
3. ProporsiSDM masih perlu peningkatan baik secara kualitas dan kuantitas;
4. Belum tersedianya gedung kantor BPBD yang relative memadai sesuai jumlah SDM dan peralatan serta sarana prasarana yang harus dikelola BPBD
5. Masih terbatasnya jumlah posko Pemadam Kebakaran;
6. Terbatasnya sarana prasarana penunjang kebencanaan termasuk kebakaran;
7. Belum terbentuknya unsur pengarah BPBD Kabupaten Sidoarjo;
8. Tersusunnya RISPK(Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran) yang harus merujuk pada RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2019;
9. Pusat informasi bencana bagi masyarakat (termasuk layanan informasi) belum berfungsi secara optimal;
10. Belum tersedianya SOP Penanggulangan Bencana di semua bidang;
11. Sosialisasi keberadaan BPBD masih perlu ditingkatkan, terkait dengan tupoksi;
12. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan masih lemah;

13. Bencana Lumpur Sidoarjo yang berkepanjangan berdampak pada aspek fisik dan sosial ekonomi masyarakat di Sidoarjo;
14. Bencana lumpur Sidoarjo berdampak pada keterbatasan kewenangan BPBD Sidoarjo dalam menanggulangi lumpur Sidoarjo;
15. Cakupan wilayah berpotensi kebakaran cukup luas dan tidak sebanding dengan sarana prasarana yang dimiliki;
16. Kecilnya kewenangan yang dimiliki BPBD Sidoarjo dalam menangani bencana lumpur Sidoarjo membuat BPBD tidak bisa melaksanakan fungsi maksimal;
17. Banyaknya industri di Kabupaten Sidoarjo memberikan ancaman terhadap potensi bencana pecemaran lingkungan dan kegagalanteknologi;
18. Kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam hal Pengurangan Resiko Bencana di Kabupaten Sidoarjo;
19. Potensi ancaman bencana tahunan dalam bentuk kebakaran, banjir, puting beliungdan kekeringan serta potensi ancaman bencana lainnya yang bersinggungan dengan kondisi geografis dan wilayah Kabupaten Sidoarjo sebagai pusat industri dan kawasan penyangga, antara lain :
    - Konflik sosial
    - Kegagalan teknologi
    - Wabah Penyakit/Epidemi
    - Banjir bandang dan rob
    - Gerakan tanah/longsor
20. Belum sempurnanya aplikasi Sidoarjo Tanggap (SIGAP), yang memerlukan dukungan anggaran dan sinergi untuk pengembangan lebih lanjut

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rumusan visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana termaktub dalam RPJMD adalah :"***Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan***" sedang Misi Kabupaten Sidoarjo, meliputi upaya untuk menuju :

1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipasif dan transparan.

2. Meningkatnya kemandirian dan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul Karimah, berlandasan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban
5. Infrastruktur Publik yang Memadai & Berkualitas Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Di mana keterkaitan antara Visi dan Misi sebagaimana diuraikan di atas digambarkan dalam Tabel Keterkaitan Visi Misi sebagai berikut.

Tabel 17. Keterkaitan Visi dengan Misi RPJMD

Unsur Visi		Misi
"Mandiri"	INOVATIF	1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan. 2. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.
"Sejahtera"		3. Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan. 4. Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul Karimah, berlandasan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban
"Berkelanjutan"		5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pernyataan misi sangat penting untuk penentuan tujuan secara efektif dan penting untuk penyusunan strategi. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusannya.

Perumusan misi dilakukan bersama oleh perwakilan dari: Dinas, Badan, Kantor, Instansi, dan DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk dari Forum OPD, dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal (kesempatan (O) dan ancaman (T)) dan kemampuan internal (kekuatan (S) dan kelemahan (W)) Kabupaten Sidoarjo.

Perwujudan visi pembangunan Sidoarjo 2016-2021 tersebut ditempuh melalui misi-misi yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan seluruh masyarakat Sidoarjo yang dijabarkan ke dalam 5(Lima) misi utama yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis yang memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri.

Di mana ke 5(Lima) misi utama Kabupaten Sidoarjo tersebut secara rinci dijabarkan dan diuraikan sebagai berikut:

Misi 1 : Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipasif dan transparan

Tabel 18. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 1 RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3
Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan	1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Opini atas audit BPK
		Nilai SAKIP Kabupaten
		Nilai Maturitas SPIP
		Nilai Kinerja EKPPD
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
		Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Misi 2 : Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat

Tabel 19. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 2 RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	1. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat	PDRB Per kapita
		Rasio PAD terhadap total belanja daerah.
	2. Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Tingkat PengangguranTerbuka
		Angka Kemiskinan
		% Desa maju

Misi 3 : Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan.

Tabel 20. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 3 RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
	2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup

Misi 4 : Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul Karimah, berlandasan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban

Tabel 21. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 4 RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3
1. Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan	1. Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan	Indeks Rasa Aman
		Indeks Resiko Bencana (IRB)
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Misi 5 : Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Tabel 22. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 5 RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)
1	2	3
1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta KelestarianLingkungan Hidup	1. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	% Jalan Kondisi Mantap
		% Luas area rawan genangan banjir
	2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air
		Indeks Kualitas Udara
		Indeks Kualitas Lahan

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, BPBD Kabupaten Sidoarjo dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Sidoarjo, sehingga menuntut adanya perubahan peran BPBD Kabupaten Sidoarjo dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan di dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.

Tabel 23. Skor Kriteria Penentuan isu-isu Strategis

NO	Kriteria	Bobot
1	Belum berubahnya paradigma masyarakat dan aparat dalam penanggulangan bencana	10
2	Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang kebencanaan	11
3	Tingginya derajat kerentanan terhadap berbagai jenis	8

	bencana	
4	Keterbatasan petugas dalam upaya penanggulangan bencana	7
5	Keterbatasan sarana-prasarana pendukung upaya penanggulangan bencana	8
6	Lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah maupun antara instansi pemerintah dengan komponen masyarakat lain.	11
7	Pola pembangunan yang masih mengabaikan kejadian bencana	15
8	Pola pembangunan yang belum berbasis pada Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	15
9	Belum optimalnya peraturan / regulasi tentang kebencanaan di tingkat OPD	15
	Total	100

Perumusan isu-isu strategis di samping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/instansi BPBD Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misinya.Sebagai lembaga penanggulangan bencana berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nonor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 24. Nilai Skala Kriteria Atas Isu-isu Strategis

Isu Strategis	KRITERIA PENILAIAN					Total Score	Urutan Prioritas
	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4	Kriteria 5		
SCORE	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3		
Isu 1	3	3	3	3	3	15	**1**
Isu 2	3	3	3	2	3	14	**2**
Isu 3	2	3	2	2	3	12	**3**
Isu 4	2	2	3	1	1	9	**5**
Isu 5	3	2	2	1	2	10	**4**
Isu 6	2	2	2	1	2	9	**5**
Isu 7	1	3	2	1	1	8	**6**
Isu 8							
Isu 9							

Keterangan :

Kriteria 1 : Terkait langsung dengan yang menyebabkan masalah pelayanan BPBD Skor 1 jika kurang terkait, skor 2 jika cukup terkait dan skor 3 jika sangat terkait langsung

Kriteria 2 : Menimbulkan dampak negatif signifikan atas kondisi sosial dan ekonomi masyarakat→ Skor 1 jika kurang menimbulkan dampak negatif, skor 2 jika cukup menimbulkan dampak negatif, dan skor 3 jika sangat menimbulkan dampak negatif

Kriteria 3 : Dapat diselesaikan melalui kompetensi sumberdaya/program BPBDSkor 1 jika kurang dapat diselesaikan, skor 2 jika cukup dapat diselesaikan, dan skor 3 jika sangat dapat diselesaikan

Kriteria 4 : Dapat diselesaikan dengan peningkatan kinerja BPBD
Skor 1 jika kurang dapat diselesaikan, skor 2 jika cukup dapat diselesaukan, dan skor 3 jika sangat dapat diselesaikan

Kriteria 5 : Keberhasilan penanganan akan membantu meningkatkan kontribusi BPBD pada pembangunan Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan. Skor 1 jika kurang dapat meningkatkan kontribusi BPBD, skor 2 jika cukup dapat meningkatkan kontribusi BPBD dan skor 3 jika dapat meningkatkan kontribusi BPBD

3.4. PROGRAM ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN KETANGGUHAN (APIK)

Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengelola resiko perubahan iklim dan bencana alam. Fokus utama kegiatan APIK ialah adaptasi perubahan iklim terhadap sektor ketahanan pangan, konservasi air dan upaya penurunan risiko bencana, dan sektor lain yang terkait dengan perubahan iklim.

Hasil akhir yang ingin dicapai di akhir implementasi program APIK ialah:

- Meningkatnya integrasi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dalam kerangka tata kelola pemerintahan nasional dan daerah;
- Menguatnya kemampuan masyarakat dan pihak swasta untuk menghadapi perubahan iklim dan bencana alam terkait cuaca ekstrim, dan
- Meningkatnya pemanfaatan informasi untuk manajemen risiko iklim dan bencana di kalangan pemangku kepentingan utama.

Peran BPBD Kabupaten Sidoarjo dalam mitigasi bencana sesuai tugas dan fungsinya adalah meningkatkan sinergi dalam upaya pengurangan resiko perubahan iklim dan bencana melalui beberapa kegiatan dan kebijakan dalam kerangka tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016 -2021.

Dalam menjalankan fungsi dan peran tersebut, BPBD telah berupaya bersinergi dan berkoordinasi dengan *stakeholder*diantaranya pengembangan database dan aplikasi / sistem informasi peringatan dini pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis teknologi informasi.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN BPBD KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan kondisi umum, potensi, posisi organisasi serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I dan Bab II, maka BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang berupaya dalam penanggulangan bencana daerah dituntut untuk tanggap dan reaktif dalam upaya-upaya penanggulangan bencana.

Berkenaan dengan itu maka disusun Tujuan dan Sasaran BPBD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Dalam kaitan ini BPBD Kabupaten Sidoarjo melihat dan menganalisa bahwa dalam rangka menunjang Visi Misi Kepala Daerah diimplementasikan dengan kesesuaian pada Misi ke 4 (Lima) dengan arah Tujuan ke 4 (empat) dan Sasaran ke 7 (tujuh) dari Visi Misi Kabupaten Sidoarjo, seperti ditunjukkan pada tabel berikut .

Misi 4 : Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul Karimah, berlandasan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban

Yang dirangkum dalam tabel keterkaitan Tujuan sebagai berikut.

Tabel 25. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan BPBD	Sasaran BPBD
Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan	Meningkatnya kapasitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo	Peningkatan Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana sesuai SPM

Lebih lanjut, Tujuan dan Sasaran untuk jangka menengah BPBD Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Tujuan, Sasaran, IKU dan Target Capaian Tahun 2016-2021
BPBD Kabupaten Sidoarjo

TUJUAN BPBD	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	KONDISI AWAL (2016)	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR	STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN
							2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatnya kapasitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sidoarjo	Tingkat penurunan poin / nilai Indeks Resiko Bencana	Peningkatan Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana sesuai SPM	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo)	Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (:) Jumlah kejadian kebakaran x 100%	39.51%	40%	45%	50%	55%	60%	60%	Penambahan pos Damkar, personil dan sarana prasarana
				Persentase Penurunan Indeks Resiko Bencana	Jumlah indikator Indeks Resiko Bencana yang tercapai (:) Jumlah indikator Indeks Resiko Bencana x 100% *terdapat 71 indikator untuk mengukur Indeks Resiko Bencana	149,6	6%	6%	6%	6%	6%	30%	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana sebagai upaya Penurunan Indeks Resiko Bencana

Merujuk pada tabel diatas, pada hakikatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat pusat dan daerah, jika berpedoman pada dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana 2015-2019 adalah menurunkan indeks risiko bencana. Penurunan indeks risiko tersebut sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya yaitu komponen bahaya, komponen kerentanan dan komponen kapasitas. Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, maka indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Pengaruh masing-masing komponen (bobot) dalam penentuan indeks risiko bencana adalah komponen bahaya 40%, komponen kerentanan 30% dan komponen kapasitas 30%. Jadi berdasarkan pengaruh dari ketiga komponen penyusun indeks risiko bencana, maka komponen kerentanan berupa *coping capacities* dan kapasitas merupakan komponen yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk menurunkan indeks risiko bencana. Berdasarkan uraian pengaruh masing-masing komponen dalam penurunan indeks risiko bencana, maka ***target utama dalam penurunan indeks risiko bencana adalah komponen coping capacities dan kapasitas sebesar 30% selama 5 tahun (2015-2019).*** Sehingga strategi penurunan indeks risiko bencana adalah dengan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Target indeks risiko nasional rata-rata turun sebesar 46.9 menjadi 109.4 (SEDANG) dari baseline 156.3 (TINGGI), sedangkan target indeks risiko rata-rata prioritas nasional turun sebesar 50.8 menjadi 118.6 (SEDANG) dari baseline 169.4 (TINGGI) ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 26. Target Penurunan Indeks Resiko Bencana Nasional

NO.	TINGKAT	JUMLAH KAB/ KOTA	INDEKS RATA-RATA (BASELINE 2013)	TARGET PENURUNAN INDEKS (30%)	TAHUN					TARGET INDEKS (TAHUN 2019)
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	NASIONAL	497	156.3	46.9	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	109.4
2	KAB/KOTA PRIORITAS NASIONAL	136	169.4	50.8	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	118.6

Dari uraian diatas serta memperhatikan IKU terdahulu, namun tetap dengan uraian sasaran strategis yakni terlaksananya peningkatan sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta penurunan indeks risiko bencana di Kabupaten Sidoarjo,maka IKU yang akan digunakan disesuaikan dengan adanya perubahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kebencanaan, yang menekankan kegiatan pelayanan publik kebencanaan ke dalam 3 (Tiga) cakupan kegiatan sebagai berikut.

1. **Cakupan layanan informasi rawan bencana**, yang dirumuskan :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk di Desa/Kelurahan Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai jenis bencana}}{\text{Jumlah Penduduk di Desa/Kelurahan Rawan Bencana sesuai jenis bencana}} \text{ X 100 \%}$$

2. **Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan**, yang dirumuskan :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk terpapar di Desa/Kelurahan yang mendapatkan akses sarpras pencegahan dan kesiapsiagaan}}{\text{Jumlah penduduk terpapar di Desa yang rawan bencana tertentu)}} \text{ X 100 \%}$$

3. **Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**, dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Korban Yang Selamat dan Dievakuasi}}{\text{Jumlah Korban Terdampak Bencana}} \text{ X 100 \%}$$

Di mana Standar Pelayanan Minimal tersebut diatas juga sesuai dengan arah kebijakan nasional yang tersurat dalam Renas PB 2015-2019 yang menegaskan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana secara efektif efisien, yang didukung dengan ***meningkatnya kesadaran, kesiapan, dan kemampuan aparat pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah dan kelembagaan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan para pemangku kepentingan.*** Secara konseptual, IKU diatas merupakan penjabaran dari PRBBK atau Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas atau dikenal dengan istilah CBDRM *(Community-Based Disaster Risk Management)*, yang merupakan upaya pemberdayaan komunitas agar dapat mengelola bencana dengan tingkat

keterlibatan pihak/kelompok masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk terlibat secara aktif dan partisipatif dalam menanggulangi ancaman dan bencana di daerah / wilayahnya yang dapat dilaksanakan atau diimplementasikan secara mandiri oleh stakeholder atau pemangku kepentingan setempat. Makna community atau komunitas dalam pengertian diatas, pada dasarnya merujuk pada pemahaman bahwa pekerjaan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh dan bersama dengan komunitas di mana mereka berperan kunci dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan evaluasi. Disepakati bahwa dalam pendekatan ini ***komunitas adalah pelaku utama yang membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan penting sehubungan dengan penanggulangan bencana.*** Adapun beberapa kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas baik dalam lingkup pengertian terlatih atau tangguh dalam penanggulangan bencana, antara lain sebagai berikut :

- Sosialisasi Penanggulangan Bencana
- Pelatihan Penanggulangan Bencana
- Pembentukan Tim Relawan Lokal
- Inisiasi Sekolah Siaga Bencana
- Inisiasi Program Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana
- Bantuan Pembuatan Peta Rawan Bencana
- Koordinasi Dengan TNI/Polri Setempat
- Dukungan Personil Tim Reaksi Cepat (TRC)
- Dukungan Peralatan Saat Bencana
- Pembuatan Rencana Kedaruratan
- Simulasi Saat Keadaan Darurat Bencana
- Rencana Penetapan POSKO Saat Bencana
- Penetapan Zonasi Kawasan Rawan Bencana
- Pembuatan Jalur & Rambu Evakuasi
- Penetapan Jalur & Lokasi Titik Kumpul
- Penetapan Tempat Evakuasi Sementara
- Dukungan Peraturan Penanggulangan Bencana pada Tingkat Lokal
- Dukungan Anggaran dan Progam Penanggulangan Bencana
- Kemitraan Dengan LSM / NGO Untuk Penanggulangan Bencana

❖ Kemitraan Dengan PT / Universitasuntuk Penanggulangan Bencana, dll

Dalam rangka mewujudkan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan suatu rencana penanggulangan bencana yang berkualitas serta kebijakan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Strategi dan Arah kebijakan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, pada dasarnya tidak terlepas dari hasil pemetaan (*mapping)* dan analisis lingkungan organisasi itu sendiri. Seperti pada uraian bab sebelumnya, hasil analisis dan mapping BPBD Kabupaten Sidoarjo, yang diasumsikan berada pada kuadran Stabil (*Stability Quadrant*)., berarti bahwa penentuan arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi BPBD Kabupaten Sidoarjo. Untuk arah kebijakan dan strategi yang dipilih dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Strategi dan Arah Kebijakan serta Program yang ditetapkan dan dipilih adalah yang sesuai dengan posisi organisasi. Karena hasil pemetaan dan analisis menempatkan BPBD Kabupaten Sidoarjo pada kuadran Stabilitas,
b) Strategi dan Arah Kebijakan sebagai OPD relatif baru, bersifat penataan, perbaikan, revisi, penguatan, koordinasi dan rekonstruksi (*Maintenance*), serta
c) Strategi dan Arah kebijakan dapat dilaksanakan dengan membagi ke dalam 2 (dua) sub strategi, yakni :
    1) Secara selektif (*Selective Maintenance*), dan
    2) Secara Cepat (*Agresive Maintenance*), berdasarkan prioritas dan potensi sumberdaya dimiliki BPBD Kabupaten Sidoarjo. Di mana, strategi dan arah kebijakan tersebut dapat sekaligus dijalankan, baik dalam kegiatan penanggulangan bencana maupun dalam upaya penataan dan penguatan kelembagaan (*institutional empowering*) dan Sinergitas antar lembaga.

Tabel 27. Matriks Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kapasitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo	Peningkatan Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana sesuai SPM	Penambahan pos Damkar, personil dan sarana prasarana	Melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait penambahan pos damkar baru, pengadaan sarpra Damkar
		Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Mengadakan Pelatihan / Bimbingan Teknis atau Pengiriman Peserta Pelatihan / Bimbingan Teknis
		Peningkatan sarana prasarana PB	Pengadaan Sarana Prasarana Kebencanaan
		Peningkatan kapasitas SDM kelompok/komunitas tanggap bencana melalui pelatihan, pembinaan, bimtek, sosialisasi	Peningkatan kapasitas SDM kelompok/komunitas tanggap bencana melalui pelatihan, pembinaan, bimtek, sosialisasi
		Penguatan SDM relawan, percepatan penyusunan dokumen kaji cepat	Penambahan personil relawan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarpra pasca bencana

4.2. Daerah / Kecamatan Rawan Bencana di Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan kajian risiko bencana terhadap daerah / kecamatan rawan di Kabupaten Sidoarjo yang bersumber dari Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Sidoarjo 2015-2019, dapat diperoleh gambaran sejumlah daerah /

kecamatan rawan bencana sebagaiman terlihat dalam uraian dan matriks tabel berikut :

Tabel 28. Resiko Bencana Jawa Timur

Provinsi	Kabupaten/ Kota Prioritas	Indeks Risiko	Tingkat Risiko	Struktur Ruang
JAWA TIMUR	Malang	219.2	TINGGI	PKN
JAWA TIMUR	Gresik	175.2	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
JAWA TIMUR	Bangkalan	164.4	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
JAWA TIMUR	Kota Surabaya	166.8	TINGGI	PKN Gerbangkertasusila
JAWA TIMUR	Sidoarjo	149.6	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
JAWA TIMUR	Lamongan	174	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
JAWA TIMUR	Bojonegoro	150	TINGGI	PKW
JAWA TIMUR	Pacitan	215.2	TINGGI	PKW
JAWA TIMUR	Banyuwangi	219.2	TINGGI	PKW
JAWA TIMUR	Jember	219.2	TINGGI	PKW

*Sumber : Direktorat PRB, BNPB

Tabel 29. Penentuan Bobot Bahaya, Kerentanan dan Kapasitas per Jenis Bahaya

No.	Parameter	Kelas	Bobot	Skor (Kelas x Bobot)	Nilai	No.	Parameter	Kelas	Bobot	Skor (Kelas x Bobot)	Nilai
1	Gempa Bumi	1	4	4	100%	6	Kekeringan	1	4	4	100%
		2		8				2		8	
		3		12				3		12	
2	Semburan Lumpur Sidoarjo	1	4	4		7	Kebakaran Gedung & Permukiman	1	4	4	
		2		8				2		8	
		3		12				3		12	
3	Pencemaran Limbah Industri	1	3	3		8	Cuaca Ekstrim	1	4	4	
		2		6				2		8	
		3		9				3		12	
4	Banjir	1	4	4		9	Gelombang Ekstrim/ Abrasi	1	4	4	
		2		8				2		8	
		3		12				3		12	
5	Tanah Longsor	1	5	5		10	Konflik Sosial	1	4	4	
		2		10				2		8	
		3		15				3		12	

No.	Parameter	Kelas	Bobot	Skor (Kelas x Bobot)	Nilai	No.	Parameter	Kelas	Bobot	Skor (Kelas x Bobot)	Nilai
1. Jiwa Terpapar (per km2)											
1	Gempa Bumi	1	0.4	0.4	< 500	6	Kekeringan	1	0.4	0.4	< 500
		2		0.8	500 – 1000			2		0.8	500 - 1000
		3		1.2	> 1000			3		1.2	> 1000
2	Semburan Lumpur Sidoarjo	1	0.4	0.4	< 500	7	Kebakaran Gedung & Permukiman	1	0.3	0.3	< 500
		2		0.8	500 – 1000			2		0.6	500 - 1000
		3		1.2	> 1000			3		0.9	> 1000
3	Pencemaran Limbah Industri	1	0.4	0.4	< 500	8	Cuaca Ekstrim	1	0.4	0.4	< 500
		2		0.8	500 – 1000			2		0.8	500 - 1000
		3		1.2	> 1000			3		1.2	> 1000
4	Banjir	1	0.4	0.4	< 500	9	Gelombang Ekstrim/ Abrasi	1	0.4	0.4	< 500
		2		0.8	500 – 1000			2		0.8	500 - 1000
		3		1.2	> 1000			3		1.2	> 1000
5	Tanah Longsor	1	0.4	0.4	< 500	10	Konflik Sosial	1	0.4	0.4	< 500
		2		0.8	500 – 1000			2		0.8	500 - 1000
		3		1.2	> 1000			3		1.2	> 1000

No.	Parameter	Kelas	Bobot	Skor (Kelas x Bobot)	Nilai	No.	Parameter	Kelas	Bobot	Skor (Kelas x Bobot)	Nilai
2. Kerugian (Milyar Rupiah)											
1	Gempa Bumi	1	60%	0.6	< 1,55	6	Kekeringan	1	30%	0.3	< 1,55
		2		1.2	1,55 - 3,30			2		0.6	1,55 - 3,30
		3		1.8	> 3,30			3		0.9	> 3,30
2	Semburan Lumpur Sidoarjo	1	50%	0.5	< 1,55	7	Kebakaran Gedung & Permukiman	1	30%	0.3	< 1,50
		2		1	1,55 - 3,30			2		0.6	1,55 - 3,10
		3		1.5	> 3,30			3		0.9	> 3,10
3	Pencemaran Limbah Industri	1	50%	0.5	< 1,55	8	Cuaca Ekstrim	1	60%	0.6	< 1,55
		2		1	1,55 - 3,30			2		1.2	1,55 - 3,30
		3		1.5	> 3,30			3		1.8	> 3,30
4	Banjir	1	50%	0.5	< 1,55	9	Gelombang Ekstrim/ Abrasi	1	50%	0.5	< 1,55
		2		1	1,55 - 3,30			2		1	1,55 - 3,30
		3		1.5	> 3,30			3		1.5	> 3,30
5	Tanah Longsor	1	50%	0.5	< 1,55	10	Konflik Sosial	1	50%	0.5	< 1,55
		2		1	1,55 - 3,30			2		1	1,55 - 3,30
		3		1.5	> 3,30			3		1.5	> 3,30

No.	Parameter	Kelas	Bobot	Skor (Kelas x Bobot)	Nilai	No.	Parameter	Kelas	Bobot	Skor (Kelas x Bobot)	Nilai
3. Kerusakan Lingkungan (Ha)											
1	Gempa Bumi	1	0%	0	0	5	Tanah Longsor	1	10%	0.1	< 65
		2		0	0			2		0.2	65 - 185
		3		0	0			3		0.3	> 185
2	Semburan Lumpur Sidoarjo	1	10%	0.1	< 55	6	Kekeringan	1	30%	0.3	< 65
		2		0.2	55 – 155			2		0.6	65 - 185
		3		0.3	> 155			3		0.9	> 185
3	Pencemaran Limbah Industri	1	10%	0.1	< 55	7	Kebakaran Gedung & Permukiman	1	40%	0.4	< 65
		2		0.2	55 – 155			2		0.8	65 - 185
		3		0.3	> 155			3		1.2	> 185
4	Banjir	1	10%	0.1	< 70	8	Cuaca Ekstrim	1	0%	0	0
		2		0.2	70 – 205			2		0	0
		3		0.3	> 205			3		0	0
5	Tanah Longsor	1	10%	0.1	< 65	9	Gelombang Ekstrim/ Abrasi	1	10%	0.1	< 70
		2		0.2	65 – 185			2		0.2	55 - 205
		3		0.3	> 185			3		0.3	> 205
6	Kekeringan	1	30%	0.3	< 65	10	Konflik Sosial	1	10%	0.1	< 70
		2		0.6	65 – 185			2		0.2	55 - 205
		3		0.9	> 185			3		0.3	> 205

C. Kapasitas (C)					
1	Kapasitas Daerah	1	100%	1	< 55
		2		2	55 - 85
		3		3	85

D. Indeks Risiko (R=H x V/C)

No.	Parameter	C = 1	C = 2	C = 3	Indeks Risiko	No.	Parameter	C = 1	C = 2	C = 3	Indeks Risiko
1	Gempa Bumi	4	2	1.33	Rendah	6	Kekeringan	4	2	1.33	Rendah
		16	8	5.33	Sedang			16	8	5.33	Sedang
		36	18	12	Tinggi			36	18	12	Tinggi
2	Semburan Lumpur Sidoarjo	4	2	1.33	Rendah	7	Kebakaran Gedung dan Permukiman	4	2	1.33	Rendah
		16	8	5.33	Sedang			16	8	5.33	Sedang
		36	18	12	Tinggi			36	18	12	Tinggi
3	Pencemaran Limbah Industri	3	1.5	1	Rendah	8	Cuaca Ekstrim	4	2	1.33	Rendah
		12	6	4	Sedang			16	8	5.33	Sedang
		27	13.5	9	Tinggi			36	18	12	Tinggi
4	Banjir	4	2	1.33	Rendah	9	Gelombang Ekstrim/ Abrasi	4	2	1.33	Rendah
		16	8	5.33	Sedang			16	8	5.33	Sedang
		36	18	12	Tinggi			36	18	12	Tinggi
5	Tanah Longsor	5	2.5	1.67	Rendah	10	Konflik Sosial	4	2	1.33	Rendah
		20	10	6.67	Sedang			16	8	5.33	Sedang
		45	22.5	15	Tinggi			36	18	12	Tinggi

Pembahasan penilaian resiko bencana dilakukan secara sistematis per komponen per ancaman bencana, dimulai dari ancaman bencana yang berturut-turut memiliki skor ancaman tertinggi kemudian disusul hingga ancaman yang lebih rendah dan berakhir dengan skor terendah. Adapun hasil penilaian atau skoring risiko bencana dapat disimak selengkapnya untuk 10 (sepuluh) ancaman bencana sebagai berikut.

1. **Indeks Risiko Bencana per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo**

	ANCAMAN BENCANA	KAPASITAS DAERAH	Gempa Bumi		Lumpur Sidoarjo		Limbah Industri		Banjir		Tanah Longsor	
	Nama Kecamatan		SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS
1	Kecamatan Tarik	2	6	SEDANG	0	RENDAH	4	SEDANG	12	SEDANG	15	SEDANG
2	Kecamatan Balongbendo	2	6	SEDANG	0	RENDAH	12	SEDANG	18	TINGGI	15	SEDANG
3	Kecamatan Prambon	2	6	SEDANG	0	RENDAH	4	SEDANG	12	SEDANG	0	RENDAH
4	Kecamatan Tanggulangin	2	6	SEDANG	22.5	TINGGI	18	TINGGI	18	TINGGI	0	RENDAH
5	Kecamatan Krian	2	6	SEDANG	0	RENDAH	12	SEDANG	18	TINGGI	15	SEDANG
6	Kecamatan Wonoayu	2	6	SEDANG	0	RENDAH	8	SEDANG	12	SEDANG	0	RENDAH
7	Kecamatan Tulangan	2	6	SEDANG	0	RENDAH	8	SEDANG	18	TINGGI	0	RENDAH
8	Kecamatan Taman	2	6	SEDANG	0	RENDAH	12	SEDANG	18	TINGGI	0	RENDAH
9	Kecamatan Sidoarjo	2	6	SEDANG	0	RENDAH	18	TINGGI	18	TINGGI	0	RENDAH
10	Kecamatan Candi	2	6	SEDANG	0	RENDAH	18	TINGGI	18	TINGGI	0	RENDAH
11	Kecamatan Sukodono	2	6	SEDANG	0	RENDAH	4	SEDANG	18	TINGGI	0	RENDAH
12	Kecamatan Buduran	2	6	SEDANG	0	RENDAH	18	TINGGI	8	SEDANG	0	RENDAH
13	Kecamatan Krembung	2	6	SEDANG	0	RENDAH	4	SEDANG	8	SEDANG	0	RENDAH

	ANCAMAN BENCANA	KAPASITAS DAERAH	Gempa Bumi		Lumpur Sidoarjo		Limbah Industri		Banjir		Tanah Longsor	
	Nama Kecamatan		SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS
14	Kecamatan Gedangan	2	6	SEDANG	0	RENDAH	12	SEDANG	8	SEDANG	0	RENDAH
15	Kecamatan Porong	2	6	SEDANG	22.5	TINGGI	12	SEDANG	18	TINGGI	0	RENDAH
16	Kecamatan Jabon	2	5.2	SEDANG	19.5	TINGGI	10.4	SEDANG	12.6	SEDANG	0	RENDAH
17	Kecamatan Waru	2	6	SEDANG	0	RENDAH	18	TINGGI	12	SEDANG	0	RENDAH
18	Kecamatan Sedati	2	6	SEDANG	0	RENDAH	6	SEDANG	12	SEDANG	0	RENDAH

Sumber: Hasil Kajian/ Studi, 2016

2. Indeks Risiko Bencana per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Lanjutan)

	ANCAMAN BENCANA	KAPASITAS DAERAH	Kekeringan		Kebakaran Gedung/ Permukiman		Cuaca Ekstrim (Putting Beliung)		Gelombang Ekstrim/ Abrasi		Konflik Sosial	
No	**Nama Kecamatan**		SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS
1	Kecamatan Tarik	2	4.8	SEDANG	6	SEDANG	18	TINGGI	0	RENDAH	0	RENDAH
2	Kecamatan Balongbendo	2	4.8	SEDANG	18	TINGGI	18	TINGGI	0	RENDAH	0	RENDAH
3	Kecamatan Prambon	2	14.4	SEDANG	6	SEDANG	18	TINGGI	0	RENDAH	0	RENDAH
4	Kecamatan Tanggulangin	2	14.4	SEDANG	18	TINGGI	18	TINGGI	0	RENDAH	5.4	SEDANG
5	Kecamatan Krian	2	14.4	SEDANG	18	TINGGI	18	TINGGI	0	RENDAH	0	RENDAH

	ANCAMAN BENCANA	KAPASITAS DAERAH	Kekeringan		Kebakaran Gedung/ Permukiman		Cuaca Ekstrim (Putting Beliung)		Gelombang Ekstrim/ Abrasi		Konflik Sosial	
No	**Nama Kecamatan**		SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS
6	Kecamatan Wonoayu	2	14.4	SEDANG	12	SEDANG	18	TINGGI	0	RENDAH	0	RENDAH
7	Kecamatan Tulangan	2	14.4	SEDANG	18	TINGGI	18	TINGGI	0	RENDAH	0	RENDAH
8	Kecamatan Taman	2	10.8	SEDANG	18	TINGGI	10.8	SEDANG	0	RENDAH	0	RENDAH
9	Kecamatan Sidoarjo	2	10.8	SEDANG	18	TINGGI	7.2	SEDANG	12	SEDANG	5.4	SEDANG
10	Kecamatan Candi	2	14.4	SEDANG	18	TINGGI	18	TINGGI	0	RENDAH	2.4	SEDANG
11	Kecamatan Sukodono	2	8.4	SEDANG	18	TINGGI	9.6	SEDANG	0	RENDAH	0	RENDAH
12	Kecamatan Buduran	2	3.6	SEDANG	18	TINGGI	7.2	SEDANG	12	SEDANG	5.4	SEDANG
13	Kecamatan Krembung	2	12.6	SEDANG	12	SEDANG	9.6	SEDANG	0	RENDAH	0	RENDAH
14	Kecamatan Gedangan	2	4.2	SEDANG	18	TINGGI	9.6	SEDANG	0	RENDAH	0	RENDAH
15	Kecamatan Porong	2	9.6	SEDANG	18	TINGGI	18	TINGGI	0	RENDAH	2.4	SEDANG
16	Kecamatan Jabon	2	10.2	SEDANG	16.2	SEDANG	18	TINGGI	15.6	SEDANG	4.6	SEDANG
17	Kecamatan Waru	2	10.8	SEDANG	18	TINGGI	10.8	SEDANG	0	RENDAH	2.4	SEDANG
18	Kecamatan Sedati	2	3.6	SEDANG	18	TINGGI	18	TINGGI	18	TINGGI	5.4	SEDANG

Sumber: Hasil Kajian/ Studi, ***2016***

3. ANCAMAN

Penilaian/ skoring terhadap komponen Ancaman (*Hazard*) 10 (sepuluh) bencana 18 kecamatan diuraikan dalam Tabel berikut:

Skoring/ Penilaian Ancaman Bencana 18 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

ANCAMAN		Gempa Bumi	Lumpur Sidoarjo	Limbah Industri	Banjir	Tanah Longsor	Kekeringan	Kebakaran Gedung/ Permukiman	Cuaca Ekstrim Puting Beliung	Gelombang Ekstrim/ Abrasi	Konflik Sosial
No	Nama Kecamatan	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR
1	Kecamatan Tarik	4		8	8	10	4	4	8		4
2	Kecamatan Balongbendo	4		8	12	10	4	12	8		4
3	Kecamatan Prambon	4		8	8		12	4	12		4
4	Kecamatan Tanggulangin	4	15	12	12		12	12	12		4
5	Kecamatan Krian	4		8	12	10	12	12	12		4
6	Kecamatan Wonoayu	4		8	8		12	8	12		4
7	Kecamatan Tulangan	4		8	8		12	12	12		4
8	Kecamatan Taman	4		12	12		12	12	12		4
9	Kecamatan Sidoarjo	4		12	12		12	12	8	8	4
10	Kecamatan Candi	4	10	12	12		12	12	8		4
11	Kecamatan Sukodono	4		8	12		8	12	12		4
12	Kecamatan Buduran	4		8	8		4	12	8	8	4
13	Kecamatan Krembung	4		8	8		12	8	8		4
14	Kecamatan Gedangan	4		12	8		4	12	12		4
15	Kecamatan Porong	4	15	8	12		8	12	8		12

ANCAMAN		Gempa Bumi	Lumpur Sidoarjo	Limbah Industri	Banjir	Tanah Longsor	Kekeringan	Kebakaran Gedung/ Permukiman	Cuaca Ekstrim Puting Beliung	Gelombang Ekstrim/ Abrasi	Konflik Sosial
No	Nama Kecamatan	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR	SKOR
16	Kecamatan Jabon	4	15	8	12		12	12	12	12	12
17	Kecamatan Waru	4		12	12		12	12	12		4
18	Kecamatan Sedati	4		12	12		4	12	12	12	4

Sumber: Hasil Kajian/ Studi, 2016

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. DESKRIPSI KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tangap darurat, dan rehabilitasi, serta rekonstruksi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 antara lain disebutkan bahwa pengertian tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, adalah merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lebih lanjut, pengertian tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
2. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
3. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
4. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (mitigasi struktural) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (miitigasi non struktural)
5. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta

benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
7. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

5.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, BPBD menetapkan program-programnya sesuai RPJMD periode 2016-2021, yaitu :

1) **Program utama (teknis).**

   Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama BPBD dalam proses kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana

2) **Program pendukung (generik)**

   Program ini juga digunakan oleh semua OPD baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua OPD), maka program tersebut tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), peran dan kewenangan.

BPBD sebagai lembaga penanggulangan bencana, juga berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan program kegiatan dengan kaidah perencanaan sesuai ketentuan dan peraturan agar dapat diukur kinerjanya sesuai sasaran yang telah ditetapkan, dengan menetapkan indikator-indikator tertentu yang dapat membantu di dalam pengukuran kinerja.Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Utama (Teknis):
   a. Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran;
   b. Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan , Tanggap Darurat dan Manajemen Logistik Kebencanaan;
   c. Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
2) Program Pendukung (generik).
   a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
   b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
   c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
   d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
   e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (**input**) untuk menghasilkan keluaran (**output**) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan programtersebut diatas BPBD Kabupaten Sidoarjo, dalam upayamencapai sasaranprogram melakukan beberapa kegiatan, yang disusun sebagai berikut.

1) Program Utama (teknis);

a. Program Peningkatan Kesiagaan,Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran, dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penyusunan Pedoman Pencegahan Bahaya Kebakaran;
2. Kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran;
3. Kegiatan Pembinaan SDM PMK
4. Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.
5. Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran.
6. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran.

b. Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan Manajemen Logistik Kebencanaan, dengan bentuk kegiatan antara lain :

1. Kegiatan penyusunan database dan informasi potensi bencana
   - ❖ Sub Kegiatan pengembangan teknologi informasi peringatan dini
2. Penyusunan kebijakan, pembinaan dan monev pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana
   - ❖ Edukasi tentang isu-isu kerusakan lingkungan dan API (Adaptasi perubahan iklim)
   - ❖ Edukasi terkait dengan pelestarian lingkungan
   - ❖ Sosialisasi perbaikan lingkungan (komunitas)
   - ❖ Identifikasi dan pengenalan jenis-jenis bencana berbasis komunitas
   - ❖ Edukasi sejarah kejadian bencana di tempat rawan bencana
   - ❖ Identifikasi lokasi rawan bencana sesuai ancaman (update IRBI)
   - ❖ Identifikasi dukungan infrastruktur di daerah rawan bencana yang berada di wilayah pertumbuhan ekonomi domestik
   - ❖ Kajian terhadap struktur bangunan di daerah rawan bencana
   - ❖ Penyusunan desain bangunan /gedung tahan bencana di daerah rawan bencana
   - ❖ Review kebijakan tata ruang yang berbasis PRB
   - ❖ Kajian potensi terhadap asuransi bencana di daerah rawan bencana
   - ❖ Kajian peraturan kelembagaan dan organisasi penanggulangan bencana di level kabupaten

- ❖ Kajian sinergitas skema pendanaan / pembiayaan antar stakeholder dalam kegiatan penanggulangan bencana
- ❖ Pembinaan relawan dan cluster / potensinya
- ❖ Penyusunan renkon
- ❖ Pelaksanaan gladi dan simulasi penanggulangan bencana (TTX)
- ❖ Mekanisme koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam tahap siaga bencana (SOP)
- ❖ Pelaksanaan kegiatan MOSIPENA (mobil edukasi PB)
- ❖ Implementasi / simulasi renkon (rencana operasi)

3. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bencana
4. Koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dan manajemen logistik kebencanaan
5. Kegiatan Operasional tanggap darurat dan manajemen logistik kebencanaan
   - ❖ Evakuasi dan keposkoan
   - ❖ Manajemen dan distribusi logistik
   - ❖ Alokasi pendanaan dalam tanggap darurat
   - ❖ Pemetaan zonasi daerah terdampak / rawan bencana
   - ❖ Pemetaan dan pemasangan jalur-jalur dan rambu evakuasi
   - ❖ Identifikasi pemanfaatan ruang / gedung untuk shelter / TES
   - ❖ Kaji Cepat (TRC)
   - ❖ Penetapan SK Darurat
   - ❖ Manajemen kepengungsian
   - ❖ Pelaksanaan repatriasi (pemulangan kembali) dan relokasi
   - ❖ Pelaksanaan pendampingan dalam masa transisi
6. Pengadaan logistik penanggulangan bencana
   - ❖ Layanan kebutuhan dasar bagi para pengungsi
   - ❖ Pelaksanaan bantuan darurat di wilayah terdampak (*early recovery*)

c. Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

1. Penyiapan sumber daya untuk rehabilitasi pasca bencana
   - ❖ Pelaksanaan kajian A2R2 (Assessment Awal Rehabilitasi Rekonstruksi)

- ❖ Pelatihan Penyusunan PDNA
- ❖ Pelatihan Penyusunan DALA
- ❖ Pelatihan Penyusunan HRNA
- ❖ Pelatihan Penyusunan JITUPASNA
- ❖ Pelatihan pengelolaan dan penggunaan tehnologi IT pada sistem informasi pasca bencana
- ❖ penyusunan aturan dan norma pada pasca bencana
- ❖ peningkatan partisipasi masyarakat kelompok rentan dan gender dalam penanganan rehabilitasi pascabencana
- ❖ peningkatan sarana prasarana pendukung kegiatan pasca bencana

2. Pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana
   - ❖ pelaksanaan rehabilitasi lingkungan daerah pasca bencana
   - ❖ Pelaksanaan rehabilitasi Prasarana dan Sarana Umum
   - ❖ Pelaksanaan rehabilitasi Sosial Ekonomi dan Budaya
   - ❖ Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Psikologi
3. Pelaksanaan Rekonstruksi Pasca Bencana
   - ❖ Pelaksanaan rekonstruksi pascabencana
4. Penyusunan laporan pasca bencana
   - ❖ Penyusunan sistem informasi pascabencana dengan menggunakan IT
   - ❖ penyusunan dan pendampingan JITU PASNA
   - ❖ Penyusunan dan pendampingan PDNA
   - ❖ penyusunan dan pendampingan rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
   - ❖ penyusunan Laporan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana
5. Koordinasi pemulihan pasca bencana
   - ❖ Kegiatan Workshop kebencanaan
   - ❖ kegiatan monitoring dan evaluasi kerusakan dan kerugian akibar bencana dan kebakaran
   - ❖ sosialisasi data/ informasi pengkajian kebutuhan pascabencana
   - ❖ sosialisasi panduan dan terapan pada pasca bencana

d. Program Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) Bencana Kabupaten Sidoarjo
   1. Penyusunan kebijakan dalam kapasitas penanggulangan bencana terkait dengan peran serta SOPD dalam tanggap darurat bencana
   2. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media peringatan dini bencana banjir dan puting beliung;
   3. Peningkatan kesiapsiagaan di tingkat kelompok / komunitas (Desa tangguh bencana, Sekolah Aman Bencana, dsb)
   4. Peningkatan sinergi dan koordinasi multipihak dalam kesiapsiagaan bencana seperti Forum PRB dan Jaringan Relawan
   5. Meningkatkan kapasitas stakeholderpenanganan bencana terkait adaptasi perubahan iklim dan ketangguhan
   6. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lintas OPD dalam upaya penanggulangan bencana dan pencegahan kebakaran

2) Program Pendukung (generik).

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   1. Penyediaan jasa surat menyurat
   2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
   5. Penyediaan alat tulis kantor
   6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
   8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   9. Penyediaan bahan logistik kantor
   10. Penyediaan makanan dan minuman
   11. Rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam
   12. Penyediaan jasa administrasi keuangan

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   1. Pembangunan gedung kantor
   2. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
4. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
5. Pengadaan meubeleur
6. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
8. Pemeliharaan rutin/ berkala

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
   2. Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   1. Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Kebencanaan
   2. Pendidikan dan Pelatihan non Formal

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
   1. Penyusunan Laporan keuangan
   2. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja OPD

Tabel 30.Program Utama (Teknis) dan Program Pendukung beserta Pendanaan

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET S.D. AKHIR TAHUN RENSTRA	2017	Rp.	2018	Rp.	2019	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp.	KONDISI AKHIR
Meningkatnya penyelenggaraan kesiapsiagaan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran	**Program Peningkatan kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran**	**- Persentase wilayah Kabupaten yang sudah mempunyai pos PMK - Persentase satuan petugas PMK yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi - Persentase mobil PMK dengan kondisi layak fungsi**	**- 45% - 60% - 70%**	**- 28% - 35% - 50%**	**7,244,848,000**	**- 30% - 50% - 55,56%**	**7,399,297,500**	**- 35% - 20% - 60%**	**8,139,227,250**	**- 40% - 25% - 65%**	**8,953,149,975**	**- 45% - 30% - 70%**	**9,848,464,973**	**- 45% - 60% - 70%**
Tersusunnya dokumen pedoman pencegahan bahaya kebakaran	Penyusunan pedoman pencegahan bahaya kebakaran	- Jumlah pedoman pencegahan / penanggulangan bahaya kebakaran yang tersusun	4 dokumen	- 1 dok -500 orang	301,750,000	2 dok	75,000,000	0 dok	82,500,000	1 dok	90,750,000	1 dok	99,825,000	4 dokumen

Terlaksananya rekruitmen dan pembinaan SDM PMK	Pengadaan dan Pembinaan SDM PMK	- Jumlah petugas PMK yang terlatih - Jumlah tenaga harian lepas yang direkrut - Jumlah THL pemadam kebakaran	- 12 orang - 66 orang - 207 orang	- 80 orang - 30 orang	3,197,005,000	- 0 orang - 6 orang - 117 orang	3,468,784,000	- 4 orang - 0 orang - 147 orang	3,815,662,400.00	- 4 orang - 30 orang - 177 orang	4,197,228,640.00	- 4 orang - 30 orang - 207 orang	4,616,951,504	- 12 orang - 66 orang - 207 orang
Terlaksananya pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	- Jumlah sarpras pencegahan bahaya kebakaran yang diadakan - Jumlah sarpras pencegahan bahaya kebakaran yang dipelihara - Jumlah sarpras pencegahan bahaya kebakaran yang direhabilitasi	- 36 unit - 45 unit - 6 gedung	- 2 unit - 10 unit -3 gedung	3,408,503,000	- 9 unit - 10 unit - 0 gedung	3,082,550,000	- 5 unit - 5 unit - 1 gedung	3,390,805,000.00	- 10 unit - 10 unit - 1 gedung	3,729,885,500.00	- 10 unit - 10 unit - 1 gedung	4,102,874,050	- 36 unit - 45 unit - 6 gedung
Tertanganinya kejadian kebakaran	Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah pengaduan kejadian kebakaran yang ditangani	1060 kali	214 kali	292,590,000	100%	366,125,000	100%	402,737,500.00	100%	443,011,250.00	100%	487,312,375	1060 kali
Terlaksananya pengawasan dan monev pasca kebakaran	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Jumlah Bangunan/Gedung yang dilakukan pemeriksaan berkala sistem proteksi	100%	- 100% - 50%	45,000,000	100%	268,988,500	100%	295,887,350.00	100%	325,476,085.00	100%	358,023,694	100%

		kebakaran												
Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Sosialisasi dan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah peserta sosialisasi	2000 orang	0	0	500 orang	137,850,000	500 orang	151,635,000.00	500 orang	166,798,500.00	500 orang	183,478,350	2000 orang
Meningkatnya penyelenggaraan pencegahan dini, kesiapsiagaan dan tanggap darurat dan manajemen logistik kebencanaan	**Program pencegahan dini, Kesiapsiagaan , tanggap darurat dan management logistik kebencanaan**	**a. Persentase pelayanan informasi rawan bencana; b. Jumlah peserta peningkatan kapasitas masyarakat/aparatur dalam bidang kebencanaan ; c. Persentase logistik kebencanaan yang tersalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan**	**a. 100% b. 500 orang c. 100%**	**a. 20% b. 500 orang c. 100%**	**1,646,650,000**	**a. 40% b. 500 orang c. 100%**	**1,905,323,000**	**a. 60% b. 500 orang c. 100%**	**2,326,385,000**	**a. 80% b. 500 orang c. 100%**	**2,559,023,500**	**a. 100% b. 500 orang c. 100%**	**2,814,925,850**	**a. 100% b. 500 orang c. 100%**
Tersedianya informasi dan data potensi/ancaman bencana	Penyusunan database dan informasi potensi bencana	a. Jumlah jenis informasi potensi bencana dan data potensi/ancaman bencana yang terupdate b. Jumlah masyarakat / aparatur yang	a. 15 jenis b. 500 orang	1 dok	224,750,000	a. 3 jenis b. 0	184,550,000	a. 4 jenis b. 0	260,000,000.00	a. 4 jenis b. 250 orang	280,000,000.00	a. 4 jenis b. 250 orang	308,000,000	a. 15 jenis b. 500 orang

		mendapatkan informasi rawan bencana												
Terselenggaranya koordinasi Penyusunan kebijakan, pembinaan dan monev pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana	Koordinasi Penyusunan kebijakan, pembinaan dan monev pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana	a. Jumlah dokumen penyelenggaraan bencana yang tersusun b. Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana	a. 4 dokumen b. 560 orang	- 1 dokumen - 150 orang - 100 kali - 30% - 30%	396,900,000	a. 0 dokumen b. 140 orang	280,773,000	a. 0 dokumen b. 140 orang	390,000,000.00	a. 2 dokumen b. 140 orang	415,000,000.00	a. 2 dokumen b. 140 orang	456,500,000	a. 4 dokumen b. 560 orang
Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bencana	a. Jumlah sarana prasaran kebencanaan yang diadakan b. Jumlah sarana prasaran kebencanaan yang dipelihara	a. 12 unit b. 16 unit	13 macam	170,000,000	a. 3 unit b. 4 unit	823,550,000	a. 3 unit b. 4 unit	823,550,000.00	a. 3 unit b. 4 unit	1,500,000,000.00	a. 3 unit b. 4 unit	1,650,000,000	a. 12 unit b. 16 unit
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dan management logistik kebencanaan	Koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dan management logistik kebencanaan	Jumlah peserta koordinasi pelaksanaan tanggap darurat	240 orang	- 1 laporan - 12 kali	150,000,000	60 orang	10,500,000	60 orang	40,000,000.00	60 orang	40,000,000.00	60 orang	44,000,000	240 orang

Terlaksananya Kegiatan Operasional tanggap darurat dan management logistik kebencanaan	Kegiatan Operasional tanggap darurat dan management logistik kebencanaan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan	100%	- 6 keg - 100%	390,000,000	100%	526,100,000	100%	725,000,000.00	100%	750,000,000.00	100%	825,000,000	100%
Tersalurkannya bantuan logistik korban bencana	Pengadaan Logistik penanggulangan bencana	Jumlah logistik yang disalurkan	4000 bungkus	500 paket	315,000,000	1000 bungkus	79,850,000	1000 bungkus	87,835,000.00	1000 bungkus	96,618,500.00	1000 bungkus	106,280,350	4000 bungkus
Percepatan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Sidoarjo	**Program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana**	**a. Persentase korban bencana yang terehabilitasi b. Persentase bantuan pasca bencana yang terealisasi berdasarkan laporan Jitupasna**	**a. 100% b. 100%**	**- 100% - 100%**	**439,800,000**	**a. 100% b. 100%**	**510,337,700**	**a. 100% b. 100%**	**372,111,740**	**a. 100% b. 100%**	**409,322,914**	**a. 100% b. 100%**	**450,255,205**	**a. 100% b. 100%**
Terlaksananya pembinaan / pelatihan relawan	Penyiapan sumberdaya untuk rehabilitasi Pasca bencana	Jumlah personil relawan yang dibina / dilatih	200 orang	40 orang	253,750,000	40 orang	21,916,500	40 orang	24,108,150.00	40 orang	26,518,965.00	40 orang	29,170,862	200 orang
Terlaksananya kegiatan rehabilitasi pasca bencana	Pelaksanaan rehabilitasi Pasca Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan trauma healing pasca bencana	100%	100%	88,750,000	100%	160,500,000	100%	176,550,000.00	100%	194,205,000.00	100%	213,625,500	100%
Tersusunnya laporan pasca bencana	Penyusunan Laporan pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang dilakukan Jitupasna	100%	1 laporan	97,300,000	100%	155,866,900	100%	171,453,590.00	100%	188,598,949.00	100%	207,458,844	100%
Terlaksananya koordinasi pemulihan	Koordinasi Pemulihan pasca bencana	Jumlah peserta rapat koordinasi	400 orang	4 kali	135,000,000	100 orang	32,460,000	100 orang	35,706,000.00	100 orang	39,276,600.00	100 orang	43,204,260	400 orang

pasca bencana		pasca bencana												
Terlaksananya kegiatan rekonstruksi pasca bencana	Pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah bahan baku bangunan yang disalurkan	100%	- 1 keg - 1 dok	5,000,000	100%	139,594,300	100%	153,553,730.00	100%	168,909,103.00	100%	185,800,013	100%

5.3. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Walaupun BPBD Kabupaten Sidoarjo tidak ditunjuk sebagai penanggung jawab atau pelaksana dari Program Prioritas Daerah, namun BPBD berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD dan Program 5 Tahun. Dukungan tersebut, harus tercemin dari kontribusi BPBD, berupa:

1. Hasil penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien demi terciptanya Kabupaten Sidoarjo yang aman dan nyaman;
2. Hasil pengembangan budaya sadar bencana dalam masyarakat ;
3. Hasil-hasil pelaksanaan tugas lain (penugasan khusus) dari Bupati/Pemerintah Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dan RKPD, yang menjadi tanggung jawab semua OPDdan akan ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing- masing OPDsesuai tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dan RKPD, diantaranya dapat diukur dari :

1. Persentase (%) pencapaian target/sasaran RPJMD 2016-2021; dan
2. Persentase (%) pencapaian target RKPD setiap tahun pada periode RPJMD.

5.4. PENDANAAN INDIKATIF

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi pendanaan yang tersedia, di mana alokasi pendanaan dirumuskan berdasarkan :

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab OPD.

Pendekatan kinerja program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran yang efektif dan efisienserta telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Unuk kerangka pengeluaran jangka menengah, terutama dalam pengambilan keputusan/keijakan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, harus mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasinya terhadap pendanaan pada tahun-tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Sedang perencanaan dan penganggaran terpadu, seagai alat pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, harus merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat,untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah secara akuntabilitas, dengan menetapkan Pagu Indikatif. Di mana, Pagu indikatif, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedang Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Penganggaran yang bersifat indikatif merupakan data dan informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, adalah merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel dan atau tidak kaku.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULNGAN BENCANA DAERAH (BPBD) YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD

1.1. KAIDAH INDIKATOR KINERJA

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran OPD BPBD yang sudah dirumuskan merupakan dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang akan berdampak kepada sistem penanggulangan bencana. Kebijakan program dan kegiatan dapat diukur dari hasil dari program dan keluaran kegiatan. Dengan demikian, untuk evaluasi dampak kebijakan berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan, diperlukan beberapa indikator yang secara kuantitatif maupun kualitatif terukur. Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu ditetapkan bahwa indikator- indikator tersebut memenuhi syarat dan kaidah-kaidah pengukuran indikator yang “SMART” yaitu :

1. **Spesifik**: dalam artian bahwa indikator yang digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan kondisi yang dapat diukur keberhasilannya
2. **Terukur**: indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur;
3. **Terjangkau**: Indikator yang akan digunakan bersifat mudah digunakan dan tidak rumit dalam perhitungannya; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan.
4. **Realistis**: Indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;
5. **Masa Waktu**: Indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/tahunan.

Indikator kinerja bisa berbeda untuk setiap organisasi / instansi / OPD, namun setidaknya ada persyaratan umum untuk terwujudnya suatu indikator yang ideal. Menurut Palmer (1995), syarat-syarat indikator yang ideal adalah sebagai berikut:

1. *Consitency*. Berbagai definisi yang digunakan untuk merumuskan indicator kinerja harus konsisten, baik antara periode waktu maupun antar unit-unit organisasi.
2. *Comparibility*. Indikator kinerja harus mempunyai daya banding secara layak.
3. *Clarity*. Indikator kinerja harus sederhana, didefinisikan secara jelas dan mudah dipahami.
4. *Controllability*. Pengukuran kinerja terhadap seorang manajer publik harus berdasarkan pada area yang dapat dikendalikannya.
5. *Contingency*. Perumusan indikator kinerja bukan variabel yang independen dari lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi, gaya manajemen, ketidakpastian dan kompleksitas lingkungan eksternal harus dipertimbangkan dalam perumusan indikator kinerja.
6. *Comprehensiveness*. Indikator kinerja harus merefleksikan semua aspek perilaku yang cukup penting untuk pembuatan keputusan manajerial.
7. *Boundedness*. Indikator kinerja harus difokuskan pada faktor-faktor utama yang merupakan keberhasilan organisasi.
8. *Relevance*. Berbagai penerapan membutuhkan indicator spesifik sehingga relevan untuk kondisi dan kebutuhan tertentu.
9. *Feasibility*. Target-target yang digunakan sebagai dasar perumusan indikator kinerja harus merupakan harapan yang realistik dan dapat dicapai.

Sementara itu, syarat indikator kinerja menurut BPKP (2000) adalah sebagi berikut : (i) **spesifik dan jelas**, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi; (ii) **dapat diukur secara obyektif** baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitaitf, yaitu dua atau lebih mengukur indicator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama; (iii) **relevan**, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan; (iv) **dapat dicapai**, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak serta proses; (v) **harus cukup flesibel dan sensitif** terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan; dan (vi) **efektif**, data/informasi yang berkaitan dengan indicator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

1.2. INDIKATOR SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA

Sesuai dengan Misi kelima RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021, dengan rumusan yang menegaskan tentang ketersedian infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yamg memiliki tujuan "*Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan"*, dengan sasaran yaitu "*Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan",* maka indikator sasaran penanggulangan bencana Kabupaten Sidoarjo dalam dokumen RPJMD adalah :

1. Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (di dalam WMK) sesuai SPM
2. Persentase penurunan Indeks Resiko Bencana

Penetapan indikator kinerja utama dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada prinsip-prinsip penanggulangan bencana dan Standar Pelayanan Minimal yang tersurat dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya pada Pasal 3 ayat 2 dan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

Pasal 3 ayat 2 UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:

a. cepat dan tepat;

b. prioritas;

c.koordinasi dan keterpaduan;

d. berdaya guna dan berhasil guna;

e. transparansi dan akuntabilitas;

f. kemitraan;

g. pemberdayaan;

h. non-diskriminatif;

i. non-proletisi.

Serumpun dengan prinsip-prinsip tersebut, dalam Pasal 20 ditegaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulanganbencana dan penanganan pengungsi dengan bertindakcepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencanasecara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Sesuai dengan tugas dan fungsi dimaksud, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Standard Operational Procedure (SOP) penanggulangan bencana, yang meliputi :

1. SOP Pelayanan Informasi Dini Kebencanaan Pada Saat Siaga Bencana;
2. SOP Pelayanan Penanggulangan Bencana pada Saat Tanggap Darurat Bencana.

1.3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN BPBD KAB. SIDOARJO

Sebagaimana dijelaskan dalam bab terdahulu, serta dengan mengacu pada indikator sasaran penanggulangan bencana yang tertuang dalam dokumen RPJMD yakni penanganan bencana secara tepat dan tepat, maka yang menjadi tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Sidoarjo adalah meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di kabupaten Sidoarjo. Adapun sasarannya adalah terlaksananya peningkatan sinergitas pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo. Dari sasaran tersebut maka dirumuskan Indikator Kinerja Program BPBD Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

1. Cakupan wilayah Kabupaten yang tertangani dalam waktu tanggap;
2. Persentase wilayah Kabupaten yang sudah mempunyai pos PMK;
3. Persentase satuan petugas PMK yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi;
4. Persentase kelompok / komunitas yang telah mendapatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan atau pengurangan risiko bencana;
5. Persentase logistik kebencanaan yang tersalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan;

6. Persentase korban bencana yang terehabilitasi;
7. Persentase bantuan pasca bencana yang terealisasi.

Tabel 31. Target Capaian Renstra

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
Program Peningkatan kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	a. Persentase wilayah Kabupaten yang sudah mempunyai pos PMK b. Persentase satuan petugas PMK yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi c. Persentase mobil PMK dengan kondisi layak fungsi	a. 72% b. 60% c. 100%
Penyusunan pedoman pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah pedoman pencegahan bahaya kebakaran yang tersusun	4 dokumen
Pembinaan SDM PMK	a. Jumlah petugas PMK yang terlatih b. Jumlah tenaga harian lepas yang direkrut c. Jumlah THL pemadam kebakaran	a. 12 orang b. 66 orang c. 207 orang
Pencegahan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarpras pencegahan bahaya kebakaran	a. Jumlah sarpras pencegahan bahaya kebakaran yang diadakan b. Jumlah sarpras pencegahan bahaya kebakaran yang dipelihara c. Jumlah sarpras pencegahan bahaya kebakaran yang direhabilitasi	a. 36 unit b. 45 unit c. 5 gedung
Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah pengaduan kejadian kebakaran yang ditangani	100%

Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Jumlah Bangunan/Gedung yang dilakukan pemeriksaan berkala sistem proteksi kebakaran	100%
Sosialisasi dan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah peserta sosialisasi	1000 orang
Program pencegahan dini, Kesiapsiagaan , tanggap darurat dan management logistik kebencanaan	a. Persentase pelayanan informasi rawan bencana; b. Jumlah peserta peningkatan kapasitas masyarakat/aparatur dalam bidang kebencanaan; c. Persentase logistik kebencanaan yang tersalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan	a. 100% b. 500 orang c. 100%
Penyusunan database dan informasi potensi bencana	a. Jumlah jenis informasi potensi bencana dan data potensi/ancaman bencana yang terupdate b. Jumlah masyarakat / aparatur yang mendapatkan informasi rawan bencana	a. 15 jenis b. 500 orang
Koordinasi Penyusunan kebijakan, pembinaan dan monev pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana	a. Jumlah dokumen penyelenggaraan bencana yang tersusun b. Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana	a. 4 dokumen b. 560 orang
Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bencana	a. Jumlah sarana prasaran kebencanaan yang diadakan b. Jumlah sarana prasaran kebencanaan yang dipelihara	a. 12 unit b. 16 unit
Koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dan management logistik kebencanaan	Jumlah peserta koordinasi pelaksanaan tanggap darurat	240 orang
Kegiatan Operasional tanggap darurat dan management logistik kebencanaan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan	100%

Pengadaan Logistik penanggulangan bencana	Jumlah logistik yang disalurkan	4000 bungkus
Program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	a. Persentase korban bencana yang terehabilitasi b. Persentase bantuan pasca bencana yang terealisasi berdasarkan laporan Jitupasna	a. 100% b. 100%
Penyiapan sumberdaya untuk rehabilitasi Pasca bencana	Jumlah personil relawan yang dibina / dilatih	200 orang
Pelaksanaan rehabilitasi Pasca Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan trauma healing pasca bencana	100%
Penyusunan Laporan pasca bencana	Jumlah kejadian bencana yang dilakukan Jitupasna	100%
Koordinasi Pemulihan pasca bencana	Jumlah peserta rapat koordinasi pasca bencana	400 orang
Pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana	Persentase bahan baku bangunan yang disalurkan	100%

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sidoarjo merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan oleh seluruh aparat BPBD Kabupaten Sidoarjo setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, namun BPBD Kabupaten Sidoarjo telah memiliki arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal penanggulangan bencana. Saran, masukan dan evaluasi yang membangun sangat kami harapkan dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan ini.

Demikian penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA) BPBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 agar dapat dijadikan pedoman dan arah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang konsisten, sinergis, proporsional dan komunikatif sesuai tugas dan fungsi yang diemban BPBD dan upaya peningkatan layanan kepada stakeholder.

Sidoarjo, Juli 2018

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ir. DWIDJO PRAWITO, M.MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651012 199202 1 001

Lampiran 1. PROGRAM DAN KEGIATAN PER BIDANG BPBD KABUPATEN SIDOARJO

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos/ materai yang diadakan
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya rekening air, listrik, dan telepon yang dibayarkan
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
	Penyediaan Jasa kebersihan kantor/keamanan kantor/pengemudi	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor
	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan
	Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pengadaan buku bacaan
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah mamin yang disediakan
	Kegiatan Kedinasan dalam daerah. Luar daerah dan luar negeri	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan di dalam daerah dan di luar daerah
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan
	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PD	Terlaksananya kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PD

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan
	Penyediaan Jasa Pindah Kantor	Biaya jasa pindah kantor yang dibayarkan
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan
	Pengadaan meubelur	Jumlah dan jenis meubeleur yang diadakan
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yg dipelihara
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara
	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu
	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah Laporan keuangan yang disusun
	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	a. Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun b. Jumlah laporan capaian kinerja PD yang disusun
4.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin
	Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai	a. Jumlah mesin absensi yang diadakan b. Jumlah mesin absensi yang dipelihara
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya biaya pengadaan pakaian dinas

5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kelulusan peserta peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dikirim dan bersertifikat
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Non formal
	Sosialisasi Peraturan perundangan tentang kebencanaan	Jumlah peserta sosialisasi

Lampiran 2. Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD, Program dan KegiatanTEKNIS

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR
Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan	Indeks Resiko Bencana

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR	STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN
					I	II	III	IV	V		
Meningkatnya kapasitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo	Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Sidoarjo	Peningkatan Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana sesuai SPM	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo) sesuai SPM	39,51%	40%	45%	50%	55%	60%	60%	Penambahan pos Damkar, personil dan sarana prasarana
			Persentase Penurunan Indeks Resiko Bencana	149,6	6%	6%	6%	6%	6%	104,7	a. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana; b. peningkatan sarana prasarana PB

Lampiran 3. Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD, Program dan Kegiatan KESEKRETARIATAN

No	Sasaran RPJMD	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD		Program	Kegiatan	Tahapan dan Sub Kegiatan
1	2	3	4		6	7	8
2	Terwujudnya ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik	Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	Prosentase (%) sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) Penyediaan jasa surat menyurat	
						2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
				Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur		3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	
						4) Penyediaan jasa kebersihan kantor;	
						5) Penyediaan alat tulis kantor;	
						6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;	
						7) Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor;	
						8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;	
						9) Penyediaan bahan logistik kantor;	
						10) Penyediaan makanan dan minuman;	
						11) Rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah	
						12) Penyediaan jasa administrasi keuangan	
					2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1) Pembangunan gedung	
						2) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	
						3) Pengadaan kendaraan dinas/operasional	
						4) Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	
						5) Pengadaan meubelair	
						6) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	
						7) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	
						8) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	
					3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1) Penyusunan laporan keuangan	
						2) Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	
						3) Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	
						4) Pengadaan Narasumber	
					4. Peningkatan Disiplin Aparatur	1) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	
						2) Pengadaan pakaian kerja lapangan beserta kelengkapannya	
						3) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	
						4) Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai	
					5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1) Pendidikan dan Pelatihan Formal / kedinasan	
						2) Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan tentang kebencanaan	

Lampiran 4. Kegiatan/Sub Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Indikatif

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU											
			2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1. Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	**Persentase korban bencana yang terehabilitasi**	**N/A**	**N/A**	**Rp.3.699.977.000**	**100 %**	**Rp.579.800.000**	**100 %**	**Rp.510.337.700**	**100 %**	**Rp.567.263.320**	**100 %**	**Rp.647.981.600**	**100 %**	**Rp.716.029.760**
	Persentase bantuan pasca bencana yang terealisasi berdasarkan laporan Jitupasna	**N/A**	**N/A**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**	
1. Penyiapan sumberdaya untuk rehabilitasi pasca bencana	Jumlah personil relawan yang dibina / dilatih	40 orang	40 orang	Rp.88.950.000	40 orang	Rp.253.750.000	40 orang	Rp.21.916.500	40 orang	Rp.30.000.000	40 orang	Rp.38.000.000	40 orang	Rp.45.000.000
2. Penyusunan laporan pasca bencana	Jumlah kejadian bencana yang dilakukan Jitupasna	100 %	100 %	Rp.87.450.000	100 %	Rp.97.300.000	100 %	Rp.155.866.900	100 %	Rp.171.453.590	100 %	Rp.207.500.000	100 %	Rp.228.200.000
3. Koordinasi pemulihan pasca bencana	Jumlah peserta rapat koordinasi pasca bencana	90 orang	90 orang	Rp.109.500.000	90 orang	Rp.135.000.000	100 orang	Rp.32.460.000	100 orang	Rp.35.706.000	100 orang	Rp.39.276.600	100 orang	Rp.43.204.260
4. Pelaksanaan rekonstruksi pascabencana	Persentase bahan baku bangunan yang disalurkan	0 %	0 %	Rp.3.292.077.000	0 %	Rp.5.000.000	100 %	Rp.139.594.300	100 %	Rp.153.553.730	100 %	Rp.169.000.000	100 %	Rp.186.000.000
5. Pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan trauma	100 %	100 %	Rp.122.000.000	100 %	Rp.88.750.000	100 %	Rp.160.500.000	100 %	Rp.176.550.000	100 %	Rp.194.205.000	100 %	Rp.213.625.500

			healing pasca bencana													

Program Peningkatan kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	**- Persentase wilayah Kabupaten yang sudah mempunyai pos PMK - Persentase satuan petugas PMK yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi - Persentase mobil PMK dengan kondisi layak fungsi**	**- 45% - 60% - 70%**	**- 28% - 35% - 50%**	**7,244,848,000**	**- 30% - 50% - 55,56%**	**7,399,297,500**	**- 35% - 20% - 60%**	**8,139,227,250**	**- 40% - 25% - 65%**	**8,953,149,975**	**- 45% - 30% - 70%**	**9,848,464,973**	**- 45% - 60% - 70%**
Penyusunan pedoman pencegahan bahaya kebakaran	- Jumlah pedoman pencegahan / penanggulangan bahaya kebakaran yang tersusun	4 dokumen	- 1 dok -500 orang	301,750,000	2 dok	75,000,000	0 dok	82,500,000	1 dok	90,750,000	1 dok	99,825,000	4 dokumen
Pengadaan dan Pembinaan SDM PMK	- Jumlah petugas PMK yang terlatih - Jumlah tenaga harian lepas yang direkrut - Jumlah THL pemadam kebakaran	- 12 orang - 66 orang - 207 orang	- 80 orang - 30 orang	3,197,005,000	- 0 orang - 6 orang - 117 orang	3,468,784,000	- 4 orang - 0 orang - 147 orang	3,815,662,400.00	- 4 orang - 30 orang - 177 orang	4,197,228,640.00	- 4 orang - 30 orang - 207 orang	4,616,951,504	- 12 orang - 66 orang - 207 orang
Pengadaan, Pemeliharaan dan	- Jumlah sarpras	- 36 unit - 45 unit	- 2 unit - 10 unit	3,408,503,000	- 9 unit - 10 unit	3,082,550,000	- 5 unit - 5 unit	3,390,805,000.	- 10 unit - 10 unit	3,729,885,500.00	- 10 unit - 10 unit	4,102,874,050	- 36 unit

Rehabilitasi Sarana Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	pencegahan bahaya kebakaran yang diadakan - Jumlah sarpras pencegahan bahaya kebakaran yang dipelihara - Jumlah sarpras pencegahan bahaya kebakaran yang direhabilitasi	- 6 gedung	-3 gedung		- 0 gedung		- 1 gedung	00	- 1 gedung		- 1 gedung		- 45 unit - 6 gedung
Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah pengaduan kejadian kebakaran yang ditangani	1060 kali	214 kali	292,590,000	100%	366,125,000	100%	402,737,500.00	100%	443,011,250.00	100%	487,312,375	1060 kali
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Jumlah Bangunan/Gedung yang dilakukan pemeriksaan berkala sistem proteksi kebakaran	100%	- 100% - 50%	45,000,000	100%	268,988,500	100%	295,887,350.00	100%	325,476,085.00	100%	358,023,694	100%
Sosialisasi dan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah peserta sosialisasi	2000 orang	0	0	500 orang	137,850,000	500 orang	151,635,000.00	500 orang	166,798,500.00	500 orang	183,478,350	2000 orang

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		**N/A**	**N/A**	**Rp.0**	**N/A**	**Rp.0**	**N/A**	**Rp.0**	**100 %**	**Rp.3.397.925.500**	**100 %**	**Rp.3.604.828.500**	**100 %**	**Rp.3.810.921.800**
	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	4550 Buah	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	4500 Buah	Rp.2.341.395.500	4500 Buah	Rp.2.341.395.500	4500 Buah	Rp.2.394.395.500
	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	20 Orang/Bulan	N/A		N/A		N/A		20 Orang/Bulan		20 Orang/Bulan		20 Orang/Bulan	
	Jumlah BBM yang disediakan	17943 Liter	N/A		N/A		N/A		19000 Liter		20000 Liter		20000 Liter	
	Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	36 Unit	N/A		N/A		N/A		36 Unit		36 Unit		38 Unit	
	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	1584 Kotak	N/A		N/A		N/A		1600 Kotak		1600 Kotak		1700 Kotak	
	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	N/A		N/A		N/A		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	
	Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang terbayar	0 Premi/Bulan	N/A		N/A		N/A		0 Premi/Bulan		0 Premi/Bulan		0 Premi/Bulan	
	Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	17 Buah	N/A		N/A		N/A		22 Buah		22 Buah		22 Buah	
	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	12 Buah	N/A		N/A		N/A		12 Buah		12 Buah		12 Buah	
	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	15 Buah	N/A		N/A		N/A		15 Buah		15 Buah		15 Buah	
	Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia	45 Buah	N/A		N/A		N/A		45 Buah		45 Buah		45 Buah	

	Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	19 Orang	N/A		N/A		N/A		27 Orang		27 Orang		31 Orang	
	Jumlah jam lembur yang terbayar	0 Jam	N/A		N/A		N/A		200 Jam		200 Jam		200 Jam	
	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100 %	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	100 %	Rp.500.000.000	100 %	Rp.650.000.000	100 %	Rp.750.000.000
	Jumlah laporan barang milih daerah yang disusun	6 %	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	6 %	Rp.15.000.000	6 %	Rp.15.000.000	6 %	Rp.15.000.000
	Jumlah gedung kantor/rumah jabatan/dinas yang di bangun	0 Unit	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	0 Unit	Rp.140.000.000	0 Unit	Rp.150.000.000	0 Unit	Rp.160.000.000
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0 Unit	N/A		N/A		N/A		2 Unit		0 Unit		2 Unit	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	30 Unit	N/A		N/A		N/A		35 Unit		20 Unit		20 Unit	
	Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang direhab sedang/berat	223,5 M2	N/A		N/A		N/A		100 M2		100 M2		100 M2	
	Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara	223,5 M2	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	250 M2	Rp.45.000.000	250 M2	Rp.50.000.000	250 M2	Rp.60.000.000
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	36 Unit	N/A		N/A		N/A		36 Unit		38 Unit		38 Unit	

	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara	15 Unit	N/A		N/A		N/A		12 Unit		10 Unit		10 Unit	
	Jumlah pakaian dinas/kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia	39 Buah	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	39 Buah	Rp.69.030.000	39 Buah	Rp.75.933.000	39 Buah	Rp.83.526.300
	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia	0 Buah	N/A		N/A		N/A		39 Buah		39 Buah		39 Buah	
	Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan/bimtek	0 Orang	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	10 Orang	Rp.200.000.000	10 Orang	Rp.225.000.000	10 Orang	Rp.250.000.000
	Jumlah peserta yang hadir mengikuti sosialisasi/seminar	70 Orang	N/A		N/A		N/A		70 Orang		70 Orang		70 Orang	
	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	2 Dok	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	2 Dok	Rp.80.000.000	2 Dok	Rp.90.000.000	2 Dok	Rp.90.000.000
	Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)	2 Dok	N/A		N/A		N/A		2 Dok		2 Dok		2 Dok	
	Jumlah data dan informasi yang disusun	1 Dok	N/A		N/A		N/A		1 Dok		1 Dok		1 Dok	
	Jumlah dokumen Monev PD yang disusun	1 Dok	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	1 Dok	Rp.5.000.000	1 Dok	Rp.5.000.000	1 Dok	Rp.5.000.000
	Jumlah Dokumen SKM yang disusun	1 Dok	N/A		N/A		N/A		1 Dok		1 Dok		1 Dok	
	Jumlah dokumen Laporan kinerja yang disusun	13 Laporan	N/A		N/A		N/A		13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan	
	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	1 Laporan	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	1 Laporan	Rp.2.500.000	1 Laporan	Rp.2.500.000	1 Laporan	Rp.3.000.000
Persentase jumlah dokumen		**100**	**100**	**Rp.35.000.000**	**100**	**Rp.65.000.000**	**100**	**Rp.32.250.000**	**100**	**Rp.0**	**100**	**Rp.0**	**100**	**Rp.0**

perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tersusun tepat waktu													
Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Rp.32.500.000	1 dokumen	Rp.62.500.000	1 dokumen	Rp.31.750.000	0 dokumen	Rp.0	0 dokumen	Rp.0	0 dokumen	Rp.0
Jumlah laporan capaian kinerja PD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen	
Jumlah Laporan keuangan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Rp.2.500.000	1 dokumen	Rp.2.500.000	1 dokumen	Rp.500.000	0 dokumen	Rp.0	0 dokumen	Rp.0	0 dokumen	Rp.0
Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	**100 %**	**100 %**	**Rp.1.520.555.668**	**100 %**	**Rp.1.629.150.000**	**100 %**	**Rp.1.868.564.500**	**N/A**	**Rp.0**	**N/A**	**Rp.0**	**N/A**	**Rp.0**
Jumlah benda pos/ materai yang diadakan	250 lembar	250 lembar	Rp.4.000.000	250 lembar	Rp.3.150.000	250 lembar	Rp.3.150.000	0 lembar	Rp.0	0 lembar	Rp.0	0 lembar	Rp.0
Biaya rekening air, listrik, dan telepon yang dibayarkan	12 bulan	12 bulan	Rp.200.000.000	12 bulan	Rp.292.500.000	12 bulan	Rp.265.000.000	0 bulan	Rp.0	0 bulan	Rp.0	0 bulan	Rp.0
Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 unit	0 unit	Rp.0	20 unit	Rp.40.000.000	5 unit	Rp.15.000.000	0 unit	Rp.0	0 unit	Rp.0	0 unit	Rp.0
Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	20 orang	20 orang	Rp.538.557.688	20 orang	Rp.596.600.000	20 orang	Rp.731.000.000	0 orang	Rp.0	0 orang	Rp.0	0 orang	Rp.0
Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor	6 orang	6 orang	Rp.192.997.980	6 orang	Rp.183.400.000	6 orang	Rp.207.814.500	0 orang	Rp.0	0 orang	Rp.0	0 orang	Rp.0
Jenis alat tulis kantor yang disediakan	45 jenis	45 jenis	Rp.55.000.000	45 jenis	Rp.61.000.000	45 jenis	Rp.50.000.000	0 jenis	Rp.0	0 jenis	Rp.0	0 jenis	Rp.0
Jumlah barang cetakan dan penggandaan	20 jenis	20 jenis	Rp.50.000.000	20 jenis	Rp.75.000.000	20 jenis	Rp.65.000.000	0 jenis	Rp.0	0 jenis	Rp.0	0 jenis	Rp.0

	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan	14 jenis	14 jenis	Rp.19.000.000	10 jenis	Rp.27.500.000	12 jenis	Rp.27.500.000	0 jenis	Rp.0	0 jenis	Rp.0	0 jenis	Rp.0
	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	0 unit	0 unit	Rp.0	0 unit	Rp.0	0 unit	Rp.0	0 unit	Rp.0	0 unit	Rp.0	0 unit	Rp.0
	Jumlah pengadaan buku bacaan	20 buah	20 buah	Rp.6.000.000	20 buah	Rp.7.000.000	20 buah	Rp.7.000.000	0 buah	Rp.0	0 buah	Rp.0	0 buah	Rp.0
	Jumlah bahan logistik yang disediakan	12 bulan	12 bulan	Rp.160.000.000	12 bulan	Rp.100.000.000	12 bulan	Rp.100.000.000	0 bulan	Rp.0	0 bulan	Rp.0	0 bulan	Rp.0
	Jumlah mamin yang disediakan	1400 kotak	1500 kotak	Rp.25.000.000	1600 kotak	Rp.23.000.000	1600 kotak	Rp.25.000.000	0 kotak	Rp.0	0 kotak	Rp.0	0 kotak	Rp.0
	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan di dalam daerah dan di luar daerah	182 kali	176 kali	Rp.270.000.000	176 kali	Rp.220.000.000	200 kali	Rp.372.100.000	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0
	Jumlah dokumen SKM yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	Rp.0	1 dokumen	Rp.0	1 dokumen	Rp.0	0 dokumen	Rp.0	0 dokumen	Rp.0	0 dokumen	Rp.0
Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi		**83,26**	**100**	**Rp.1.431.810.316**	**100**	**Rp.1.106.405.000**	**100**	**Rp.975.215.800**	**N/A**	**Rp.0**	**N/A**	**Rp.0**	**N/A**	**Rp.0**
	Jumlah dan jenis meubeleur yang diadakan	9 buah	9 buah	Rp.258.641.000	0 buah	Rp.0	0 buah	Rp.0	0 buah	Rp.0	0 buah	Rp.0	0 buah	Rp.0
	Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	9 macam	9 macam	Rp.98.500.000	18 macam	Rp.213.430.000	15 macam	Rp.143.900.000	0 macam	Rp.0	0 macam	Rp.0	0 macam	Rp.0
	Jumlah unit gedung kantor yg dipelihara	1 gedung	1 gedung	Rp.576.028.316	4 gedung	Rp.757.975.000	5 gedung	Rp.701.315.800	0 gedung	Rp.0	0 gedung	Rp.0	0 gedung	Rp.0
	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	35 unit	32 unit	Rp.120.000.000	60 unit	Rp.70.000.000	36 unit	Rp.70.000.000	0 unit	Rp.0	0 unit	Rp.0	0 unit	Rp.0
	Biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 bulan	12 bulan	Rp.120.000.000	12 bulan	Rp.65.000.000	12 bulan	Rp.60.000.000	0 bulan	Rp.0	0 bulan	Rp.0	0 bulan	Rp.0

	gedung kantor													
	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	1 unit	Rp.258.641.000	0 unit	Rp.0	0 unit	Rp.0	0 unit	Rp.0	0 unit	Rp.0	0 unit	Rp.0
Persentase Aparatur yang disiplin		**87,5 %**	**100 %**	**Rp.19.500.000**	**100 %**	**Rp.20.000.000**	**100 %**	**Rp.46.730.000**	**N/A**	**Rp.0**	**N/A**	**Rp.0**	**N/A**	**Rp.0**
	tersedianya biaya pengadaan pakaian dinas	0 stel	0 stel	Rp.0	0 stel	Rp.0	39 stel	Rp.26.730.000	0 stel	Rp.0	0 stel	Rp.0	0 stel	Rp.0
	Jumlah mesin absensi yang diadakan	6 unit	6 unit	Rp.19.500.000	2 unit	Rp.20.000.000	3 unit	Rp.20.000.000	0 unit	Rp.0	0 unit	Rp.0	0 unit	Rp.0
	Jumlah mesin absensi yang dipelihara	4 unit	4 unit		3 unit		6 unit		0 unit		0 unit		0 unit	
Tingkat kelulusan peserta peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dikirim dan bersertifikat		**100**	**100**	**Rp.92.500.000**	**100**	**Rp.100.000.000**	**70**	**Rp.90.000.000**	**N/A**	**Rp.0**	**N/A**	**Rp.0**	**N/A**	**Rp.0**
	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Non formal	0 orang	0 orang	Rp.0	0 orang	Rp.0	70 orang	Rp.90.000.000	0 orang	Rp.0	0 orang	Rp.0	0 orang	Rp.0
	jumlah peserta sosialisasi	80 orang	80 orang	Rp.92.500.000	100 orang	Rp.100.000.000	70 orang	Rp.0	0 orang	Rp.0	0 orang	Rp.0	0 orang	Rp.0